

anri

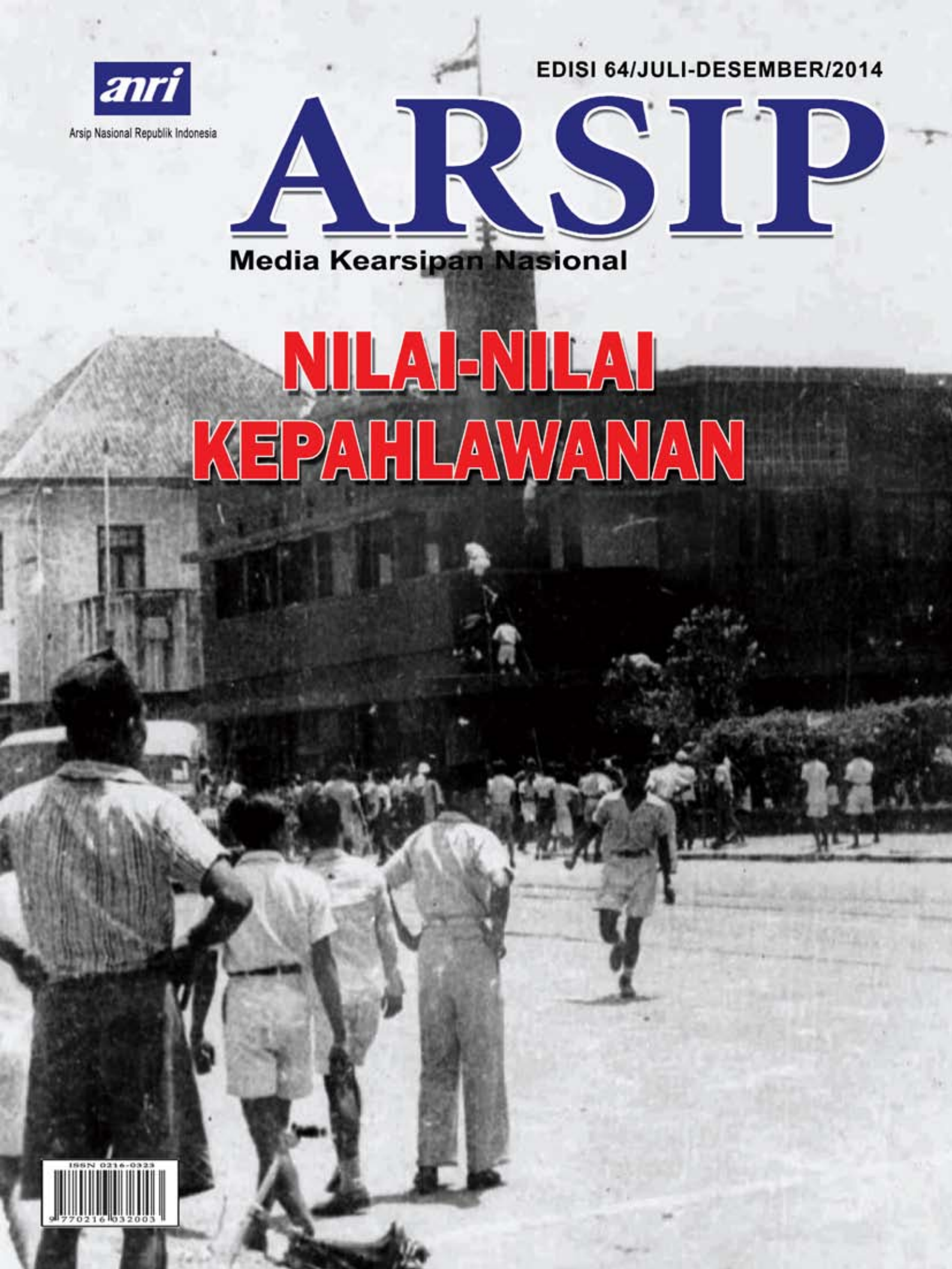
Arsip Nasional Republik Indonesia

EDISI 64/JULI-DESEMBER/2014

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN



ISSN 0216-0323



9 770216 032003

Konferensi

ASIA - AFRIKA

7 Reel Arsip Film

1778 Lembar Arsip Kertas

565 Lembar Arsip Foto



Mari Dukung
Arsip Konferensi Asia Afrika
sebagai Memory of the World

Video KAA dapat disaksikan di www.anri.go.id atau



@ArsipNasionalRI



Arsip Nasional Republik Indonesia



Humas Arsip Nasional RI

DAFTAR ISI



5 **NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, ARSIP DAN REVOLUSI MENTAL**

Pistiwa Pertempuran Surabaya hanya merupakan salah satu contoh perjuangan dan pengorbanan arek-arek Surabaya yang dapat dikategorikan sebagai sikap heroik. Masih ada beberapa pertempuran seperti Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area dimana semua menunjukkan sikap heroik dari kelompok masyarakat yang ikut bertempur.

DARI REDAKSI _____ **4**

R. Suryagung SP : _____ **18**

SYEKH YUSUF: PEJUANG NEGERI ASIA AFRIKA

Ghesa Ririan Mitalia : _____ **21**

LAYAR PERAK DAN NASIONALISME MASYARAKAT SURABAYA

Raistiwar Pratama : _____ **24**

ABDUL WAHAB CHASBULLAH : PAHLAWAN NU, PAHLAWAN NKRI

Profil : _____ **27**

LAB LABA-LABA: KOMUNITAS PERAWAT ARSIP FILM INDONESIA



10 **Karseno : PERAN ARSIP DALAM PENGUSULAN KEPAHLAWANAN NASIONAL**

Arsip sebagai sumber informasi merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa keberadaannya memegang peranan utama sebagai bukti memori kolektif dan jati diri bangsa. Peran arsip dalam konteks masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang tetap menjadi catatan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Octavia Syafarwati : _____ **30**

MENYUSUN GUIDE ARSIP PETA BATAS WILAYAH PROVINSI

Rayi Darmagara : _____ **32**

QUO VADIS PEDOMAN RETENSI ARSIP

Manca Negara : _____ **36**

NAPAK TILAS HUBUNGAN INDONESIA-SERBIA

Manca Negara : _____ **39**

NARA DAN KETERLIBATAN PADA PENANGANAN ARSIP KEPRESIDENAN

Regional : _____ **43**

ARSIP MASUK SEKOLAH : TEROBOSAN KARSIPDA KOTA BEKASI

Achmad Dedi Faozi : _____ **45**

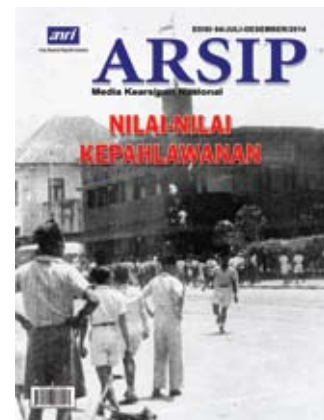
BAPAKKU, PAHLAWANKU...

LIPUTAN _____ **48**



15 **Ina Mirawati : SEPENGGAL CATATAN TENTANG KEPAHLAWANAN DALAM ARSIP**

Sebuah buku dapat kita buat lagi tetapi arsip hanya sekali dibuatnya dan itulah yang menjadikan arsip itu unik karena tanpa pengganti. Oleh karena itu setiap pejabat yang membuat arsip dituntut untuk jujur dalam melaporkan setiap kejadian pada masa pemerintahannya.



KETERANGAN COVER

Suasana Hotel Yamato pada saat peristiwa perobekan bendera Belanda, 19 September 1945

Sumber : ANRI, Kempen R. 531204 FG 1-12

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Dra. Listianingtyas M.

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos., MAP

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,
M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,
Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian, S.AP,
Susanti, S.Sos., M.Hum., Eva Julianty, S.Kom.,
Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.,
Raistiwar Pratama, S.S

Sekretariat:

Octavia Syafarwati, S.Si

Reporter:

Annawaty Betawinda M, S.Sos., Tiara Kharisma,
S.Ikom., Erieka Nurlidya, S.Sos., Octavia
Syafarwati, S.Si., Rayi Darmagara, SH., R.
Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum

Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom,
Supriyono, S.ST.Ars, Firmansyah, A.Md,

Editor:

Tiara Kharisma, S.I.Kom.,
Khoerun Nisa Fadillah, S.IP., Achmad Dedi Faozi,
S.Hum., Yuanita Utami, S.IP.,

Perwajahan/Tata Letak:

Isanto, A.Md

Distributor:

Farida Aryani, S.Sos
Achmad Sadari

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Belum genap tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan, di Surabaya para pejuang kemerdekaan menghadapi ultimatum dari tentara musuh untuk meletakkan senjata.

Para pejuang tidak tunduk melainkan melakukan perlawanan yang kemudian dikenal dengan pertempuran 10 November 1945, sehingga peristiwa tersebut dapat menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

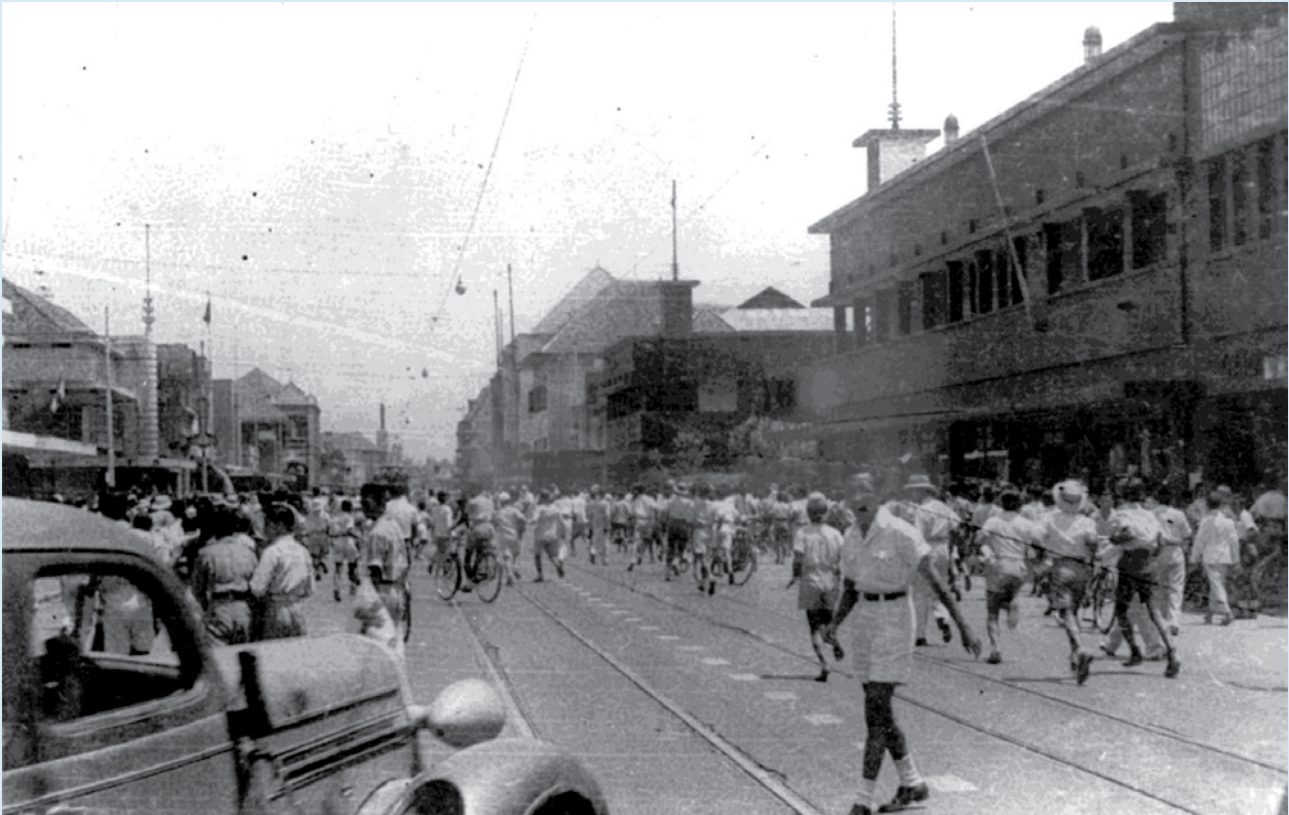
Dua tahun kemudian dan dua tahun setelahnya, kedaulatan Negara Republik Indonesia kembali mendapat ancaman dari luar dalam bentuk agresi militer yang dikenal dengan Agresi I dan II. Sementara itu, ancaman dari dalam mulai nampak berupa benih-benih disintegrasi. Perjuangan tanpa mengenal lelah yang disertai dengan kesadaran tentang arti penting memelihara persatuan dan kesatuan di dalam kerangka NKRI dapat dirasakan sampai saat ini.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa perjuangan tidak mengenal jeda. Di hadapan kita sekarang terbentang beragam persoalan yang membutuhkan pahlawan-pahlawan masa kini. Tidaklah keliru jika sebutan pahlawan masa kini ditujukan kepada mereka yang mampu mengatasi persoalan sesuai bidang yang dikuasainya melalui dedikasi yang melebihi tuntutan.

Untuk itu, Majalah ARSIP edisi ke-64 menurunkan kepahlawanan sebagai laporan utama dan beberapa artikel terkait selain berbagai artikel rubrik tetap. Semoga sajian majalah edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca. Jika pada majalah ini terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun tampilan, dimohonkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih dan selamat menikmati majalah kami.

Redaksi

NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, ARSIP DAN REVOLUSI MENTAL



Peristiwa heroik para pemuda Surabaya menentang tentara Belanda di sekitar Hotel Yamato Surabaya (sekarang Hotel Gajah Mada). Peristiwa heroik Insiden Surabaya ini kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan 10 Nopember 1945

Sumber: ANRI: Kempen 531304 FG1-6

Masih teringat dalam memori betapa besar keberanian arek-arek Surabaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan Sekutu pada 10 November 1945. Peristiwa ini diawali dengan Kedatangan tentara sekutu dibawah kepemimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada 25 Oktober 1945. Pembebasan terhadap para perwira Sekutu dan pegawai RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*) serta ultimatum bagi orang Indonesia yang bersenjata untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri, memicu perlawanan dari arek-arek Surabaya. Sehingga terjadi

pertempuran Surabaya yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Peristiwa Pertempuran Surabaya merupakan salah satu contoh perjuangan dan pengorbanan arek-arek Surabaya yang dapat dikategorikan sebagai sikap kepahlawanan. Masih ada beberapa pertempuran seperti Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area dimana semua menunjukkan sikap kepahlawanan dari kelompok masyarakat yang ikut bertempur. Semua memberikan pengorbanan besar baik materi maupun imateri

bahkan nyawa, mereka sebagai pahlawan. Pahlawan yang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih. Kategori perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan pertempuran fisik, namun juga melalui perjuangan diplomasi. Dengan demikian mereka yang ikut dalam perjuangan diplomasi juga dikategorikan sebagai pahlawan.

Eksistensi sebuah negara tidak terlepas dari peran pahlawan yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Peran dari perbuatan yang dilakukan oleh para pahlawan, maka sebuah

LAPORAN UTAMA

negara menjadi merdeka, maju, dan bahkan “mendunia”. Mereka yang telah berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan baik melalui perang fisik maupun diplomasi pada umumnya memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional. Hingga saat ini, ada sekitar 159 orang yang tercatat sebagai pahlawan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Melihat dari pengertian tersebut, artinya seorang pahlawan adalah orang yang telah berkorban dalam pertempuran merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta orang yang berhasil memberi keharuman nama bangsanya dalam kancah internasional dengan prestasi dan karyanya. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan redaksi Media Kearsipan Nasional, menurut Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, Pahlawan adalah orang yang melampaui panggilan diri dan tugasnya. Artinya seorang pahlawan adalah orang yang melakukan sesuatu yang lebih besar dari tugas dan kemampuannya sebagai bentuk pengabdian bagi bangsanya. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Kepala ANRI Mustari Irawan

“
Hal yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua
”

Mustari Irawan, mengatakan bahwa “Pahlawan adalah orang yang berjuang demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa dan mengabaikan kepentingan pribadi. Pengabdian yang dilakukan oleh para pahlawan didasari oleh niat yang ikhlas untuk berkorban yang disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sekali dan kecintaan

akan tanah air”.

Pahlawan bukan hanya orang yang gugur dalam medan perang, seseorang yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia juga bisa disebut sebagai pahlawan. Indonesia sudah tidak terlibat dalam pertempuran bersenjata, negara ini tetap membutuhkan pahlawan dalam berbagai bidang yang dapat membawa keharuman bangsa ini. Mereka yang telah berprestasi dalam bidangnya adalah pahlawan bagi bangsa ini. Dalam bidang jurnalistik ada Tirta Adisuryo, dalam bidang seni ada Ismail Marzuki, dan dalam bidang kedokteran ada Prof. Dr. Suharso. Pada masa kini, mereka yang berprestasi dan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional memperoleh penghargaan baik dari negara maupun pihak swasta yang ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah Yulianti Laksmi Parani, yang pernah memperoleh

penghargaan karena dedikasinya dalam bidang seni tari. Ia memperoleh tanda kehormatan Satyalencana Kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014. Dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional, Ibu lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1970 ini mengatakan bahwa "Pemberian gelar pahlawan merupakan usaha pemerintah untuk menghargai mereka yang di masa lalu telah membantu bangsa dalam menemukan identitasnya sebagai bangsa", ujarnya. Ibu yang pernah menjadi salah seorang pejabat struktural di ANRI ini berharap agar selanjutnya ANRI dapat menampilkan penerbitan arsip orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan bangsa.

Melihat pengertian pahlawan dari beberapa perspektif, ada beberapa nilai-nilai yang dapat dirumuskan sebagai sikap dari seorang pahlawan, yaitu rela berkorban, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, ikhlas, dan cinta tanah air. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut menjadi hal yang dapat kita pelajari dan implementasikan dalam kehidupan saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Hartono Laras " Akan tetapi, di balik itu semua, hal yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai rela berkorban, tanpa pamrih, percaya pada kemampuan sendiri, dan pantang mundur, dimana nilai-nilai tersebut harus direvitalisasi dan diaktualisasikansertadijadikansebagai nilai-nilai *spirit* dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa". Dalam hal ini menurutnya kemampuan untuk percaya pada diri sendiri, kerelaan untuk berkorban dan tanpa pamrih,



Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Hartono Laras

pantang menyerah, dan perbuatan yang didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri seorang pahlawan. Nilai-nilai ini harus didayagunakan, ditanamkan, dan dilestarikan mengingat besarnya negeri dengan penduduk yang beragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam diri pahlawan sangat penting untuk diimplementasikan dalam karakter bangsa Indonesia saat ini. Selain tempaan arus globalisasi yang begitu besar, bisa dikatakan krisis moral juga sedang terjadi di negara ini. Dalam media massa sering kita lihat sikap kelompok masyarakat bahkan oknum pejabat yang tidak mencerminkan karakter bangsa ini. Mulai dari tawuran antarwarga, perdebatan dan persaingan yang tidak sehat dari para politisi negeri ini bahkan kasus korupsi yang menimpa oknum wakil rakyat negara ini. Sikap negatif tersebut tentu membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dapat dikatakan, apabila para pahlawan kita yang telah gugur

berada dalam masa kini, betapa sedihnya melihat keributan dan perpecahan yang terjadi, padahal mereka sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga yaitu kehidupan.

Apakah kita hanya berdiam diri saja melihat kenyataan ini? Pemerintah Republik Indonesia sudah mulai melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mulai digalakkan program *Character Building*. Setiap instansi pemerintah diminta untuk mendukung program tersebut sesuai bidangnya masing-masing. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga ikut ambil bagian dalam program tersebut dengan menampilkan kembali karakter bangsa sebagaimana terekam dalam arsip yang tersimpan di ANRI. Menyikapi hal ini, Kepala ANRI berpendapat bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang dapat menjadi karakter bangsa meliputi nilai keikhlasan, kejujuran, kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme,

LAPORAN UTAMA

kegigihan, keberanian, dan keuletan. Keberhasilan dalam membangun kembali nilai-nilai kepahlawanan ke dalam karakter masyarakat Indonesia saat ini akan memberi harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Setelah pergantian pimpinan, upaya perbaikan karakter bangsa juga terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, hanya saja istilahnya berganti menjadi revolusi mental. Mengenai wacana revolusi mental, Presiden Joko Widodo pernah menulisnya dalam surat kabar Kompas edisi 10 Mei 2014, Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Revolusi mental diharapkan dapat membawa perubahan besar yang lebih baik bagi negara ini, terutama untuk membawa Indonesia kepada negara yang merdeka, adil, makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Menurut Kepala ANRI Mustari Irawan, revolusi didefinisikan sebagai perubahan dalam waktu yang singkat, sedangkan mental didefinisikan sebagai karakter atau watak manusia. Ada watak yang merupakan pembawaan, imitasi, sugesti, ataupun identifikasi. Untuk dapat merubah watak ke arah yang lebih baik dibutuhkan proses yang memakan waktu dan dibutuhkan sarana. Terkait dengan trisakti pembangunan manusia dengan kepribadian yang berkebudayaan seperti yang dikonsepsikan oleh Presiden Joko Widodo adalah karakter-karakter bangsa Indonesia misalnya rasa nasionalisme yang telah memudar. Dalam media Kompas 10 Mei 2014, Presiden Joko Widodo menulis,



Yulianti Laksmi Parani

“Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, “Indonesia yang berdaulat secara politik”, “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan “Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum dalam penerapan nilai-nilai kepahlawanan yang relevan dengan pembinaan karakter bangsa atau yang lebih dikenal dengan revolusi mental, kata Hartono Laras.

Penganugerahan gelar pahlawan diberikan langsung oleh Presiden RI yang biasanya dilakukan menjelang peringatan hari Pahlawan pada 10 November setiap tahun. Pengangkatan sebagai pahlawan dalam rangka penghormatan, penghargaan yang diberikan negara atas jasa seseorang. Gelar pahlawan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memperolehnya. Syarat umum untuk memperoleh gelar pahlawan di antaranya Warga Negara Indonesia

atau seseorang yang berjuang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara serta tidak pernah dipidana penjara. Selain syarat umum, masih ada syarat khusus untuk bisa memperoleh gelar pahlawan di antaranya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; serta memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang

tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dalam pengajuan gelar ini, dibutuhkan beberapa dokumen terkait calon pahlawan yang bersangkutan seperti daftar riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan, uraian perjuangan, biografi, daftar dan bukti tanda kehormatan yang pernah diterima, catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang pahlawan nasional yang bersangkutan, serta foto dokumentasi yang menjadi perjuangan calon pahlawan nasional yang bersangkutan. Dengan kata lain, dokumen/ arsip sangat berperan untuk pengajuan seseorang memperoleh gelar pahlawan. Sebab tanpa bukti perjuangan seseorang dalam bentuk dokumen, sulit rasanya untuk memperoleh gelar pahlawan. Arsip-arsip yang terhimpun tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan rapat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah (TP2GD) dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Dalam hal ini, TP2GD akan memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar. Sedangkan TP2GP bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.

Dalam usulan pemberian gelar pahlawan, ANRI menjadi salah satu anggota TP2GP. Dalam hal ini Kepala ANRI berharap agar perspektif kearsipan yang menjadikan arsip sebagai bukti dapat diselenggarakan terkait dengan proses pengajuan gelar pahlawan nasional. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional berperan dalam mendokumentasikan peristiwa

“Keharuman nama sebuah bangsa merupakan salah satu hal yang dipersembahkan seorang pahlawan kepada bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya”

sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan sebagaimana terekam dalam arsip pahlawan. Terkait dengan khasanah arsip pahlawan yang disimpan di ANRI, menurut Kepala ANRI yang dilantik pada bulan Desember tahun 2013, “Arsip-arsip yang terkait dengan kepahlawanan masih bersifat menyebar dan masih berasal dari perspektif penjajah. Belum ada khazanah yang secara spesifik yang memberikan gambaran tentang pahlawan secara individu. Oleh karena itu untuk meniyasati kekurangan tersebut dilakukan wawancara sejarah lisan yang bekerja sama dengan sejarawan dari beberapa perguruan tinggi, contoh: wawancara dengan Bung Hatta, LN Palar, Leimena, dan Abdul Halim. Dengan adanya program sejarah lisan diharapkan dapat melengkapi beberapa khazanah terkait kepahlawanan secara individu yang belum terekam di dalam arsip. Terkait dengan akuisisi arsip pahlawan, Mustari Irawan mengatakan bahwa “untuk kedepannya dapat dilakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial mengingat dalam proses pengajuan

pahlawan, arsip berperan sebagai bukti dalam pengajuan seseorang untuk menjadi pahlawan. Selain Kemensos, tentu ada beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam konteks pahlawan masa kini oleh karena itu ANRI dinilai perlu untuk mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi tersebut, salah satu contohnya adalah perguruan tinggi. Dengan adanya UU No. 43 Tahun 2009 dan PP No. 28 Tahun 2009 dinilai sudah mampu untuk mengakomodir dalam proses penyelamatan arsip-arsip pahlawan. Sekarang yang diperlukan adalah aksi kongkrit. Terlebih lagi pihak ANRI sedang menyusun inpres terkait akuisisi atau penyelamatan arsip-arsip yang tidak hanya berorientasi di akhir kegiatan pemerintahan akan tetapi juga di awal kegiatan pemerintahan”.

Keharuman nama sebuah bangsa merupakan salah satu hal yang dipersembahkan seorang pahlawan kepada bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Pahlawanku Idolaku. (Santi)

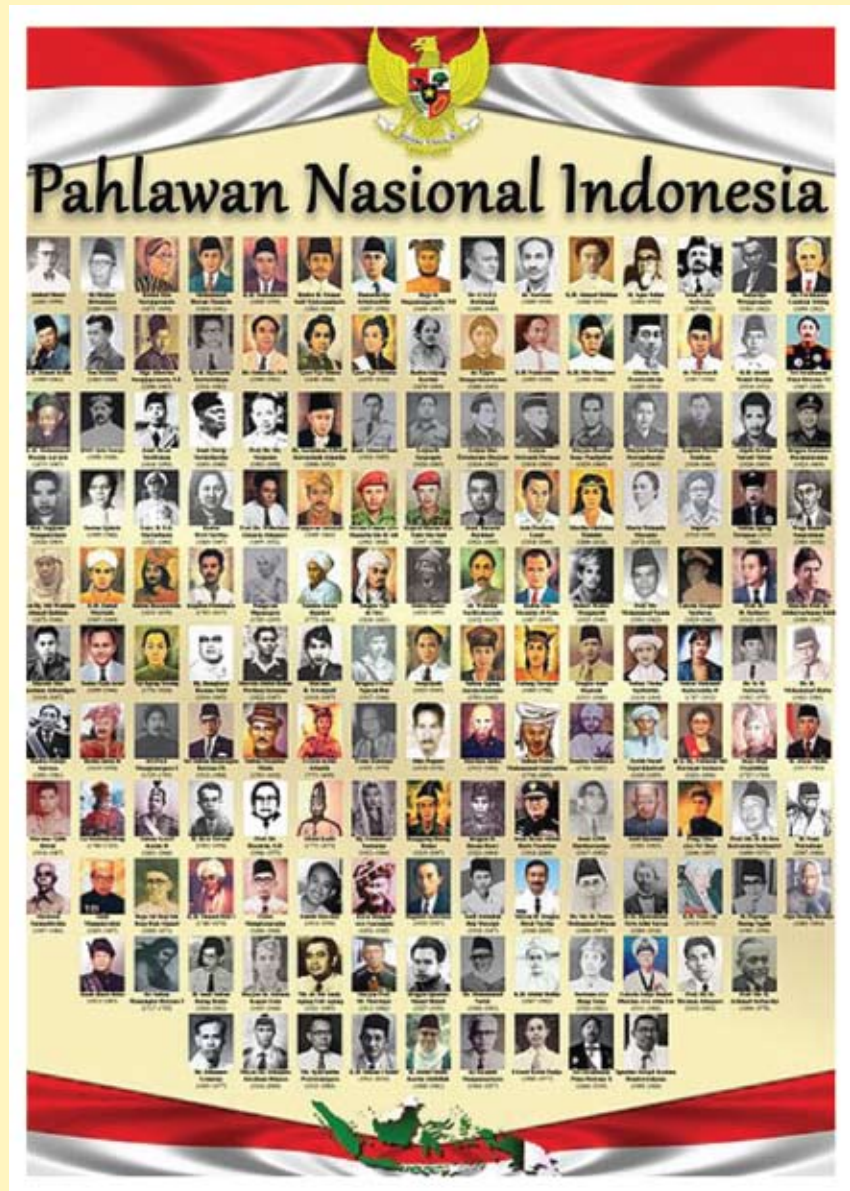
Karseno :

PERAN ARSIP DALAM PENGUSULAN KEPAHLAWANAN NASIONAL

Arsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Arsip sebagai sumber informasi merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa keberadaannya memegang peranan utama sebagai bukti memori kolektif dan jati diri bangsa. Peran arsip dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang tetap menjadi catatan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa lalu, peran arsip banyak ditekankan sebagai alat bukti yang sah dan sebagai tulang punggung dan identitas organisasi. Untuk masa sekarang, arsip banyak dijadikan sebagai bahan penelitian disamping sebagai bukti akuntabilitas kinerja apartur atau organisasi. Sedangkan untuk masa depan, arsip diharapkan bisa menjadi sumber segala ilmu pengetahuan (*knowledge management*).

Kedudukan arsip di Indonesia sebenarnya sangat istimewa terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang beberapa pasalnya mewajibkan setiap Lembaga Negara untuk mengelola arsip secara baik dan benar. Begitu juga untuk lembaga kearsipan di Indonesia telah diberi kewenangan penuh untuk mengelola arsip mulai dari arsip dinamis sampai arsip statis. Namun demikian, kesadaran beberapa elemen negara belum diikuti oleh kesadaran



Sumber: www.kemensos.go.id

pengelolaan arsip yang baik. Masih banyaknya dokumen vital negara yang hilang dan beberapa lembaga negara belum memiliki *records*

centre, hal ini menunjukkan bahwa negeri ini perlu untuk menyadarkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap dunia kearsipan yang tidak hanya dipandang sekedar barang

sampingan tetapi lebih daripada itu sebagai warisan peradaban bangsa yang tidak ternilai harganya.

Peran arsip sebagai bukti sejarah telah banyak menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia dalam menampilkan kebesaran sejarah masa lalunya. Keberadaan kerajaan-kerajaan besar nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit maupun Mataram, dan keanekaragaman budaya tidak lepas dari catatan-catatan sejarah atau arsip yang ada. Begitu juga munculnya tokoh-tokoh besar dan para pahlawan di Indonesia tidak luput dari peran arsip sebagai sumber otentik yang telah diwariskan oleh generasi pendahulunya.

Peran Arsip dalam Pengusulan Kepahlawanan Nasional

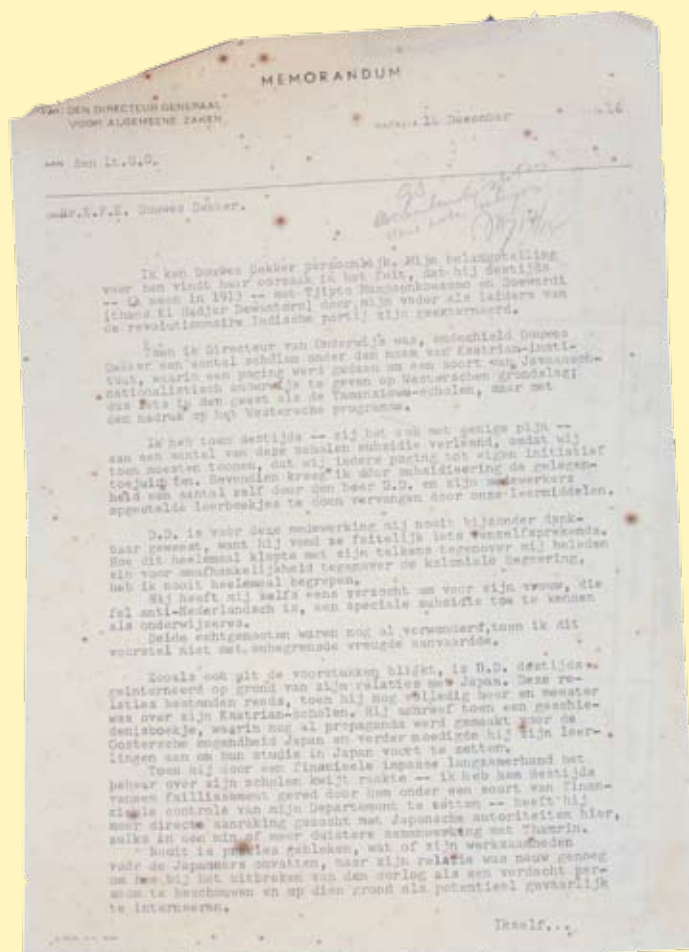
Setiap tahun bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Juga setiap tahun jumlah pahlawan nasional Indonesia terus bertambah. Pahlawan bagi bangsa Indonesia mempunyai arti tersendiri selain menjadi ikon sifat keteladanan juga merupakan prestise bagi daerah dimana pahlawan itu berasal. Namun seperti menurut sejarawan Thomas Carlyle Indonesia belum sampai pada taraf "hero worships" atau pemuja terhadap para pahlawan.

Figur pahlawan nasional Indonesia sampai masa kini masih bertumpu pada sosok pejuang yang anti kolonialisme dan imperialisme dan belum menyentuh peran seorang tokoh untuk bidang lain seperti pejuang masalah lingkungan, kemanusiaan, IPTEK, atau bidang lain di luar masalah tersebut. Dalam buku "Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional" terbitan Kementerian Sosial Republik

Indonesia yang disebut Pahlawan atau Para Pahlawan adalah figur yang mewariskan serangkaian nilai-nilai luhur yang disebut nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial yang bercirikan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta bangsa dan tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ulet, tangguh dan pantang menyerah, serta percaya pada kemampuan sendiri, patut kita lestarikan, hayati, teladani dan amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kriteria kepahlawanan tersebut merupakan prasyarat yang harus dipenuhi bagi setiap komponen

masyarakat Indonesia yang akan mengajukan atau mengusulkan tokoh yang dianggap memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya ketentuan mengenai lolos tidaknya pengusulan pahlawan itu terletak di tangan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Unsur utama yang sangat menentukan bagi tim untuk menjadikan seseorang menjadi pahlawan nasional harus didukung oleh sejumlah bukti yang kuat, yaitu adanya catatan tertulis atau arsip. Selain itu juga, saksi hidup yang menguatkan akan kepahlawanan dari

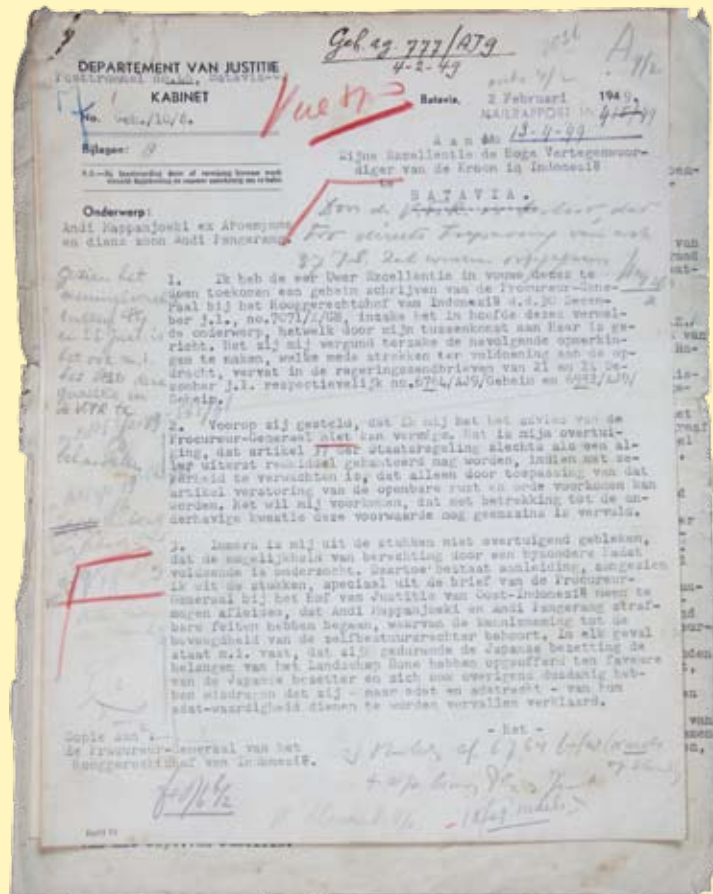


Contoh penelusuran arsip untuk kepahlawanan Douwes Dekker dalam khazanah arsip *algemene secretarie*

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

seorang tokoh yang akan diusulkan. Kita ambil contoh dalam pengusulan M. Toha oleh masyarakat Jawa Barat yang dimotori sejarawan Universitas Padjadjaran, Nina Herlina Lubis, yang selalu kandas di tim pengkaji pusat. Alasan tim pengkaji pusat selain sejarah M. Toha yang masih sumir, minim data pendukung, dan juga menganggap kepahlawanannya banyak terjadi di daerah lain. Seperti kita ketahui M. Toha banyak disebut dalam buku sejarah Indonesia karena keberaniannya meledakkan diri dalam gudang mesiu musuh pada masa revolusi fisik. Namun, sekali lagi fakta sejarah akan berpihak pada arsip yang merekam semua catatan melalui media apapun akan menjadi penentu dalam pengusulan kepahlawanan nasional.

Pengusulan tokoh menjadi pahlawan nasional oleh masyarakat yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara seperti ciri-ciri yang dikemukakan di atas akan sulit berhasil jika tidak ada bukti-bukti tertulis secara akurat dan data-data lain yang mendukungnya. Sebagai contoh gambaran dari pengalaman penulis waktu menjadi tim Pengusul Tokoh Kepahlawanan Nasional dari Sulawesi Selatan dengan diketuai oleh Alm. Bapak Sauki Hadiwardoyo pada sekitar tahun 2005 telah berhasil mengusulkan tokoh Pajongga Daeng Ngalle dari Sulawesi Selatan dalam deretan pahlawan nasional. Proses sebelumnya bahwa pengajuan tokoh itu telah terlebih dahulu diusulkan oleh tim yang dipimpin Anhar Gonggong (sejarawan UI) namun telah ditolak oleh tim pengkaji dari Departemen Sosial RI karena tidak adanya bukti catatan-catatan otentik yang mendukungnya sebagai persyaratan



Contoh penelusuran arsip untuk kepahlawanan Andi Mappanjoeki dalam khazanah arsip *algemene secretarie*

pencalonan tokoh tersebut. Dengan berbekal keyakinan akan diperolehnya sumber-sumber otentik dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder yang ada pada khazanah arsip maka diperoleh data-data yang cukup untuk menguatkan pencalonan tokoh tersebut. Akhirnya lewat lebih kurang dua bulan untuk penelitian tersebut, kepahlawanan Pajongga Daeng Ngalle dari Sulawesi Selatan, lewat pengajuan dari Kabupaten Takalar, berhasil diangkat menjadi Pahlawan Nasional lewat SK Presiden RI No.085/TK/Tahun 2006.

Isu pada saat ini yang banyak disorot dalam pengusulan kepahlawanan nasional ialah tokoh-tokoh yang berjuang di luar jalur militer atau perjuangan fisik yang dianggap

andil dan berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Seperti tokoh Munir Said Thalib pejuang untuk kemanusiaan dan HAM atau Marsinah tokoh pejuang buruh menentang penindasan kaum kapitalisme. Apakah tokoh di atas ada catatan-catatan sejarah dalam perjuangannya atau apakah layak untuk diusulkan menjadi pahlawan? Adalah sebuah keniscayaan karena kebiasaan kebanyakan Orang Indonesia selalu mengabaikan jejak rekaman dari kegiatan yang ditinggalkannya baik itu tokoh yang pernah duduk di pemerintahan maupun tokoh masyarakat.

Sisi lain banyak pengusulan kepahlawanan nasional dari tokoh-tokoh kontroversi yang banyak

diperbincangkan di masyarakat, seperti Presiden Suharto dan Sarwo Edie. Dari kedua tokoh itu jelas dari segi rekaman sejarahnya sangat melimpah. Namun yang menjadi ganjalan keduanya terletak kepada sisi peran yang dinilai masyarakat negatif. Untuk tokoh presiden Suharto banyak dikaitkan dengan masalah HAM pada masa pemerintahannya, begitu juga Sarwo Edie yang usulan kepahlawanannya ditolak oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap Letjen Sarwo Edie bertanggung jawab terhadap pembantaian pasca peristiwa G30S/1965.

Faktor-faktor di atas contoh bahwa tidak mudah dalam pengusulan kepahlawanan nasional untuk masa sekarang karena biarpun tokoh tersebut banyak sisi positifnya, namun jika masyarakat memandang negatif akan kandas dalam pengusulannya. Namun seperti sebuah ungkapan "*no document no history*", untuk itu baik sekarang maupun yang akan datang bagi tokoh-tokoh yang potensi diusulkan sebagai pahlawan harus mulai peduli untuk menyelamatkan jejak-jejak atau catatan atas karya-karya mereka, dan biarlah fakta sejarah yang nilainya.

Identifikasi Tokoh Kepahlawanan Nasional

Tidak ada negara di seluruh dunia yang mempunyai nama pahlawan sebanyak yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun sejumlah nama untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional selalu meningkat. Menurut data tahun 2013 ada 24 nama yang diusulkan dari sejumlah daerah, namun hanya tiga yang diloloskan. Penyebab tidak lolosnya sebagian besar tokoh yang diusulkan karena minimnya bukti

tertulis yang otentik menyangkut peranan tokoh yang diusulkannya. Tokoh atau peristiwa penting masa lalu akan sia-sia jika tidak ada bukti rekaman atau tulisan dan akan menjadi sebuah dongeng atau legenda yang eksistensinya tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah.

Kemunculan tokoh kepahlawanan nasional Indonesia baru dimulai dengan diawali dengan pengangkatan Abdoel Moeis, Ki Hadjar Dewantoro dan RM Soerjopranoto sebagai pahlawan Nasional tahun 1959. Selanjutnya baru tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Alimin, RA Kartini dan Budi Utomo diangkat menjadi pahlawan. Tokoh-tokoh tersebut dijadikan pahlawan nasional, tidak melalui proses persyaratan yang ketat seperti sekarang dan langsung diajukan oleh presiden dengan pertimbangan para menteri. Seiring perkembangan zaman usulan tokoh kepahlawanan nasional bukan sekedar melalui seleksi seperti di atas namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap daerah/propinsi untuk mengajukan tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan.

Pahlawan Nasional Indonesia selama ini identik dengan perlawanan senjata untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Nama-nama pahlawan di Indonesia sampai saat ini sudah berjumlah 159 tokoh yang terdiri dari 147 laki-laki dan 12 orang wanita. Dari sejumlah 159 tokoh itu yang terbanyak berlatar belakang pejuang atau militer dan selebihnya merupakan tokoh pergerakan nasional. Pahlawan seperti RA Kartini, W.R. Supratman adalah contoh dari beberapa yang tidak berlatar belakang peristiwa militer, kepahlawanannya lebih karena peran yang sangat luar biasa bagi bangsa dan Negara Indonesia dan

namanya tercatat dalam lembaran sejarah Indonesia.

Penokohan kepahlawanan nasional juga tidak luput dari unsur politis pada masa itu. Seperti tokoh Tan Malaka dan Alimin, pada masa Orde Baru nama tersebut ditenggelamkan dalam daftar pahlawan nasional karena aliran dan pandangannya dianggap identik dengan sosialis dan komunis yang pada waktu itu menjadi musuh Negara.

Bagi para tokoh yang pada zamannya sudah terkenal dimasyarakat secara luas dan catatan sejarahnya ada dimana-mana, seperti Soekarno, Hatta, Sudirman, Sam Ratulangi akan lebih mudah untuk mengusulkannya, namun untuk tokoh-tokoh yang sama sekali tidak familiar di masyarakat akan sulit dalam pengusulannya dan dituntut untuk melengkapi data yang valid dalam pengajuannya. Dengan demikian, begitu pentingnya bukti tertulis yang harus ditelusuri lewat sumber-sumber primer yaitu arsip.

Penelusuran Tokoh Kepahlawanan Nasional Lewat Sumber Arsip

Dalam penulisan sejarah dikenal adanya sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber asli, tercipta apa adanya, tanpa interpretasi dan tidak direkayasa. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber pendukung, sumber olahan yang sudah ada muatan interpretasinya. Sumber primer salah satunya yang terbesar adalah khazanah arsip yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang tercipta karena proses dari hasil suatu kegiatan. Akan tetapi, tidak semua khazanah arsip di ANRI merupakan sumber primer, seperti berita harian Antara,

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

Pedoman, dan Staatblad. Keberadaan sumber sekunder tersebut tidak kalah pentingnya juga sebagai sumber informasi yang akurat.

ANRI sebagai lembaga pengelola informasi arsip secara tidak langsung telah berperan serta untuk menjembatani usaha menyediakan atau menampilkan peran serta tokoh-tokoh pahlawan nasional itu lewat berbagai khazanah arsip yang merekam dan mencatat peristiwa-peristiwa penting secara nasional. Sebagai contoh dalam catatan atau foto arsip bagaimana seorang tokoh jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan sakit masih memimpin perang gerilya melawan penjajah bangsa asing. Kita juga bisa melihat foto arsip tokoh proklamator Soekarno dan Hatta ketika sama-sama mengantri dengan masyarakat untuk pencoblosan dalam pemilu tahun 1955. Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar tidak akan mengenal siapa itu tokoh pahlawan nasional Pajongga Daeng Ngale jika peran tokoh itu tidak digali lewat sumber-sumber arsip yang menyebutkan peran tokoh tersebut terhadap bangsa Indonesia.

Usaha untuk mencari sumber arsip terhadap tokoh tertentu yang berpotensi bisa diangkat sebagai pahlawan nasional terutama untuk tokoh dalam peristiwa masa lalu bisa dilihat dari beberapa khazanah berdasarkan periodenya. Khusus untuk arsip zaman kolonial *entry point* untuk menelusuri arsipnya antara lain melalui *Klapper* (bibliografi), Indeks folio, *Staatblad van Nederlandsche Indie* (Lembaran Negara), *Ensiklopaedia van Nederlandsche Indie*, *memorie van Overgave*, *Colonial Verslag dan Indisch Verslag* (laporan Tahunan

pemerintah kolonial), *Gouvernements papieren atau Algemeene Secretarie Archieven*, *Engelsche Tusschen bestuur* dan *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsche Indie* (Kitab undang-undang hukum pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda). Selain itu, kita juga bisa menelusuri arsipnya lewat khasanah arsip sesuai daerahnya, misalnya Arsip Batavia, Arsip Karawang, Arsip Kedu dll. Menyangkut isi inventaris arsipnya bisa ditelusuri per subyeknya seperti *rapporten*, *dag register*, *politiek verslag*, *kutuur verslag*, *gewestelijke stukken* atau *locale Archieven*.

Untuk masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan bisa dilihat khasanah arsip antara lain: *Tempelaars (algemene secretarie)*, *Algemeene Rijkarchief (ARA)*, *Jogja Documenten*, NEFIS, Kabinet Presiden, Sekretariat Negara RI, arsip Boven Digul dan data-data *verbaal* lainnya. Namun demikian, tidak kalah penting juga untuk mengetahui kata tangkap sebagai kunci keabsahan peran tokoh tersebut, seperti zaman Kolonial Belanda dan masa revolusi, tokoh yang dianggap pahlawan oleh bangsa Indonesia pada masa pemerintah kolonial dianggap sebagai ekstremis atau pemberontak, *rebellion against the Dutch*, *opposed the Dutch Colonial rule*, yang dalam konotasi politisnya adalah menentang pemerintah kolonialisme. Tokoh-tokoh tersebut bukan kriminal dan pada umumnya berseberangan atau menentang penjajahan (kolonialisme), ketidakadilan, penindasan dan pejuang kemerdekaan. Kategori diatas rata-rata banyak yang berhasil diusulkan sebagai pahlawan.

Arsip Pahlawan dan Keteladanan

Peran penokohan pahlawan

nasional terhadap generasi muda sangatlah penting, karena menuntut *mindset* generasi masa kini untuk tidak melupakan masa lalu. Banyak generasi muda Indonesia sekarang ini yang melupakan sejarah bangsanya. Terutama pada tokoh-tokoh pahlawan perjuangan bangsa. Jangankan untuk mengenal peranan tokoh satu persatu pahlawan bangsa, untuk menyebutkan siapa dibalik foto yang terpajang di dinding sekolah banyak yang tidak mengenal.

Dengan banyaknya tokoh-tokoh pahlawan nasional yang kita munculkan setiap tahunnya tidak akan berarti jika kita tidak mengetahui atau mengenal siapa dan bagaimana peran tokoh tersebut terhadap bangsa Indonesia. Semua itu kembalikan pada bagaimana bangsa ini bisa membentuk karakter bangsa, menumbuhkan cinta tanah air pada generasi muda melalui pengalaman sejarah para pahlawan nasionalnya.

Terdapat banyak tokoh atau peran masyarakat yang bisa diladikan tokoh teladan jika kita peduli terhadap sumber-sumber arsip yang tersedia. Namun demikian, apakah kita sudah merekam atau menyelamatkan catatan-catatan sejarah untuk semua peristiwa tersebut? Semua akhirnya kembali pada pribadi kita masing-masing sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia apakah mau belajar pengalaman sejarah lewat tokoh yang kita anggap sebagai pahlawan atau kita kesampingkan karena menganggapnya sebagai masa lalu yang tidak berarti. Kembali lagi seperti kata petuah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan peran pahlawan negerinya.

Ina Mirawati :

SEPENGGAL CATATAN TENTANG KEPAHLAWANAN DALAM ARSIP

Ada sebuah lagu berjudul *Hero* yang dilantunkan oleh seorang penyanyi wanita asal New York bernama Mariah Carey. Lirik lagu tersebut sangat sederhana, menceritakan tentang seorang pemberani (*hero*) yang tidak perlu takut siapa dirinya, yang mempunyai kekuatan untuk dapat bertahan karena mempunyai keberanian di dalam dirinya untuk hari esok dan akan datang, walaupun harus sendiri. Apa yang ditulis dalam lagu tersebut mungkin tidak seperti arti pahlawan yang kita maksud, namun kata pahlawan bisa diartikan dalam berbagai makna. *Hero* adalah kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pahlawan, dan di definisikan oleh W.J.S. Poerwadarminta (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2006: 695) sebagai seseorang atau pejuang yang gagah berani.

Kriteria seseorang untuk ditetapkan sebagai pahlawan seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden tahun 1959-2009 adalah orang yang telah berjasa atau berkorban karena membela negaranya melawan penjajahan Belanda dan di masa revolusi. Contohnya, di daerah Aceh terkenal pahlawan Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien, di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Sulawesi ada Hasanuddin, atau di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Namun demikian kata pahlawan tidak hanya bisa ditujukan untuk orang-orang yang telah berjuang melawan penjajahan saja. Akan tetapi, seseorang bisa juga disebut sebagai Pahlawan Pembangunan jika orang tersebut telah dianggap berjasa di bidang pembangunan, atau



ANRI, Foto Kempen RI Bali No. 581111 MM 9 (SKR 294)
Soekarno memberi wejangan di depan pemuda dan pelajar
pada acara peringatan Hari Pahlawan di Denpasar

Pahlawan Devisa seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena telah mengirimkan gajinya yang diperoleh selama bekerja di luar negeri ke kampung halamannya. Seorang Pahlawan juga dimiliki oleh seorang anak yang mengidolakan tokoh kesayangannya, seperti Superman, Spiderman, atau Batman. Dalam tulisan ini yang harus digaris-bawahi adalah sepenggal catatan mengenai kepahlawanan bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip foto, arsip film dan arsip kaset.

Kepahlawanan dalam arsip foto, film dan kaset

Arsip merekam informasi yang terjadi pada zamannya. Walaupun terkadang subyektif tetapi keaktualannya bisa dipercaya. Subyektif yang dimaksud di sini adalah jika seorang pejabat Hindia Belanda (lihat arsip pada masa Hindia Belanda) menulis laporan, maka pejabat itu terkadang melihatnya dari sudut pandang kepentingan pemerintahannya. Akan tetapi, pejabat



ANRI, Foto KIT Batavia No. 341-8 Laskar Wanita Pribumi pada jaman Jepang yang ikut berjuang mengangkat senjata melawan Jepang

tersebut juga menulis keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan hal yang dituliskan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi tentang bagaimana cara memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, dalam arsip *Memori van Overgave* (MvO) yang dibuat oleh para pejabat pada masa kolonial Belanda, kita dapat mengetahui bagaimana susahny pemerintah Hindia Belanda ketika berhadapan dengan pejuang seperti di Aceh.

Sebuah buku dapat kita buat lagi tetapi arsip hanya sekali dibuatnya dan itulah yang menjadikan arsip itu unik karena tanpa pengganti. Oleh karena itu setiap pejabat yang membuat arsip dituntut untuk jujur dalam melaporkan setiap kejadian pada masa pemerintahannya.

Dalam arsip foto KIT Batavia ada sebuah foto yang mengabadikan para wanita Indonesia pada masa Jepang sedang melakukan latihan baris berbaris. Mereka memakai baju kebaya dan membentuk sebuah laskar yang disebut dengan laskar wanita pribumi. Tugas laskar wanita pribumi ini membantu para pejuang pria melawan Jepang. Walaupun para laskar wanita ini mungkin hanya sekedar membantu di bidang konsumsi



ANRI, Foto Kempen RI Bali No. 5820
Poster memperingati Hari Pahlawan 10
November
di Bali

(memasak, menyediakan makanan) dan di bidang kesehatan (merawat orang sakit), mereka patut disebut juga sebagai Pahlawan karena ada nilai-nilai kepahlawanan yang tergambar di sini. Poster yang ada dalam arsip foto Kementerian Penerangan daerah Bali pada tahun 1958 juga menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan walaupun posternya bertemakan Pahlawan Pembangunan.

Setiap tanggal 10 November

diadakan perayaan atau pawai yang melintasi jalan-jalan besar di Surabaya, terutama melalui Hotel Oranje atau Hotel Yamato. Hal itu disebabkan ditempat inilah bendera Belanda diturunkan oleh para pemuda Surabaya dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Peristiwa itu berawal adanya pertempuran pada tanggal 10 November 1945 antara para pemuda Surabaya dengan tentara Belanda. Para pemuda Surabaya yang terkenal dengan sebutan "arek-arek Surabaya" itu merasa tersinggung, karena tentara Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Oranje (Yamato) tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Mereka kemudian melawan Belanda hingga titik darah penghabisan dan wafat sebagai pahlawan dalam mempertahankan kehormatan bangsanya. Untuk memperingati kejadian tersebut, maka setiap tanggal 10 November setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Penurunan bendera ini terdapat antara lain dalam arsip foto Kementerian Penerangan RI Jakarta, dan arsip foto Kementerian Penerangan RI Jawa Timur.

Pertempuran Surabaya juga disimpan dalam bentuk Film dan Video yang kemudian dipindahkan ke dalam bentuk digital DVD. Proses pemindahan arsip film dan video tersebut agar arsip film yang rentan dengan kerusakan dapat terselamatkan informasinya. Terkadang film menjadi rusak sebelum kita mengetahui apa isi informasinya, padahal informasi dalam film tersebut sangat besar kemungkinannya mempunyai nilai sejarah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lamanya durasi dalam film dan video yang menggambarkan kepahlawanan dalam Pertempuran Surabaya pun beragam, seperti video yang diserahkan oleh Des Alwi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempunyai durasi 17 menit (ANRI, Video Pertempuran Surabaya No. 118), DVD Pertempuran Surabaya berdurasi 6 menit 58 detik (ANRI, DVD Pertempuran Surabaya No. 243), DVD Enam Jam Di Yogja berdurasi 9 menit



ANRI, Foto Kempen RI Jakarta No. 531204 FG 1-14
Penurunan bendera Belanda di Hotel Oranje Surabaya



ANRI, Foto Kempen RI Jawa Timur No.502805
Arak-arakan Hari Pahlawan di Surabaya

27 detik (ANRI, DVD No. 438), DVD Perlawanan Cut Nya Dien dan Teuku Umar di Aceh berdurasi 12 menit 54 detik (ANRI, DVD No. 687), dan masih banyak lagi film yang dimiliki oleh ANRI mengenai kepahlawanan.

Selain arsip foto, film, video, ANRI juga menyimpan arsip kaset di antaranya kaset lagu-lagu tentang kepahlawanan seperti Gugur Bunga yang menceritakan seorang pahlawan yang gugur di medan perang, mengandung filosofi bahwa walaupun gugur satu tetapi tumbuh seribu. Arsip kaset lagu pahlawan lainnya adalah Sepasang Mata Bola menceritakan seseorang yang membutuhkan perlindungan pahlawannya dari angkara murka.

Sepenggal catatan mengenai kepahlawanan bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip foto, arsip film, maupun arsip kaset lagu-lagu ini bertujuan membuka mata kita agar mengetahui bahwa ANRI mempunyai begitu banyak koleksi arsip foto, arsip film, dan arsip kaset yang belum terjamah dan belum terekspos bagi kepentingan pengguna arsip sebagai bahan penelitian. Arsip kaset juga menyimpan hasil wawancara dengan para tokoh, ketika mendengarkan wawancara tersebut maka kita akan



ANRI, Foto Kempen RI Bali No.6-22-1
Soekarno sedang menulis pesan untuk Pahlawan di Bali

mengetahui bagaimana kisah-kisah para tokoh sejarah di masa lalu yang sangat menarik. Di samping itu juga diharapkan dapat menggugah hati semua Kementerian, Ormas-Orpol, orang pribadi, untuk segera menyerahkan dan menyimpan arsipnya yang bernilai guna di ANRI. Arsip tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penelitian dalam menggali nilai-nilai sejarah kepahlawanan bangsa Indonesia,

yang tentunya sangat menarik untuk di ekspos dan diperlihatkan kepada masyarakat. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bangsa yang menghormati pahlawannya adalah bangsa yang besar. Kalimat ini seperti yang terlihat di foto di mana Presiden Soekarno sedang memberikan ceramahnya di hadapan para pemuda dan pelajar pada peringatan Hari Pahlawan di Bali tahun 1958.

R. Suryagung Sudibyo P

SYEKH YUSUF: PEJUANG DUA NEGERI ASIA AFRIKA

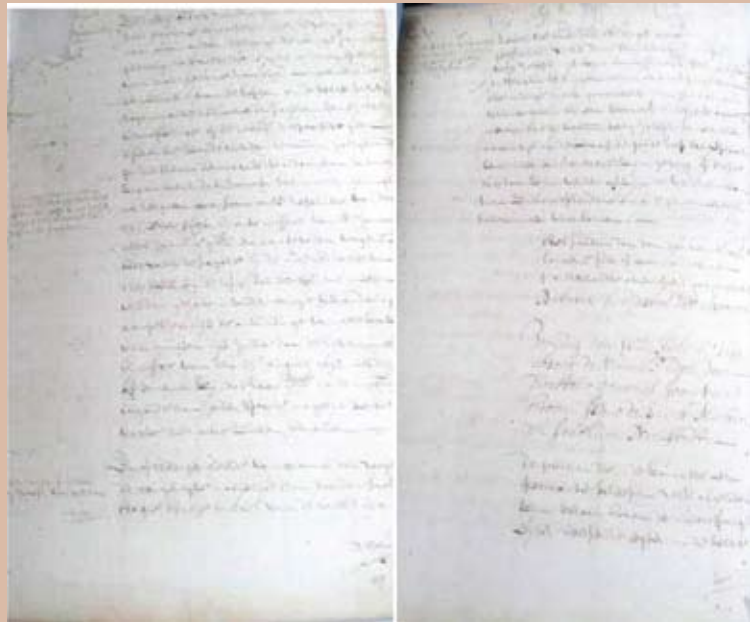
Saat ini sedang ramai dibicarakan tentang pengajuan Konferensi Asia Afrika untuk dijadikan *Memory of the World* (MoW) oleh UNESCO. Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu konferensi penting bagi negara-negara tertindas saat itu. Konferensi yang diadakan di Bandung pada tanggal 14-26 Agustus 1955 dan menghasilkan kesepakatan Dasasila Bandung/Bandung *Spirit* telah menginspirasi Bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merdeka, lepas dari penjajahan.

Namun, tiga abad sebelum itu telah ada seorang pejuang asal Indonesia yang berjuang untuk melepaskan bangsa di Asia maupun di Afrika untuk merdeka. Ia adalah Syekh Yusuf al-Taj Khalwati al-Makassari yang dikenal dengan nama 'Syekh Yusuf Makasar'.

SEKILAS SYEKH YUSUF

Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah putri Gallarang Moncong Loe. Saat lahir ia diberi nama Muhammad Yusuf oleh Sultan Alaudin Raja Gowa, yang juga kerabat ibunya. Sejak muda ia sudah haus ilmu, awalnya beliau berguru pada Daeng ri Tasamang hingga khatam al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan Sayyid Ba'Alwy bin Abdullah al-Allamah Thahir di Bontoala yang saat itu menjadi pusat pendidikan islam tahun 1634. Setelah itu, beliau kemudian belajar pada ulama Aceh yang datang ke Makassar, yaitu Syekh Jalaluddin al-Aidit.

Walaupun hidup di lingkungan istana, namun semangat untuk menuntut ilmu sangatlah tinggi. Beliau kemudian menuntut ilmu ke Timur Tengah. Namun, sebelum ke Makkah, beliau sempat singgah di Banten. Disini dia berkenalan dan bersahabat dengan Pangeran Surya anak dari Sultan Mufahir Mahmud



Hoge Regering 466 (h 167-168) Surat Keputusan Gubernur Jenderal dan Raad Van Indie tanggal 7 Juli 1693 tentang penetapan rencana pemindahan Syekh Yusuf dari tempat pengasingannya di SriLanka (Ceylon) ke Afrika Selatan (Kaap Gode Hoop) beserta pengikut dan keluarganya.

Abdul Kadir (1598-1650). Dari Banten, ia kemudian berangkat ke Aceh dan berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyyah. lalu melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah untuk berguru dengan ulama disana. Tercatat beberapa ulama pernah menjadi gurunya, yaitu daerah yang beliau datangi, antara lain Sayed Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi bin Syekh al-Kabir Mazjaji al-Yamani Zaidi al-Naqsyabandy di Yaman, untuk tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Maulana Sayed Ali al-Baalawiyah di kota Zubaid untuk tarekat Baalawiyah, Syekh Ibrahim Hasan bin Syihabuddin al-Kurdi al-Kaurani di Madinah untuk tarekat Syattariyyah, dan Syekh Abu al-

Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwati al-Qurasyi di Damaskus disini beliau diberi gelar Tajul Khalwati Hadiyatullah.

Selain tarekat-tarekat tersebut di atas, beliau juga mempelajari tarekat *Dasuqiyah*, *Syaziliyyah*, *Hasytiah*, *Rifaiyah*, *al-Idrusiyah*, *Ahmadiyah*, *Suhrawardiyah*, *Maulawiyah*, *Kubrawiyah*, *Madariyyah*, *Makhduniyyah*.

PERJUANGAN SYEKH YUSUF

Setelah pencaian ilmunya dianggap selesai, maka beliau memutuskan untuk kembali ke Makassar, pada usia 38 tahun. Namun beliau tidak menyangka, ternyata kerajaan

Gowa sudah hancur pasca kalah dari Belanda. Bahkan usaha menasehati pihak kesultanan pun tak berhasil. Syekh Yusuf akhirnya hijrah ke Banten yang memang sejak dari Mekkah Sultan Banten telah memintanya untuk datang kesana.

Di Banten

Di Banten ia diangkat sebagai mufti Kesultanan Banten oleh sahabatnya Pangeran Surya yang saat ini telah menjadi Sultan Banten dengan nama Sultan Abdul Fattah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia kemudian dinikahkan dengan Putri Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Siti Syarifah. Hal tersebut memudahkan Syekh Yusuf dalam berdakwah. Murid beliau banyak tersebar sampai pelosok-pelosok luar Banten. Beliau juga menjadi pengayom bagi masyarakat Makassar yang lari karena kecewa terhadap perjanjian Bongaya.

Pada awal tahun 1682 saat Sultan Haji datang, Banten pun bergejolak. Hal ini terjadi karena Sultan Haji adalah putra mahkota yang dipengaruhi Belanda. Belanda melakukan aksi *divide et impera* karena selama ini, serangan militer Belanda selalu digagalkan oleh Pangeran Purbaya .

Sultan Haji selalu mendapat bantuan Belanda dari Batavia. Hingga akhirnya pada Desember 1682 Keraton Tirtayasa tidak dapat terselamatkan dan ditinggalkan. Pasukan Tirtayasa menggunakan taktik perang gerilya. Namun, pada 14 Maret 1683 Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan diri ke keraton Surosowan dan ditangkap Belanda kemudian dibawa ke Batavia dan wafat disana.

Perang Gerilya pun dilanjutkan Syekh Yusuf, Pangeran Purbaya dan Pangeran Kidul yang memimpin 5000 pasukan termasuk 1000 laskar Makassar, Bugis dan Melayu. Syekh Yusuf bergerak ke arah timur sampai Padalarang lalu berbelok ke arah pesisir selatan, sampai daerah desa Karang, di sana beliau bertemu dan dibantu oleh Syekh Abdul Muhyi (Hadjee Karang) Pamijahan dan laskarnya. Setelah melakukan perang gerilya selama dua tahun lamanya akhirnya Syekh Yusuf ditangkap dengan kondisi seluruh pengikut-

pengikutnya dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing kecuali 49 orang yang harus turut serta, yaitu 2 orang istri, 2 abdi istri, 12 santri dan putra-putri, sahabat dan para abdi dalem.

Di Sri Lanka

Belanda kemudian membawa rombongan Syekh Yusuf ke Batavia. Namun, melihat besarnya kharisma Syekh Yusuf maka ada kekhawatiran dari pihak Belanda, dan ditambahkan kerajaan Bone dibawah pimpinan Aru Palaka (Raja Bone ke-15 yang ada hubungan kekerabatan) sedang melakukan perlawanan. Maka Belanda memutuskan untuk mengasingkan Syekh Yusuf beserta rombongan pada tanggal 12 September 1684 ke wilayah Sri Lanka.

Dalam waktu singkat nama beliau dikenal di sana. Selama disana beliau gunakan untuk beramal, mengajar dan menulis risalah, banyak murid-muridnya yang berasal dari Hindustan (India) dan Srilanka sendiri. Dan

membawa namanya termasyhur di India. Raja Hindustan Aurangzeb Alamgir (1659-1707) pernah menyurati wakil pemerintah Belanda di Srilanka, supaya kehormatan pribadi Tuan Syekh itu dipelihara, karena jika tuan itu diganggu akan menggelisahkan umat Islam Hindustan.

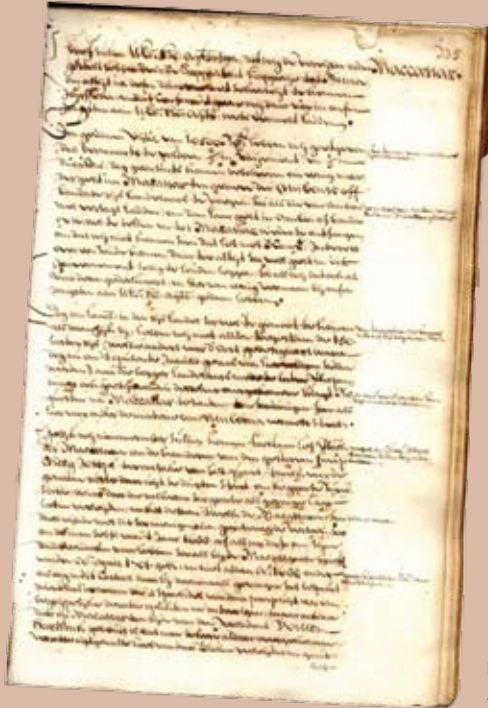
Strategi perjuangannya pun berubah dari perang fisik menjadisemangat keagamaan dan semangat perjuangan. Jemaah haji dari Indonesia sekembalinya dari Mekah biasanya singgah di *Ceylon* (Sri Lanka) untuk menunggu musim barat selama satu sampai tiga bulan. Dalam kesempatan inilah jemaah haji belajar kepada Syekh Yusuf. Selain itu juga disisipkan pesan-pesan Politik, agar tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan juga pesan-pesan agama supaya tetap bepegang teguh pada jalan Allah.

Di Afrika Selatan

Surat-surat kepada raja Banten dan Makassar ternyata tercium oleh



Rapat VOC yang membahas Kekacauan dalam negeri Kerajaan Banten. Terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Sepuh (Sultan Ageng Tirtayasa) dengan Pangeran Anom (Sultan Haji), 1 Maret 1682
ANRI : HR 895 hal 273



Pemohonan dari Rakyat Makassar agar diperkenankan mengirinkan kerangka Syekh Yusuf karena kepercayaan yang besar dari masyarakat Makassar terhadap kematiannya. 1701
ANRI : HR 3237 hal 335

pemerintah Belanda di Batavia. Risalah tersebut dianggap pemicu pemberontakan rakyat di Banten dan raja Gowa ke-19. Surat atau risalah yang menggunakan nama samaran tersebut, di Makassar dikenal dengan nama “*Kittakna Tuan LoEta* (kitab tuan LoE ku) atau Pasanna Tuanta (pesan tuanku)”, sedangkan di Banten disebut Ngelmu Aji Karang atau Tuan She. Akhirnya diputuskan Syekh Yusuf dan 49 rombongannya untuk dipindahkan dari Ceylon ke Kaap (Afrika Selatan). Pemindahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1693 dengan menaiki kapal “*Voetboeg*”. Syekh Yusuf dan rombongan sampai di pantai Afrika pada tanggal 2 April 1694, selama delapan bulan 23 hari perjalanan.

Namun demikian, semangat perjuangannya tidak pernah padam oleh ruang dan waktu beliau tetap mengobarkan semangat warga Afrika Selatan untuk merdeka dan membentuk komunitas muslim disana yang memang menjadi daerah

buangan politik. Tempat itu sekarang dikenal dengan *Macassar Faure*.

Syekh Yusuf meninggal pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 73 tahun setelah 5 tahun di Afrika Selatan dimakamkan di daerah Faure dan pada tanggal 5 April 1705 kerangka dan keluarga Syekh Yusuf dipulangkan dan tiba di Makassar. Ia dimakamkan di Lakiung pada hari Selasa tanggal 6 April 1705 / 12 Zulhidjah 1116 H.

Negosiasi pemulangan jenazah Syekh Yusuf yang dilakukan oleh Raja Gowa, Sultan Abdul Jalil, berhasil enam tahun kemudian, tepatnya tahun 1705. Hal itu pun terdapat syarat yang harus dipenuhi: yang bisa kembali ke Nusantara adalah anak-anaknya yang berusia lima tahun ke bawah.

Dalam perjalanan pulang itulah, jenazah Syekh Yusuf sempat disinggahkan di beberapa tempat, seperti Sri Lanka, Banten, Sumenep (Madura), terakhir di Makassar. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengatakan bahwa makam Syekh

Yusuf ada dimana mana. Makam Syekh Yusuf, saat ini lebih dikenal dengan nama Ko'bang, berada di Jalan Syekh Yusuf, perbatasan Gowa dan Makassar.

GELAR PAHLAWAN

Setelah tiga abad Syekh Yusuf tiada, akhirnya beliau mendapat dua gelar pahlawan nasional dari dua Negara yaitu Indonesia pada 9 November 1996 dan dari pemerintah Afrika Selatan pada 23 September 2005. Daerah tempat tinggal Syekh Yusuf di Cape Town diberi nama sebagai kawasan ‘Macassar’ untuk menghormati tempat asalnya. Bahkan, Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai ‘Salah Seorang Putra Afrika Terbaik’. Bagi warga *Cape Town*, Syekh Yusuf dikenal sebagai sosok yang membangun komunitas Muslim di negara itu. Dia tidak hanya diakui sebagai ulama, namun juga pejuang bagi rakyat Afrika Selatan karena menentang penindasan dan perbedaan warna kulit (*apartheid*).

Hingga akhir hayatnya, menurut Nabilah Lubis dalam buku Syekh Yusuf al-Taj Khalwati al-Makassari menemukan sedikitnya 25 kitab karangannya yang di tulis pada era Banten dan *Ceylon*. Ia juga dikenal sebagai pendiri ajaran tarekat khalwatiyah. Kemudian,

“ memang sangat berterima kasih pada Syekh Yusuf karena ajaran Islam di sana yang tidak membedakan warna kulit. Di Afrika Selatan bahkan ia diberi gelar As-salam

Di tengah arus globalisasi yang melanda bangsa ini, semangat-semangat kearifan, keteladanan kepahlawanan dan karakter Syekh Yusuf yang haus ilmu, pantang menyerah dan berjuang hingga titik darah penghabisan sangat diperlukan terutama bagi generasi muda mendatang. Semoga kita yang ditinggalkan dapat mewarisi karakter beliau sebagai pejuang tanpa pamrih. (agg)

Ghesa Ririan Mitalia :

LAYAR PERAK DAN NASIONALISME MASYARAKAT SURABAYA

Film merupakan salah satu bentuk hiburan yang dikenal dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakatnya. Menurut Jowett dan Linton (1980: 15) film merupakan media hiburan yang sederhana dan murah. Hiburan film sendiri mulai dikenal di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20, ditandai dengan pertunjukan berupa gambar ideop. Pada awalnya, pemutaran film belum memiliki tempat yang tetap bahkan pertunjukan yang sederhanadilakukan di tempat terbuka. Pemutaran film di tempat terbuka (*openlucht*) disebut juga “misbar”, singkatan dari gerimis bubar (Tjasmadi, 1992: 11).

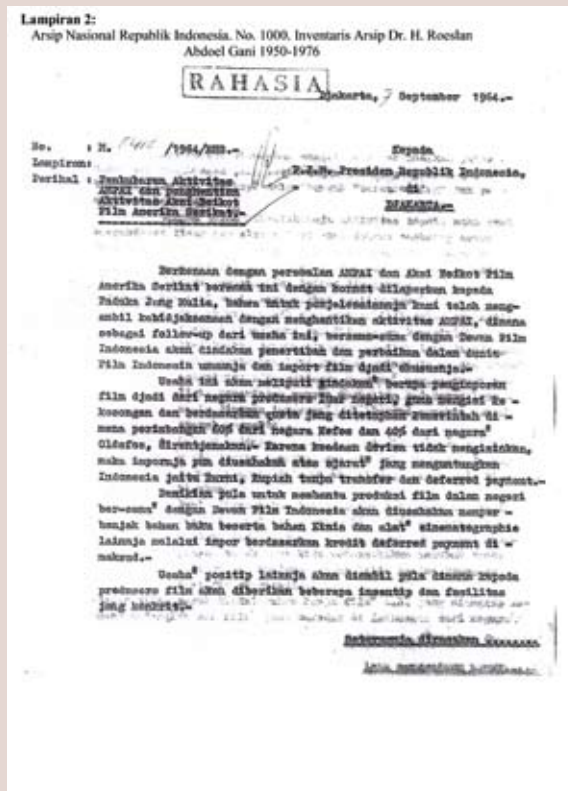
Perkembangan Regulasi Perfilman

Film perlahan-lahan menggeser Komedi *Stamboel* dan *Toneel*, menjadi hiburan yang populer di kalangan masyarakat pada masa itu. Seiring dengan kepopuleran hiburan film, pengaruh film terhadap gaya hidup masyarakat mulai terlihat. Pemerintah Hindia-Belanda khawatir adanya perubahan perilaku masyarakat pribumi akibat pengaruh film terlebih lagi terhadap perubahan pandangan masyarakat pribumi terhadap kewibawaan bangsa kulit putih. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur film serta bioskop dalam Ordonansi *Bioscoop* pada tahun 1916. Hak pemeriksaan film oleh komisi regional yang ditunjuk gubernur jendral serta denda atas pelanggaran peraturan tersebut dijelaskan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 276, Tahun 1916. Pemerintah

Hindia-Belanda terus melakukan penambahan regulasi yang mengatur tentang hiburan film sebagaimana yang terlihat dalam *Staatsblad* tahun 1919 no. 377 mengenai *Bioscoopordonantie*, *Staatsblad* tahun 1919 no. 742 mengenai peraturan untuk mengurangi resiko pengaruh yang merugikan dari kunjungan bioskop oleh anak-anak dan *Staatsblad* tahun 1922 No. 688 mengenai penarikan biaya atas pemeriksaan film. Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 477/ 1925,

pada 1 Januari 1926 diberlakukan *Filmordonnantie* 1925 mengenai komisi film. Regulasi tersebut diperkuat dengan diberlakukannya *Staatsblad* No. 507/ 1940 yang mengatur tentang sejumlah batasan secara lebih rinci dan menjelaskan definisi film, pertunjukan film bahkan dengan rinci menjelaskan mengenai upaya hukum hingga sanksi pidana serta mekanisme pemeriksaan film impor dan film dalam negeri.

Memasuki era pendudukan Jepang, hiburan film mengalami perubahan drastis. Pemerintah Jepang



Arsip mengenai pembubaran aktivitas AMPAI dan penghentian aktivitas aksi boikot film Amerika Serikat
Sumber: ANRI, No. 1000. Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdoel Gani 1950-1976

menyadari betul peran film sebagai suatu media propaganda yang ampuh. Pemerintah Hindia-Belanda sendiri juga melakukan hegemoni melalui film terhadap masyarakat pribumi, hanya saja proses tersebut dilakukan secara halus berbeda dengan pemerintah Jepang yang melakukan propaganda secara paksa dan terang-terangan sehingga membuat masyarakat pribumi jenuh dengan film-film propaganda yang diputar selama masa pendudukan Jepang. Sikap anti Barat pemerintah Jepang dapat dilihat dalam kebijakan mereka mengubah nama-nama Bioskop yang menggunakan nama Barat dengan nama Jepang dan menghentikan impor film Barat.

Memasuki periode tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai perfilman, pada masa sebelumnya undang-undang yang ada merupakan warisan Pemerintah Hindia-Belanda. Berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 58 Daftar Pertelaan Arsip Peraturan Perundang-Undangan Dirinci Menurut Jenis Peraturan Pemerintah Periode 1950-1960, pada tahun 1951 terbit Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (*Filmverordening* 1940, s. 1940 No. 539). Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7/ 1954, yang dapat dilihat pada Arsip Nasional Republik Indonesia No. 204 Daftar Pertelaan Arsip Peraturan Perundang-Undangan Dirinci Menurut Jenis Peraturan Pemerintah Periode 1950 – 1960. Peraturan Pemerintah No. 7/ 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26/ 1951 (Lembaran Negara No. 38/ 1951) tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (*Filmverordening* 1940, s. 1940 No. 539). Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah masih belum fokus untuk pengembangan film nasional. Sehingga dapat dikatakan

bahwa peraturan yang ada belum menjamin bahwa Indonesia telah memiliki politik perfilman yang jelas.

Pasang Surut Layar Perak di Surabaya

Pada kurun waktu tahun 1950 – 1970 produksi film-film nasional banyak yang bertemakan perjuangan seperti Darah dan Doa, Enam Jam di Yogya, dan Lewat Djam Malam. Situasi nasional yang baru saja melalui revolusi fisik, perjuangan pengembalian Irian Barat, usaha-usaha menekan gerakan separatis di berbagai daerah menjadi salah satu faktor yang menjadikan film-film yang bertemakan perjuangan banyak diproduksi. Produksi film-film bertemakan perang didukung dengan keterlibatan beberapa instansi pemerintah dalam produksi suatu film nasional, seperti keterlibatan Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang terlibat dalam produksi film “Lembah Hijau”, Bank Negara terlibat dalam produksi film “Masa Badai dan Topan” dan “Maut

Mendjelang Sendja” serta Kodam XVI Hasanuddin dalam produksi film Terror di Sulawesi Selatan. Pada era tersebut ada satu kebiasaan dimana sebelum film utama diputar biasanya terlebih dahulu diputar film extra yaitu berupa film berita dari Perusahaan Film Negara (PFN). Film berita tersebut berisi rangkuman berita dari dalam dan luar negeri untuk diinformasikan kepada masyarakat. Kebiasaan ini meniru pola yang pernah diterapkan pada era Pendudukan Jepang.

Pada periode ini pula, hiburan film mengalami masa-masa yang sulit dengan adanya pemboikotan film-film Amerika oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) dengan puncaknya yaitu pembubaran *American Motion Picture Association of Indonesia* (AMPAI). Aksi yang dilakukan PAPFIAS di Surabaya bahkan berlangsung keras dengan pembakaran gedung AMPAI yang berada di jalan Sumatera. Aksi ini didukung pula oleh Komando



Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai larangan film yang dapat berpengaruh buruk bagi keamanan dalam negeri. Sumber: Kabinet Presiden RI No. 1833

Daerah Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat Jawa Timur yang menyelenggarakan ceramah di Surabaya pada 7 Agustus 1964 dalam rangka memperhebat pelaksanaan pemboikotan film-film imperialis AS.

Aksi ini didasari terutama pada persoalan politis seperti upaya pemerintah Amerika Serikat yang bermaksud untuk memperluas wilayah operasi bagi armada ketujuh ke Samudera Indonesia. Hal ini dipandang telah mengganggu kedaulatan Indonesia melalui proyek neokolonialisme Malaysia. Tindakan pemerintah Amerika Serikat tersebut dipandang untuk kepentingan Amerika Serikat dalam memperluas perangnya serta membantu Malaysia yang berarti turut campur dalam permasalahan yang tengah dialami Indonesia dan Malaysia. Bangsa Indonesia yang tengah gencar berada dalam semangat Dwikora beranggapan bahwa pemutaran film Amerika Serikat bertentangan dengan semangat pelaksanaan Dwikora. Alasan lain adalah karena merajalelanya film-film bandit atau seks yang diproduksi Amerika menerbitkan keprihatinan mendalam.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Putusan Nomor 40439/Kab mengenai batasan-batasan yang dianggap terlarang pada film-film, adegan, percakapan, tulisan ataupun inti moral dalam film yang bersifat menganjurkan perang, mendatangkan pengaruh buruk bagi kesusilaan dan nilai prajurit, melanggar *codex* perwira (azas kesatriaan), memperlihatkan usaha untuk merobohkan pemerintah sendiri dan memperlihatkan bahwa sesuatu tujuan atau maksud, baik maupun buruk, dapat dicapai dengan memakai kekerasan yang menggunakan senjata secara berlebih atau berulang, (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1833 Inventaris Kabinet/Presiden RI). Namun

berbeda dengan Menteri Perdagangan Adam Malik yang menyatakan bahwa tidak masuk akal bahwa hanya film-film AS yang dianggap merusak, sedangkan ada film-film yang beredar di Indonesia dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1000 Inventaris Arsip Dr. H. Roeslan Abdoel Gani 1950 – 1976). Hal tersebut didasarkan pada Politik Indonesia yang bebas-aktif dan hubungan diplomatis Indonesia-Amerika Serikat yang termasuk di dalamnya hubungan dagang impor film, menjadi bahan pertimbangan Menteri Perdagangan Adam Malik.

Aksi dan Reaksi Masyarakat Surabaya

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mendukung upaya boikot film-film Amerika dan menentang keras sikap pemerintah Amerika Serikat yang bermaksud untuk memperluas wilayah operasi bagi Armada ke-7 ke Samudera Indonesia. Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) cabang Surabaya mengadakan protes keras kepada pemerintah Inggris dan Amerika Serikat serta mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih modal-modal Inggris yang ada di Indonesia dan memboikot film-film Amerika Serikat sebagai jawaban atas sikap pemerintah Amerika Serikat (Trompet Masyarakat, 1954). Bentuk aksi juga datang dari Gerwani yang sewaktu Konferensi Gerwani pada 28 – 30 Agustus 1954 di Surabaya menghasilkan sembilan resolusi, salah satunya adalah Resolusi Mengenai Pemberantasan Film dan Buku-Buku Cabul dan Propaganda Perang (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 1093 Inventaris Kabinet Presiden RI). Resolusi tersebut disampaikan kepada Presiden karena dipandang perlu dengan adanya kemerosotan akhlak para pemuda. Upaya yang mendukung aksi boikot film impor juga datang dari para seniman ludruk. Delegasi kongres Ludruk Surabaya

menghadap gubernur Jatim dan Front Nasional tingkat I Jatim untuk menyampaikan agar menghentikan pemasukan dan pemutaran film-film India beserta lagu-lagunya sebagai bentuk protes terhadap sikap negara India yang telah membantu Malaysia (Trompet Masyarakat, 1965).

Pemerintah mengeluarkan berbagai instruksi terkait pelarangan tren-tren budaya Barat yang dipopulerkan melalui film-film, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri P dan K tentang potongan rambut, pakaian dan panggilan nama (Surabaya Post, 1964). Kotamadya Surabaya melalui Surat Keputusan No. 307/ K tahun 1967 melarang diselenggarakannya film untuk umum dalam bentuk dan sifat apapun di luar gedung bioskop (Perhimpunan Peraturan Daerah Kota Surabaya Koleksi Dinas Hukum Kota Surabaya). Hal ini sebagai jawaban atas protes dari masyarakat karena pemutaran film yang dimaksud tidak memperhatikan soal pembatasan umur yang telah digariskan dalam sebuah peraturan.

Hiburan film dan sisi nasionalisme masyarakat Surabaya adalah dekat, sedekat jantung dengan detaknya. Film-film bertema perjuangan banyak diproduksi mengikuti semangat nasional yang baru saja melalui revolusi fisik dan pengembalian Irian Barat. Begitu pula dengan film dari negara sosialis dan Asia-Afrika yang menampilkan sisi patriotik, mendapatkan tempat dalam masyarakat Surabaya. Masyarakat Surabaya menampilkan sisi nasionalismenya melalui penolakan dan aksi pemboikotan terhadap film-film Amerika serta memberikan dukungan terhadap kebijakan Anti Budaya Barat yang menyertainya. Aksi ini didasari atas sikap Amerika yang dipandang telah mengganggu kedaulatan RI dengan Neokolonialisme Malaysia ditengah semangat Dwikora yang tengah menggelora.

Raistiwar Pratama :

ABDUL WAHAB CHASBULLAH; PAHLAWAN NU, PAHLAWAN NKRI

There are considerable historiographical obstacles to writing an account of Wahab Chasbullah's life. He wrote little for publication and the surviving primary documentary evidence consists of only a few transcripts of speeches and debates, some reprinted letters, and an assortment of brief quotations in the press. In the scholarly literature on Indonesian Islam, he receives, somewhat undeservedly, only brief mention. As a result the material for this study is drawn largely from literature produced by NU writers, much of it hagiographic, and oral evidence obtained from interviews with those who knew him. Contradictory information abounds in both of these sources.

Greg Fealy dalam buku *Traditionalism and the Political Development of Nahdlatul Ulama*

Peringatan Haul Mbah Wahab—begitu sapaan akrab Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah—ke-43 begitu berbeda. Bukan hanya berbeda karena keseriusan Panitia mempersiapkan acara di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur pada 1–6 September 2014 lalu, tetapi rangkaian acara yang menyertainya. Selain penampilan hadrah dari Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia (Ishari), pameran dokumen dan foto juga berlangsung yang terwujud melalui kerjasama dengan Museum Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dan Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Menambah kemeriahan, pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum (STAIBU) yang kini bernama Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah (Unwaha) juga digelar. Pengajian umum yang dipimpin Kiai Haji Mustofa Bisri selaku penjabat Rais Aam PBNU yang menggantikan Kiai Haji Sahal Mahfuzh merupakan puncak acara (Aula, September 2014).

Menurut Endang Turmudhi dalam *Struggling for the Umma*;

Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang East Java, Pesantren Bahrul Ulum merupakan pondok pesantren (ponpes) keempat terbesar dan mutakhir di Jombang, yang juga merupakan ponpes tertua, sejak berdiri pada 1825 oleh Kiai Shoichah atau Kiai 'Abdussalam. Pada awalnya pesantren tersebut bernama Pesantren Nyelawe atau Telu. Mengapa Nyelawe atau Telu? Hal tersebut dikarenakan mulanya pesantren hanya memiliki 25 santri dan 3 bangunan. Sang pendiri merupakan keturunan Raja Majapahit, Brawijaya VI. Setelah Kiai Chasbullah Said—ayah Wahab Chasbullah—memimpin, nama ponpes pun berganti menjadi Tambak Beras karena Chasbullah sering menyimpan sejumlah besar beras di lumbung padinya. Hingga ketika Mbah Wahab memimpinnya sepanjang 1926–1971, pada tahun 1967 nama ponpes pun kembali berganti, menjadi Bahrul 'Ulum. Chasbullah Said merupakan anak keempat Kiai Said. Kiai Said dan Kiai Usman merupakan dua santri yang membantu pengelolaan ponpes ini pada mulanya.

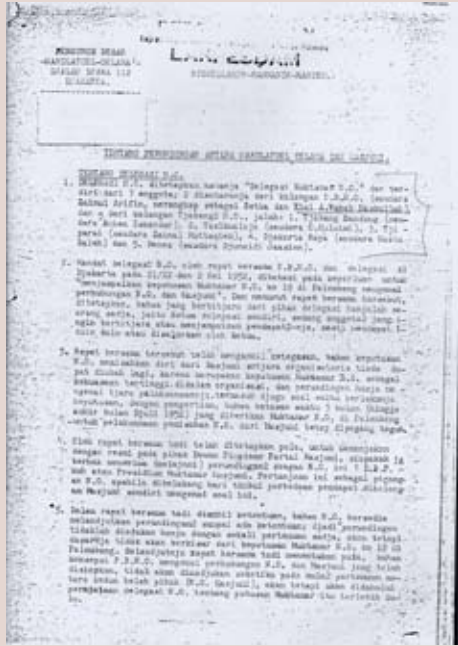
Mengapa Wahab Chasbullah?

Pada Kamis 24 April 2014, Universitas Nasional menggelar

Seminar Nasional "KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Politik, Keagamaan dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia: Usulan Bagi Pengangkatan Pahlawan Nasional". Ahmad Baso merupakan salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Baso dalam "Mengapa Kiai Wahab Chasbullah Layak Pahlawan Nasional?" menyatakan bahwa Resolusi Jihad dan Barisan Kiai merupakan elemen vital rakyat Surabaya melawan Sekutu dalam Pertempuran 10 November 1945. Begitu pula alasan yang Pemerintah kemukakan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 115/III/2014, yang ditetapkan pada 6 November 2014. Sehari kemudian Presiden Joko Widodo berkenan membacakan keputusan tersebut. Resmilah Wahab Chasbullah menyusul Hasyim Asy'ari yang lebih dulu resmi menjadi pahlawan pada 17 November 1964. Keduanya berperan besar mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H.

Gus Dul, Sang Santri Kelana

Menurut Greg Fealy dalam buku *Traditionalism and the Political Development of Nahdlatul Ulama*, Gus Dul—begitu sapaan Chasbullah kecil—pun belajar ilmu keagamaan pada banyak ponpes. Sejak usia tujuh tahun hingga 22, Gus Dul menjelajahi 7 ponpes di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kiai Cholil dari Kademangan Bangkalan Madura dan Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang merupakan dua guru Gus Dul. Kepada keduanya, Gus Dul menghabiskan empat sampai tiga tahun belajar. Di sanalah Gus Dul bertemu banyak kiai terkenal: Kiai Bisri Syansyuri, Kiai Abdul Karim dari Lirboyo Kediri, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon, dan Kiai As'ad Syamsyul Arifin dari Situbondo.



Perundingan antara Nahdlatuol Oelama dan Masjumi
Sumber: Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi, PBN 1952

Setiap kali berlangsung Kelas Musyawarah, Gus Dul berbeda dari teman sebaya dan kakak kelasnya, melakukan *istinbath* (penyimpulan) serta mempertimbangkan keadaan sosial tidak hanya pertimbangan hukum semata. Kitab kuning yang berikan pemahaman kelampauan perihal tauhid, *fiqh*, *ushul fiqh*, bahasa Arab, dan tajwid membekali Gus Dul melihat situasi kekinian atas peristiwa politik.

Pada tahun 1913 Gus Dul melengkapi risalah keilmuannya dengan me-laksanakan haji dan tentu saja memperdalam pemahaman khazanah keislaman, antara lain kepada Kiai Mahfuzh dari Termas, Kiai Baqir dari Yogyakarta, Kiai Muchtaram dari Banyumas, dan Syaikh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Tidak hanya belajar, Gus Dul juga berpolitik. Bersama ketiga temannya, Gus Dul ikut mendirikan Sarekat Islam afdeling Makkah.

Mempersiapkan dan Mempertahankan Republik

Mengutip apa yang dikatakan Greg Fealy, sepulangnya dari Mekkah pada akhir tahun 1914 atau awal tahun 1915, pada awal usia 30 tahun, Gus Dul justru sengaja tidak memilih pulang

ke Tambakberas, tetapi menetap di kota pelabuhan Surabaya. Surabaya pada waktu itu mirip seperti sekarang yang merupakan kota koloni terbesar kedua setelah Batavia. Di Surabaya pula, berpusat kegiatan politik Sarekat Islam, *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV), dan organisasi lainnya. Sekitar satu dasawarsa, Gus Dul bermukim di Surabaya.

Pada tahun 1916, Gus Dul menikahi anak perempuan Kiai Musa, lalu mengajar di madrasah milik ayah mertuanya di Kertopaten. Pada tahun yang sama, bersama seseorang yang kelak mendirikan Muhammadiyah—Kiai Haji Mas Mansur—Gus Dul mendirikan Nahdlatul Wathan, sebuah madrasah yang menggabungkan pendidikan modern dan tradisi. Bisi Syansuri, Abdul Halim Leimunding, dan Abdullah Ubaid membantu mereka berdua. Menggenapi perikahnya, Gus Dul mengasah kemandirian berekonominya melalui perdagangan. Beras dan tepung merupakan bahan dagangan pertamanya yang dia ambil dari perkebunan keluarganya di Tambakberas. Dua tahun kemudian, kembali beliau mendirikan organisasi. Beliau pun mendirikan Nahdlatut Tujar (NT)—sebuah organisasi saudagar atau pedagang, yang didirikan bersama

Hasyim Asy'ari. Meski singkat, NT merupakan bukti kemandirian organisatoris-ekonomis pihak tradisi. Bisnisnya juga menjangkau perjalanan haji. Setelah ayahnya mangkat, dia telah menjadi agen besar bagi Kongsi Tiga, sebuah perusahaan perjalanan laut. Akan tetapi, tuduhan korupsi menghinggapinya.

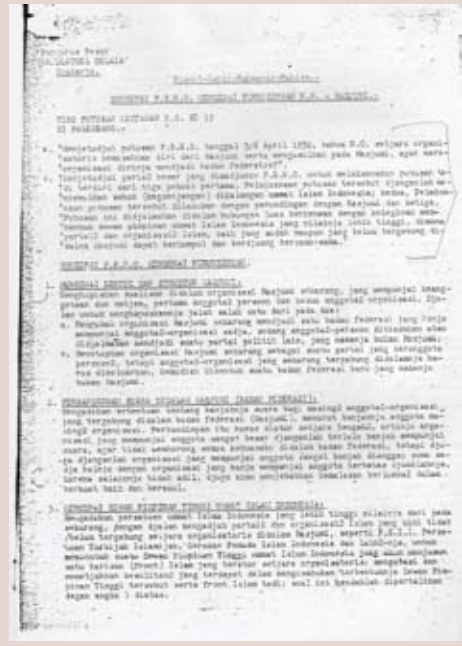
“Islam dan politik tak terpisahkan sebagaimana gula dan manis,” begitu ucapnya. Dia aktif hingga tahun 1920 dan merupakan kader terbaik Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dia pun mengenal Agus Salim, Soewardi Soerjaningrat, Wondoamiseno, Sneevliet, Alimin, Musso, Abikusno Tjokrosujoso, dan Soekarno muda yang tinggal di kos milik Tjokroaminoto. Seiring waktu berjalan, sejak awal dasawarsa 1910-an, Surabaya menampilkan perbedaan tajam gerakan modern dan tradisi, baik melalui peleman kharisma ulama dan pijakan ekonomi. Beliau pun mendirikan Tashwirul Afkar, sebuah kelompok diskusi khas Islam, bersama dengan Kiai Achmad Dachlan dari Kebondalam. Tema diskusi membentang dari ijhtihad dan taqlid hingga tanggapan atas penjajahan. Sekalipun menerima inovasi pendidikan dan pembaruan sosial, posisi ulama bagi dia tetap paling tinggi, karena merupakan pewaris para nabi dan penjaga kemurnian ajaran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Beliau acapkali berdebat dengan Kiai Achmad Dachlan dari Muhammadiyah dan Syaikh Achmad Soerkarti dari Al Irsyad. Pada tahun 1921, Muhammadiyah cabang Surabaya berdiri. Mas Mansoer memilih bergabung dengan Muhammadiyah, meninggalkan Nahdlatul Wathan pada tahun 1922. Pada waktu itulah Chasbullah mengubah Yaa Lal Wathan, sebuah lagu tentang cinta tanah air dan perjuangan membebaskannya dari penjajahan. Simak saja liriknya: “Pusaka hati wahi tanah airku/ Cintamu dalam imanku/ Jangan halangkan nasibmu/ Bangkitlah, hai bangsaku!!! Indonesia negriku/ Engkau Panji Martabatku/ S'yapa datang mengancammu/ 'Kan binasa dibawah dulumu!’”

Menurut Saifuddin Zuhri dalam buku “K. H Abdulwahab Chasbullah

Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama”, Chasbullah juga mendirikan Tashwirul Afkar, suatu kelompok diskusi serupa *Indonesische Studie Club* bentukan Soetomo, pendiri Boedi Oetomo. Bersama Soetomo, Chasbullah juga mendirikan *Islamic Studie Club*. Bahkan Soerjo Soemirat, organisasi bentukan Boedi Oetomo di Surabaya, juga mengikuti Tashwirul Afkar. Hal itu semakin menegaskan karakter keterbukaan Chasbullah.

Pada tahun 1922, Kongres Al Islam I meninggalkan luka bagi para tradisional. Para modernis menuduh para tradisional melakukan syirik dan bid'ah, bahkan kafir. Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dan penguasaan Abdul Aziz ibn Sa'ud atas Mekkah pada tahun 1924, menimbulkan tanggapan berupa pelaksanaan Kongres Khilafah di Kairo pada tahun 1925 dan di Mekkah pada tahun 1926. Untuk mempersiapkan kehadiran di Kongres tersebut, pada Desember 1924, Chasbullah terpilih sebagai wakil kalangan tradisional. Hingga akhirnya mendirikan Komite Hijaz untuk meminta kepada Ibn Sa'ud mempertahankan tradisi di Haramain. Kelak pada akhir Januari 1926, Komite Hijaz berubah menjadi Perkoempoelan Nahdlatol Oelama, Chasbullah pun menjadi salah satu pengurus *hoofdbestuur*-nya (Pendahuluan pada Inventaris Arsip Nahdlatul Ulama 1952 – 1982). Sekalipun berbeda pilihan namun Chasbullah tetap bertujuan meninggikan Islam, sebagaimana tercermin pada pendirian Majelis Islam 'ala Indonesia (MIAI) yang berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah federasi partai-politik dan organisasi kemasyarakatan Islam. Chasbullah juga merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Chasbullah juga mendirikan majalah tengah bulanan “Soeara Nahdlatol Oelama” yang bertahan selama 7 tahun, lalu berganti menjadi Berita Nahdlatol Oelama (Antologi NU Buku I).

Pada 22 – 23 Oktober 1945, Chasbullah memimpin rapat ulama di Bubutan Surabaya. Rapat tersebut merupakan upaya menanggapi



Konsep P.B.N.O. mengenai Perundangan N.O. - Masjumi, Djakarta 8 Mei 1952
Sumber: Teks Putusan Mu'tamar NO Ke 19 di Palembang

kedatangan Presiden Soekarno. Hasil rapat berupa Resolusi Jihad merupakan draf Chasbullah sendiri. Pada 23 Oktober 1945, Hasyim Asy'ari membacakan Resolusi Jihad yang menyerukan “jihad fi sabilillah” mempertahankan tanahair dan segera ponpes-ponpes di Jawa dan Madura menjadi markas pasukan non-regular Hizbullah dan Sabilillah. Melalui Resolusi Jihad, pertempuran itu menjadi milik seluruh rakyat Surabaya melalui peran santri dan kiai.

Partai Nahdlatul Ulama

Pada Mukhtamar XIX di Palembang dalam Konsep P. B. N. O Mengenai Perundangan N. O. – Masyumi tertulis: “Menjetudjui putusan P.B.N.O tanggal 5/6 April 1952, bahwa N. O setjata organisatoris memisahkan diri dari Masjumi” Pada 31 Juli 1952, Wahid Wasjim selaku Ketua Muda Pengurus Besar Nahdlatol Oelama (PBNO) Tandfidziah menyatakan: “... kami memanggil kembali saudara2 K.H Masjukur dan A. Wahid Hasjim, jang hingga kini mendjadi anggota2 Dewan Pimpinan Partai Masjumi, serta K.H.A Wahab Hasbullah jang hingga kini mendjadi Ketua Madjels Sjuro Pusat” Surat tersebut ditujukan kepada Dewan Pimpinan Partai Masjumi dan ditembuskan kepada K. H. A Wahab

Hasbullah sebagai Ketua Sjurijah PBNO. Chasbullah—dalam arsip ditulis Hasbullah—merupakan ketua delegasi dari PBNO untuk berunding dengan Masyumi, dan akhirnya memutuskan berpisah dari Masyumi sekalipun banyak pihak yang menyangsikan. Kesangsian tersebut berdampak sebaliknya sebagaimana tampak pada hasil Pemilu tahun 1955.

Chasbullah yang memulai pendirian NO, mendesak pemisahan NO dari Masyumi, dan mempertahankan posisi dalam Demokrasi Terpimpin. Kali ini, pada kurun tahun 1952 – 1970, Chasbullah mempercayakan Partai NU kepada Idham Chalid. Pada dasawarsa tahun 1960-an dan 1970-an, Chasbullah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (Antologi NU Buku I). Pada Rabu, 12 Dzulqad'ah 1391 bertepatan dengan 29 Desember 1971, Chasbullah wafat dan dikuburkan di Pemakaman Keluarga Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dari Tambakberas, beliau pergi; ke Tambakberas beliau pulang. Beliau menjabat sebagai Rais Aam, selepas wafatnya Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, hingga meninggalnya.

LAB LABA-LABA: KOMUNITAS PERAWAT ARSIP FILM INDONESIA



Komunitas Lab Laba-Laba sedang memeriksa kondisi fisik arsip film

labialaba.weebly.com/gallery.html

“...Perawatan arsip film ini adalah wujud kepedulian para anak muda yang bergerak dalam industri film masa kini. Bahwa penting bagi kita untuk menghargai film-film produksi lama yang sempat menjadi laboratorium film terbesar di Asia Tenggara...”

Slogan yang menyatakan bahwa setiap zaman akan melahirkan anak zamannya masing-masing nampaknya benar adanya. Peran dari generasi muda tidak akan pernah terputus dari sejarah bangsa ini. Kita pun menyadari bahwa bangsa Indonesia, selalu membutuhkan pahlawan-pahlawan baru untuk mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih baik.

Berkenaan dengan hal itu, redaksi

dari Majalah Arsip mengangkat sebuah komunitas nirlaba yang bernama “Lab Laba-Laba”. “Tidak ada maksud apa-apa terkait nama laba-laba, filosofi dari lab laba-laba juga tidak ada, seingat saya hanya kebetulan saja nama lab lalu laba-laba kedengarannya bagus diucapkan. Kami juga tidak tahu kegiatan kami bisa sejauh ini semua hanya serba kebetulan saja,” ujar Edwin selaku senior dan pimpinan dalam komunitas ini. Ia adalah

seorang Sutradara film yang telah menghasilkan film berjudul “Babibuta Ingin Terbang” dan “Postcard from the Zoo”. Komunitas ini terdiri dari 25 anggota yang sebagian besar adalah para pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa, seniman, pekerja dan pegiat film yang peduli dengan perkembangan perfilman Indonesia. Komunitas ini secara sukarela datang ke PFN (Perusahaan Umum Produksi Film Negara) demi ikut membantu kegiatan konservasi melalui pendataan rol-rol film yang terancam musnah dan penggunaan kembali benda-benda pemrosesan film yang kini mulai dianggap usang serta menjadikan film-film itu sebagai

PROFIL

arsip film nasional. “Ruangannya bau sekali, kita harus pakai masker dan sarung tangan, kita belum pernah sebelumnya menyentuh yang bisa kita tulis dan catat adalah ini film apa, kita tulis ulang kita buka kalau bisa dibuka, kita lihat kondisi yang bisa kita baca kita tulis ulang, yang sudah dicek kita tandai, satu orang cek satu rak, yang udah ditandain. Semua yang ada di stiker kita kopi tulisan dan kondisi fisik kami tandain. Untuk pengaturan kami dasarnya pada kehadiran para anggota untuk ngedata sesuai dengan kemampuannya, tidak ada kewajiban untuk ngedata sesuai target. Pokoknya sangat tidak terorganisir, misal hanya bisa satu rak itu ya udah, yang belum kita bisa, yah belum dilakukan, “ ujar Anggun.

Kegiatan yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2014 ini murni sebuah kegiatan konservasi tanpa ada tujuan meraup keuntungan. “Ini adalah wujud kepedulian para anak muda yang bergerak dalam industri film masa kini. Bahwa penting bagi kita untuk menghargai film-film produksi lama yang sempat membuat tempat ini menjadi laboratorium film terbesar di Asia Tenggara,” ujar Anggun salah satu anggota serta pendiri Lab Laba-Laba. Edwin juga menambahkan, upaya konservasi oleh Lab Laba-Laba masih sebatas pendataan. Ribuan rol film yang masih tersimpan dipisahkan mana yang masih baik kondisinya dan mana yang tergolong rusak dengan mencatat judul tiap film, tahun produksi (jika ada keterangan), kondisi detail rol filmnya, dan berapa jumlah kaleng filmnya.

Lab Laba Laba bekerja sama dengan PFN, BUMN yang bergerak dalam hal produksi film, yang berlokasi di Jakarta Timur. “Kami tidak memilih tempat ini pada awalnya, namun bertepatan dengan kami datang ke PFN serta mendapat izin untuk melihat gedung ini kebetulan ada satu gedung menarik yaitu gedung laboratorium film. Gedung tua yang tidak terawat lagi yang menurut kami bagus, yang pada awalnya lab tersebut ada tempat

mengolah yang berfungsi sekarang sudah tidak berfungsi, lalu ada ruang kamar gelap, ada ruang penyimpanan arsip film yang rolnya sudah lengket di belakang dan ada masa lalu menarik yang tersimpan di lab ini. Ini memang bukan tanggung jawab kami, namun bertepatan sekali kami semua ada waktu untuk *bersihin*, kami pun bersihkan lab ini. “Dari situlah kami berkesimpulan kenapa arsip film disini tidak didata saja sekalian. Walaupun masih ada sisa-sisa rol film yang belum bisa kami olah”, jelas Anggun. Kepedulian Edwin dan kawan-kawannya dari Lab Laba-Laba mendapat sambutan baik dari pihak PFN. Edwin menjelaskan, ada sekitar 2.000 rol film di dalam ruang penyimpanan di gedung film PFN. PFN yang sejak tahun 1975 sudah memproduksi 46.000 film dokumenter yang kebanyakan berbentuk *newsreel*/semacam dokumenter atau potongan-potongan film berita, fiksi, serta menyimpan beberapa aset gulungan film, peralatan produksi film, seluloid, dan beberapa dokumen penting lainnya, serta sempat menjadi pusat produksi film terbesar di kawasan Asia Tenggara. Edwin sendiri menganggap PFN adalah tempat yang kondusif untuk melakukan eksperimen dalam melakukan kegiatan konservasi arsip

film. Lab Laba Laba mengapresiasi tempat tersebut dengan mengadakan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan, eksplorasi, serta interpretasi film analog berbasis seluloid, termasuk membuat film dengan arsip-arsip film yang sudah ada serta perawatan dan pendataan film lama milik negara.

Adapun tempat perawatan arsip film berukuran 4 x 7 meter dengan kondisi Pengap dan lembap. Di dalamnya terdapat empat rak besi berjejer rapi yang di atasnya tersimpan kaleng-kaleng logam berisikan gulungan pita film yang telah tersimpan di sana selama puluhan tahun. Ratusan pita film diantaranya tampak rusak, pitanya meleleh teroksidasi. Beberapa kalengnya bengkok karena terlalu lama disimpan. Hal tersebut sangat disayangkan karena koleksi seluloid di gedung PFN adalah master dari film-film kala itu. Dalam sebuah ruangan yang bertabur gelap, kita masih bisa menemukan tumpukan kaleng-kaleng penyimpanan rol film seluloid di sini. Dengan bau kimia yang menyengat tajam, ruangan yang terbengkalai sekitar 10 tahun ini masih merekam jejak dunia film Indonesia pada berbagai era terdahulu. Ada jamur yang hinggap di bagian dalam kaleng, yang menempel di film seluloid itu.



Gedung Produksi Film Negara tempat Komunitas Lab Laba-Laba melakukan kegiatan pendataan arsip film



lababalaba.weebly.com/gallery.html

Persiapan Lab Laba-Laba sebelum pendataan arsip film di PFN

Namun menurut Edwin arsip ini ada yang bisa dibersihkan dan diputar kembali nantinya. Gambar yang sudah terekam rol film seluloid, tidak akan punah oleh hantaman waktu. Ini juga tahan tanpa sebuah perawatan khusus yang tentunya memakan biaya. "Sampai saat ini, baru sekitar 600-an rol film yang telah kami data. Syukurnya, dari 600 itu sebagian besar kondisinya masih bagus. Namun, ada satu lagi ruang penyimpanan yang sudah hancur total. Semua rol film di dalamnya rusak. Tak terselamatkan," jelas Edwin. "Terbayang bagaimana kalau arsip film dibiarkan rusak dan hancur. Indonesia tidak punya dokumen arsip film secara lengkap. Sayang, bukan?" lanjut Edwin.

Dalam menjalankan aksi perawatan arsip film nasional di PFN, para anggota Lab Laba-Laba membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mendata film. "Kami satu ruangan bisa selesai pendataan sekitar 2 minggu dengan hasilnya 600 judul film. Pokoknya jangan dibayangkan pengerjaannya seperti di ANRI. Dengan cara kita buka, mendata, dan mencari keterangan serta keadaan fisik saja, jika sudah rusak parah keadaan rolnya tidak dibuka. Kita tidak bisa membukanya pernah kita coba

tapi lengket mungkin di ANRI pun tidak ada arsip film seperti itu. Bersamaan dengan kondisinya yang bau makanya kita beli masker. Ada sedikit ketakutan akan adanya bahaya kesehatan, tapi bagaimana lagi. Disini juga tidak ada yang namanya arsiparis. Kita disini bertindak dalam perawatan dengan menggunakan insting aja kalau tidak enak udaranya yah keluar. Ada rasa penasaran memang melihat keunikan judul-judul film di rol film tersebut. Misalnya ada judul film Mengusir Jin kita gak tau tahun berapa karena tidak ada keterangan tahunnya. Kalau film fiksi kita tahu misalnya film 'Jakarta 1966', ujar Edwin.

Adapun harapan Lab Laba-Laba kedepan terhadap perawatan arsip film nasional adalah agar arsip film PFN yang sudah didata oleh mereka dipindahkan ke ANRI.

Salah satu hal positif yang ditemukan oleh Edwin dan para anggota Lab Laba-Laba lewat kegiatan tersebut adalah mereka dapat menemukan kembali arsip film-film nasional yang terbengkalai di PFN. Selama proses konservasi berlangsung, Lab Laba-Laba menemukan lebih dari 600 judul film yang berwujud seluloid dan sayangnya tidak diurus dengan baik. Bahkan hampir seluruhnya belum

sempat didigitalisasi untuk kepentingan pengarsipan. Dengan dibuatnya Lab Laba-Laba, Edwin berencana bisa menjadikan lab yang telah mati suri di gedung PFN ini bisa menjadi semacam tempat yang melayani jasa transfer film dari digital ke film seluloid. Edwin turut menambahkan bahwa film seluloid adalah langkah yang nyata untuk melakukan pengarsipan secara fisik. namun untuk sampai pada tujuan, ia masih akan melakukan banyak eksperimen, latihan dan berbagi info dengan ahlinya dengan selalu berusaha menghidupkan kembali seluloid dalam sinema Indonesia kontemporer. Sebab, sejatinya kemajuan industri film Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah yang pernah terjadi melalui arsip film yang tersusun baik dan rapi.

Melihat perjuangan yang dilakukan oleh komunitas Lab Laba-Laba tersebut menyiratkan bahwa Jiwa kepahlawanan akan tumbuh pada diri kita ketika kita benar-benar memaknai arti kata pahlawan itu sendiri. Pada refleksi Hari Pahlawan tahun ini, kita masih menyimpan optimisme bahwa akan terus muncul beberapa generasi muda sebagai ksatria yang berani berkorban untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, keyakinan ini tidak akan pernah pudar bahwa pahlawan di negeri ini belum habis dan hilang. Dengan semangat kuat untuk menjadi pahlawan maka sesungguhnya makna memperingati Hari Pahlawan telah kita peroleh. Ketika kita berperilaku baik, jujur, tanggung jawab dan mampu berkarya maka kita telah menjelma menjadi pahlawan nasional dan pahlawan publik, tanpa atau dengan adanya penobatan. Hakikat pahlawan ada didalam pengabdian dan hati. Tekad kita untuk terus memampukan diri menjadi pahlawan bagi bangsa ini, karena seorang pahlawan hanyalah orang biasa, namun dia mampu melakukan kerja-kerja yang luar biasa untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Octavia Syfarwati :

MENYUSUN *GUIDE* ARSIP PETA BATAS WILAYAH PROVINSI

Indonesia berada pada posisi 95°–141° BT dan 6° LU–11° LS. Secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia; dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara Indonesia memiliki jumlah pulau sebesar 17.504 pulau. Dengan karakteristik iklim tropis, keadaan geomorfologi yang beragam, dan wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik (Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Indo-Australia) menjadikan negara ini kaya akan sumberdaya alam, baik tidak terbarukan maupun terbarukan. Faktor kekayaan alam inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke negara yang disebut dengan “ring of fire”.

Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan wilayah yang pernah dijajah Belanda, pada masa itu lebih dikenal dengan *Nederlandsch-Indië* (Hindia Belanda). Beberapa pembagian dari wilayah administrasi di Indonesia mengadopsi pembagian wilayah pada era Hindia Belanda. Pendokumentasian terkait dengan pembagian wilayah administrasi di Indonesia direkam melalui arsip, salah satu media yang digunakan adalah peta.

Era otonomi daerah yang terjadi pada era reformasi sekarang ini menjadi hal yang memicu perubahan dalam mendeliniasi wilayah administrasi di Indonesia yang berdampak kepada



. Peta Wilayah Administrasi Hindia Belanda dan Sekitarnya
Sumber: Arsip Departement van Oorlog Nomor 2569

konflik terkait kepemilikan suatu daerah. Beberapa metode digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya adalah melalui pendekatan *legal history* yang menggunakan arsip sebagai bukti batas wilayah suatu daerah. Berangkat dari fenomena ini, Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Direktorat Pengolahan melakukan kegiatan penyusunan *Guide* Arsip Peta Batas Wilayah Provinsi. Pada Tahun Anggaran 2014 Direktorat Pengolahan membahas mengenai batas wilayah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau.

Guide arsip merupakan salah satu dari bentuk saran bantu penemuan kembali arsip statis, selain daftar arsip dan inventaris arsip. Definisi dari *guide* arsip seperti yang tertuang dalam

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Saran bantu Penemuan Kembali Arsip Statis, adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis. *Guide* arsip statis terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni *guide* arsip statis khazanah dan *guide* arsip statis tematis. *Guide* arsip yang disusun pada tahun ini termasuk dalam kategori *guide* arsip statis dengan tema batas wilayah provinsi dan batas wilayah kabupaten/ kota. Dalam menyusun *guide* arsip peta batas wilayah provinsi, terdapat delapan tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor



Contoh guide arsip peta batas wilayah provinsi Riau



Peta Topografi Daerah Muntok dan Sekitarnya
Sumber: Arsip Dittopad Nomor 332

27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Tahapan pertama, adalah identifikasi arsip, pada tahapan ini tim penyusun mengidentifikasi khazanah arsip kartografik mana yang memuat informasi terkait perbatasan. Tahapan Kedua adalah penyusunan rencana teknis yang terkait dengan perencanaan penyusunan guide yang terkait dengan masalah waktu, sumber daya manusia, peralatan, dan biaya. Ketiga, penelusuran sumber referensi yang terkait dengan masalah wilayah administrasi perbatasan provinsi, baik berupa produk hukum ataupun referensi yang lainnya. Keempat adalah penulisan guide arsip.

Tahapan Kelima adalah penilaian dan penelaahan dari draft guide arsip yang dihasilkan, dimana pada tahapan ini juga dilakukan verifikasi seperti yang telah diatur dalam Standar Manajemen Mutu Pengolahan dan Penyimpanan. Tahapan selanjutnya adalah perbaikan atas penilaian dan penelaahan. Tahapan ketujuh yaitu pengesahan guide arsip yang dilakukan

oleh Direktur Pengolahan. Tahapan terakhir, publikasi dan distribusi guide arsip ke pihak yang terkait.

Khazanah arsip yang digunakan dalam penyusunan guide arsip ini berasal dari khazanah arsip, pertama, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Kedua, De Haan. Ketiga, Departement van Oorlog. Keempat, Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad). Kelima, Topografische Dienst.

Adapun dasar dari pemilihan arsip dalam penyusunan guide arsip adalah adanya garis demarkasi wilayah administrasi, maupun wilayah-wilayah terdepan dari daerah perbatasan. Cara mengakses guide arsip ini dapat menggunakan indeks ataupun daftar isi. Misalnya pengguna ingin melihat perbatasan daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat di daerah Muntok. Dengan mengacu kepada indeks Muntok, maka pengguna diarahkan untuk melihat pada No. 32.

Contoh penyajian uraian informasi No. 32: Direktorat Topografi Angkatan Darat, No. 332/ Sheet 55

MUNTOK

Informasi geografis batas wilayah Residentie Banka en Billiton dengan Residentie Palembang yang terdapat di Pulau Nangka-Besar, Pulau Pelepasan of West-Nangka, dan Pulau Gadoeng;

Peta Topografi;

1 : 250.000;

105° - 106° BT, dan 2° - 3° LS;

56 x 71 cm;

Berwarna; Cetakan; Tinta; Asli;

AMS; 1944;

Dengan disusunnya Guide Arsip Peta Batas Wilayah Provinsi diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mengakses arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah perbatasan.

Rayi Darmagara :

'QUO VADIS' PEDOMAN RETENSI ARSIP

Pembentukan Pedoman Retensi Arsip

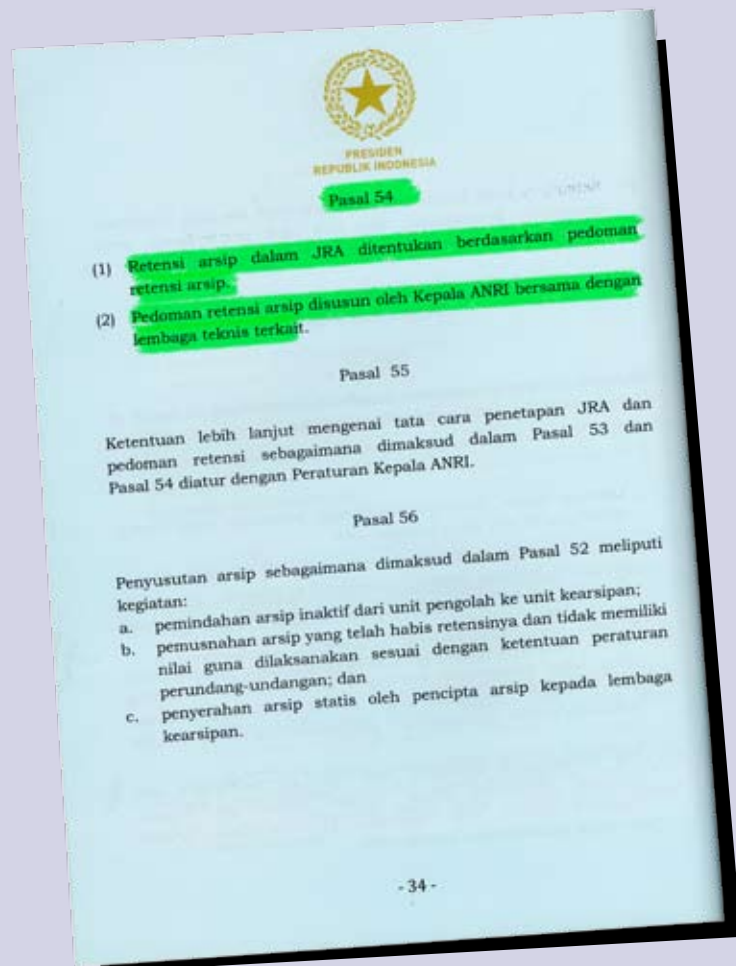
Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Selanjutnya Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip, dan kemudian bahwa pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait.

Pedoman retensi arsip sendiri didefinisikan sebagai ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi minimal arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) masing-masing lembaga.

Kewajiban memiliki JRA diatur dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa untuk Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD adalah wajib dan perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta,

organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan adalah harus. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pedoman retensi arsip merupakan upaya ANRI untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan penyusutan arsip yang

dilakukan oleh pencipta arsip. Terkait dengan hal tersebut, gambaran secara umum bahwa pada saat pencipta arsip membuat JRA, maka harus berdasarkan pedoman retensi arsip, yang pedoman tersebut disusun



Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip, dan kemudian bahwa pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait.

oleh ANRI dengan Lembaga Teknis terkait. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga teknis terkait” adalah lembaga yang memiliki keterkaitan substansi urusan pemerintahan.

Dengan bentuk substansi urusan pemerintahan sebagai dasar, maka pedoman retensi arsip dalam penyusunannya mencoba menarik benang merah antara fungsi pemerintahan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dikombinasikan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif. JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan. JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Penarikan fungsi pemerintahan tidak dapat lepas dari penyelenggaraan kekuasaan yang diadopsi dari teori ‘Trias Politika’-nya John Locke, meliputi fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini artinya ANRI merupakan lembaga dengan kewenangan besar yang mengatur mereka-mereka yang berada dipusaran fungsi kekuasaan tersebut untuk memiliki JRA. Hal ini cukup memberikan angin segar karena target dan jangkauan ANRI adalah seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini.

Pedoman retensi arsip sebagai

No	Sektor Perekonomian	Sektor Kesejahteraan Rakyat	Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan
1	Urusan Badan Usaha (Perusahaan)	Urusan Agama	Urusan Pemerintah Daerah
2	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Urusan Kearsipan	Urusan Hukum, meliputi:
3	Urusan Kehutanan	Urusan Kediklatan	a. sub urusan peraturan perundang-undangan
4	Urusan Kelautan dan Perikanan	Urusan Kepegawaian	b. sub urusan imigrasi
5	Urusan Keuangan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	c. sub urusan pemasyarakatan
6	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana	d. sub urusan hukum lainnya
7	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Urusan Kepustakaan	Urusan Hak Asasi Manusia (HAM)
8	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Kesehatan	Urusan Intelijen dan Persandian
9	Urusan Pekerjaan Umum	Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Urusan Pemilu
10	Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Keamanan
11	Urusan Penanaman Modal	Urusan Penanggulangan Bencana	Urusan Pertahanan
12	Urusan Perdagangan	Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Diplomati
13	Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Pengawasan	Urusan Narkotika
14	Urusan Perhubungan	Urusan Perumahan Rakyat	Urusan Pertanahan
15	Urusan Perindustrian	Urusan Sosial	
16	Urusan Pertanian	Urusan Pengawasan Obat dan Makanan	
17	Urusan Riset dan Teknologi		
18	Urusan Statistik		
19	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan era Presiden SBY

dasar pembentukan JRA bagi pencipta arsip memberikan dasar hukum terhadap arsip yang diciptakan apakah dapat dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. ANRI melalui pedoman retensi arsip memberikan alasan pembenaran kepada mereka (pencipta arsip) sehingga dapat memusnahkan arsipnya yang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam Pasal 86 akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika dilakukan di luar prosedur yang benar. Sebagaimana ANRI melalui pedoman retensi arsip juga memberikan keistimewaan terhadap pencipta arsip untuk

menyimpan arsipnya di lembaga kearsipan selama-lamanya.

Kembali pada konteks penyusunan pedoman retensi arsip yang dibentuk ANRI dengan lembaga teknis terkait, pada awal pembentukan pedoman retensi arsip, penarikan konsep substantif dan fasilitatif menjadi tidak penting, karena justru yang menjadi pijakan adalah substansi urusan pemerintahan dalam “trias politika” tadi. Ini artinya hal tersebut menyangkut seluruh aspek kenegaraan, pedoman retensi tidak lagi berkutub pada apakah retensi ini bersifat substantif atau bersifat fasilitatif.

Bentuk Produk Hukum Pedoman Retensi Arsip

Kewajiban ANRI dalam membentuk pedoman retensi arsip lebih lanjut diuraikan dalam bentuk delegasi yang amanatnya tercantum dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana pedoman retensi diatur dengan Peraturan Kepala ANRI. Delegasi ini secara gramatikal memberikan kewenangan kepada Kepala ANRI mengatur pedoman retensi arsip dalam bentuk peraturan. Terlepas pada ide yang muncul pada saat pembentukan dengan lembaga teknis terkait dengan asumsi bahwa lembaga teknis terkait mengetahui secara substansi terhadap arsip yang dimiliki, sehingga bentuk produk hukum saat itu diusulkan menjadi peraturan bersama.

Dalam tahapan ini, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan batasan terhadap jenis peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang tidak mengatur kedudukan peraturan bersama. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana membagi bentuk Peraturan Kepala ANRI yang dapat menjangkau berbagai aspek fungsi pemerintahan di negara ini? Dan atas dasar apa pembagian fungsi pemerintahan tersebut sehingga dapat menjadi sebuah pedoman retensi arsip?

Pernyataan Kapusjibang Siskar ANRI yang memberikan pernyataan bahwa “tugas dan fungsi negara sudah terbagi habis di Republik Indonesia ini” bisa jadi sebagai pijakan penentuan pembagian fungsi pemerintahan yang akan dijadikan pedoman retensi arsip. Pembentuk peraturan kemudian memutuskan untuk melakukan pengkajian dan menjadikan kementerian koordinator dengan sektor penyelenggaraan pemerintahan sebagai dasar pijakan tersebut.

Dari tabel Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan, total sejumlah 45 untuk pedoman retensi arsip yang harus dibentuk oleh ANRI, dengan jumlah pedoman retensi arsip yang telah ditetapkan saat ini adalah berjumlah 11. Pertama, Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275). Kedua, Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276).

Ketiga, Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277). Keempat, Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 661);

Kelima, Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662). Keenam, Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);

Ketujuh, Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664). Kedelapan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Urusan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 665).

Kesembilan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666). Kesepuluh, Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 667). Kesebelas, Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668).

Kemudian yang patut menjadi perhatian adalah ketentuan penutup yang tertuang dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Pedoman retensi arsip yang disusun ANRI bersama lembaga teknis terkait harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Peraturan Pemerintah tentang Kearsipan ini sendiri diundangkan pada tanggal 27 Februari 2012, berarti deadline selesainya adalah 27 Februari 2015. Hal ini menjadikan pembentukan Peraturan Kepala ANRI butuh sebuah percepatan, perhatian dan prioritas utama.

Perubahan Ketatanegaraan dan Dilema Moratorium

Pergantian pemerintahan dari SBY ke Joko Widodo menyebabkan terjadinya perubahan ketatanegaraan khususnya terkait dengan proporsi kementerian sebagai pembantu presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif dimana sebelumnya hanya terdapat tiga menteri koordinator, era kepemimpinan Jokowi ditambah menjadi empat menteri koordinator,

yang meliputi kemaritiman, politik hukum dan keamanan, perekonomian dan pembangunan manusia dan kebudayaan. Jika kita bandingkan dengan tabel sektor penyelenggaraan pemerintahan dalam pedoman retensi arsip yang terdiri dari 3 sektor tadi, tentu secara substansi perlu dikaji ulang pengambilan bentuk sektor tersebut, dimana penekanan penyusunan seharusnya lebih melihat fungsi, sehingga perubahan ketatanegaraan tidak berpengaruh terhadap urusan pedoman retensi arsip yang dibentuk. Tantangan lebih lanjut adalah penyusunan pedoman retensi arsip harus mampu memenuhi seluruh fungsi pada lembaga negara.

Pedoman retensi berbagai sektor penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan instrumen bagi pencipta arsip untuk membuat JRA. Yang menjadi polemik kemudian adalah apakah setiap JRA yang disampaikan pimpinan pencipta arsip untuk diajukan permintaan persetujuan Kepala ANRI harus berdasarkan pedoman retensi arsip? Sedangkan pedoman retensi arsip sendiri memang belum sepenuhnya selesai dibuat?

Tentu dalam kajian dan teori hukum memang setiap perbuatan tata usaha negara harus memiliki dasar hukum agar tidak menjadikan sewenang-wenang. Tapi apakah tidak menjadi sebuah hambatan bagi pencipta arsip yang ingin meminta persetujuan Kepala ANRI jika memang moratorium JRA diberlakukan, lalu sampai kapan diberlakukannya?

Butuh sebuah energi dan curahan kinerja yang cukup kuat dan komprehensif untuk segera mengejar penyelesaian pedoman retensi arsip sehingga semua sudah bisa menjadi pedoman untuk pencipta arsip dalam kewajibannya menyusun JRA. Jika tidak maka '*quo vadis*' (mau di bawa kemana) pedoman retensi arsip benar-benar terjadi.

Pedoman Retensi Arsip sebagai Dasar Hukum Material dan Prospek Penyusunan JRA Kedepan

Seperti halnya sebuah instrumen, maka substansi yang terdapat pada pedoman retensi arsip sektoral tadi merupakan material yang menjadi patokan bagi pencipta arsip dalam menentukan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan arsip.

Ketika menyusun JRA dengan pedoman ini maka diharapkan pencipta arsip akan dimudahkan dalam penentuan jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Dengan penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi yang terbagi atas 3 (tiga) pola, yaitu, pertama, 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi. Kedua, 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi. Ketiga, 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Kemudahan dalam penyusunan tadi dapat digambarkan bahwa pencipta arsip cukup melihat jenis/*series* arsip dalam pedoman retensi arsip dalam pedoman dan menuangkannya dalam JRA, tentu penyusunan JRA harus rincinya kedalam bentuk item-item arsip terhadap kegiatan dalam penentuan JRA tadi. Hal ini tentu harus juga disadari bahwa penyusunan pedoman retensi arsip harus lengkap terhadap fungsi yang terdapat dalam sektor penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat pada lampiran setiap Perka ANRI tentang Pedoman Retensi

Arsip. Selanjutnya diharapkan bahwa penyusunan JRA bagi pencipta juga memiliki kesamaan dan keseragaman pada penulisan di kolom retensi dan kolom keterangan. Untuk jenis/*series* arsip yang tertuang dalam pedoman retensi, patut diperhatikan juga media lain penyimpanan arsip yang memang jenis dan perlakuannya berbeda yaitu arsip *audio-visual*, karena keunikan perlakuannya sehingga pedoman retensi arsip harus mampu menjangkau arsip *audio-visual* dengan tujuan lebih jauh yaitu menjamin keselamatan dan kelestarian arsip tersebut.

Jangan dilupakan juga bahwa Pasal 55 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan selain delegasi pembentukan peraturan kepala tentang pedoman retensi juga mendelegasikan pembentukan Peraturan Kepala ANRI tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai instrumen hukum formalnya, yang merupakan proses pembuatan Jadwal Retensi Arsip yang mencakup tahapan penyusunan, permohonan persetujuan dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan.

Ke depan, dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik setelah semua pedoman sudah dibentuk dan menjadi pedoman penyusunan JRA, ANRI harus memiliki terobosan yang cukup strategis dalam memberikan kemudahan bagi pencipta arsip dalam hal permohonan/permintaan persetujuan JRA kepada Kepala ANRI dengan sistem JRA *online*, atau e-JRA. Semoga, karena mencapai cita-cita bukanlah melompat melewati samudra, tetapi berjalan setapak demi setapak menuju puncak.

NAPAK TILAS HUBUNGAN INDONESIA-SERBIA

Pada tanggal 19 September 2014 bersamaan dengan penandatanganan “*Working Plan Between The National Archives of Republic of Indonesia (ANRI) and The Archives of Yugoslavia in The Republic of Serbia (AJRS) in The Area of Archival Cooperation for the Year 2013-2016*”, di Gedung Arhive Jugoslavije, Republic Serbia (AJRS), diluncurkan sebuah karya monografi mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia-Yugoslavia dengan titik berat pada kedekatan antara Presiden Sukarno dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito yang berjudul *Jugoslavia and Indonesia from 1945-1967, Research and Documentation*. Buku disusun oleh tiga ahli sejarah Yugoslavia, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Beograd, Prof. Dr. Ljubodrag Dimic, Pakar Institut Sejarah Baru Serbia, yang adalah juga Ketua Asosiasi Persahabatan Serbia dan Indonesia “Nusantara”, Dr Aleksandar Rakovic dan Direktur AJRS, Miladin Milosevic. Ide menyusun buku ilmiah dan bersejarah ini pertama kali datang dari Dubes Indonesia di Beograd Samuel Samson yang disampaikan pada penyelenggaraan forum “*Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)*” di Beograd, April 2011.

Serbia sendiri merupakan negara



Suasana Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd,
08 Agustus 1961

Sumber: ANRI: Kempen 620325 FG 1-2

pecahan Yugoslavia, setelah negara-negara bagian memisahkan diri yaitu Kroasia, Slovenia, Bosnia, terakhir adalah Montenegro dan sisanya adalah Serbia. Serbia adalah negara terakhir yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 5 Juni 2006 dengan ibukota di Beograd.

Jauh sebelum buku tersebut muncul memang hubungan Indonesia-Yugoslavia telah berlangsung lama. Hubungan diplomatik di tingkat publik antara Indonesia dan Yugoslavia, salah satunya, ditandai pertama kali lewat tulisan di *Harian Politika* pada

tanggal 15 November 1945, yang memberitakan tentang perang antara Indonesia melawan Belanda dan Inggris.

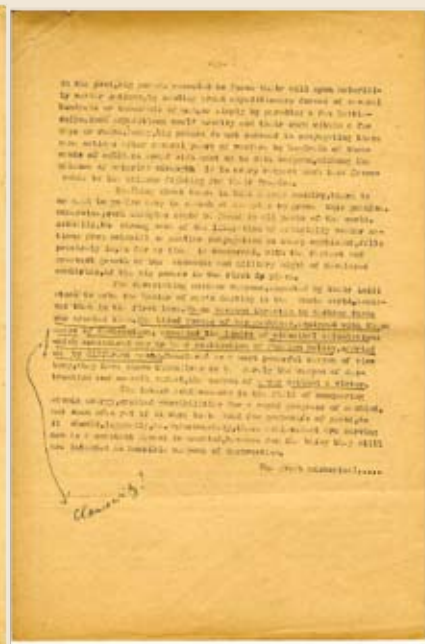
Hubungan diplomatik Indonesia-Yugoslavia mencuat kembali menjelang Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Pada tahun 1956, saat Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia-Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat

kepada Indonesia. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno langsung berkeliling ke negara-negara Amerika Serikat, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat. Pada tahun 1958, Indonesia mulai menempatkan perwakilannya di Yugoslavia yaitu M Nazir sesuai Kepres No 108 th 1958.

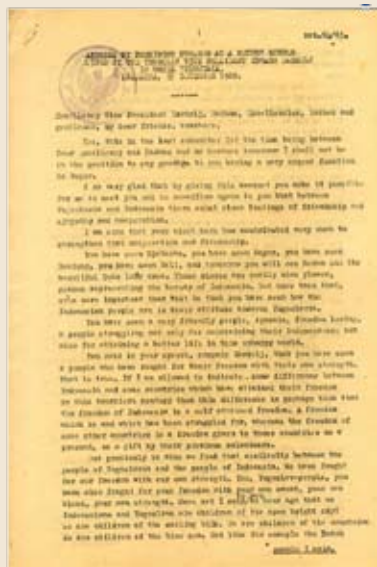
Pada tahun yang sama Universitas Padjadjaran memberikan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum kepada Presiden Yugoslavia, Joseph Broz Tito.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke Cina, Uni Soviet, termasuk Yugoslavia.

Pada September 1960 saat Presiden Soekarno dihadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (*To Build the World Anew*). Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (*New Emerging Forces*, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd,



Pidato Gelar Honoris Causa JB Tito dari Unpad
Sumber: Ruslan Abdulgani No 55



Pidato Presiden No. 0440 tentang kedatangan Wapres Yugoslavia

Yugoslavia pada tahun 1961.

Akhirnya KTT GNB I berhasil dilaksanakan di Beograd dan hasilnya disampaikan oleh Perdana Menteri Nehru dari India ke forum Washington

dan ke Moskow yang mewakili blok barat dan timur. Bahkan selepas KTT GNB yang pertama, 1961, Soekarno dan Tito, berinisiatif merancang pertemuan antara Presiden John F Kennedy dengan Presiden Nikita Khrushchev untuk meredakan ketegangan diantara kedua blok politik dan kekuatan militer dunia di era perang dingin.

Indonesia dan Yugoslavia tidak hanya bekerjasama di bidang politik dan perdamaian dunia, melalui kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden Yugoslavia pada tahun 1962. Namun juga dalam bidang lain seperti pendidikan, melalui kunjungan Menteri Pengajaran Yugoslavia ke Jakarta . Di bidang lain, yaitu seni budaya, Indonesia juga pernah mengimpor film-film dari Yugoslavia pada tahun 1964.

Kedekatan hubungan Indonesia-Yugoslavia berkaitan erat dengan

NARA DAN KETERLIBATAN PADA PENANGANAN ARSIP KEPRESIDENAN

Tujuh belas September dua ribu empat belas merupakan momentum penting dalam upaya membangun kesadaran untuk menyelamatkan arsip para pemimpin di Republik Indonesia, yakni saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan arsip pemerintahannya selama dua periode (2004–2009 dan tahun 2009–2014) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima oleh Kepala ANRI Mustari Irawan di Istana Bogor. Lebih dari 2.000 dokumen yang diserahkan SBY dinyatakan oleh Kepala ANRI dominan dapat dibuka ke publik karena akan menjadi memori kolektif bangsa.

Pada acara penyerahan arsip, yang

berita acaranya ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silahi dan Kepala ANRI, SBY mengatakan, “Ini berguna bila ada polemik sejarah di masyarakat. Dokumen negara harus jelas posisinya di mana, jangan sampai dokumen negara tidak jelas posisinya.” Senada dengan Kepala ANRI dalam hal memori kolektif bangsa, SBY juga menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan ke Arsip Nasional dapat digunakan untuk suatu penelitian. Menurut beliau, segala kegiatan pemerintah dapat dijadikan bahan tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Selain itu, SBY menambahkan harapannya agar di tingkat menteri, gubernur, bupati, walikota juga dapat menyimpan dokumennya dan diabadikan di Arsip Nasional.

Pernyataan Presiden SBY di dalam acara penyerahan arsip tersebut menekankan kembali tentang perlunya penyelamatan dan pemeliharaan dokumen negara sebagai bukti pertanggung jawaban nasional dan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Belumlah terlambat bagi kita yang baru mengalami transisi presiden yang ke-7 untuk melakukan upaya tersebut jika dibandingkan dengan negara yang sudah lebih dahulu memiliki tradisi tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama, seperti upaya yang dilakukan oleh *National Archives and Records Administration* (NARA) terhadap arsip kepresidenan di Amerika Serikat.

Upaya untuk menghimpun dan



sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_Presidential_Library_and_Museum

John F. Kennedy Presidential Library and Museum

MANCA NEGARA

menyelamatkan arsip kepresidenan di Amerika Serikat pada awalnya bukan tanpa hambatan, baik yang terkait masalah teknis maupun legal formal. Upaya sungguh-sungguh yang disertai dengan dukungan pemangku kepentinganlah yang kemudian menjadikan kegiatan yang dilakukan oleh NARA diperhitungkan sebagai kegiatan yang strategis.

Awal Keterlibatan NARA dalam Pemindahan Arsip Kepresidenan

NARA yang didirikan pada tahun 1934 pada awalnya hanya memiliki khazanah arsip kepresidenan cukup sedikit sejak Presiden Amerika Serikat yang pertama George Washington (1732–1799). Sampai tahun 1981, koleksi presiden adalah milik pribadi presiden, sehingga terkadang arsip penting dari koleksi ini ada yang dijual, dimusnahkan, atau tersebar keberadaannya.

Meskipun demikian, peran NARA dalam pemindahan arsip presiden telah dimulai sejak tahun 1939 ketika Kongres Amerika Serikat menerima “hadiah” Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) berupa tanah untuk pembangunan perpustakaan dan arsip presiden Franklin D. Roosevelt serta bahan-bahan bersejarah lainnya di Hyde Park, New York.

Undang-Undang Arsip Presiden Tahun 1978 mengubah kepemilikan arsip resmi Presiden dan Wakil Presiden secara sah dari milik pribadi menjadi milik publik, yang dimulai pada tahun 1981 setelah pelantikan Presiden Ronald Reagan, serta mendefinisikan bahwa Arsiparis akan bertanggung jawab terhadap kepemilikan dan pemeliharaan arsip presiden segera setelah di akhir periode pemerintahan.

Saat ini ada 13 perpustakaan



William J. Clinton Presidential Centre and Park

Presiden yang merupakan bagian dari Arsip Nasional dan dikelola oleh Kantor Perpustakaan Presiden milik NARA.

Beberapa kisah di Balik Pemindahan Arsip Presiden Amerika Serikat

Setiap pemindahan arsip dan artefak Presiden Amerika Serikat oleh NARA memiliki berbagai cerita yang berbeda di baliknya, namun ada yang tetap konstan berlaku bagi NARA yaitu mengontrol, mengemas, dan menginventarisasi arsip dan artefak secara seksama selama penyerahan sehingga bahan-bahan ini dapat segera ditemukan kembali sebelum akhir pemerintahan.

Penyerahan arsip dan artefak Presiden Franklin D. Roosevelt dimulai di tengah-tengah masa jabatan kepresidenannya. Selama periode awal ini, arsip Gedung Putih bahkan dikirim ke Arsip Nasional untuk fumigasi, karena saat itu Gedung Putih mempunyai masalah hama. Pengiriman arsip dan artefak dilakukan dengan menggunakan truk, sedangkan

untuk volume arsip dan artefak yang sedikit sering dikirim dengan kereta Presiden. Semua berkas Roosevelt berjumlah sekitar 17 juta halaman.

Pada bulan Januari 1953, arsip Presiden Harry S. Truman pada saat pengiriman ke Kota Kansas, Missouri dikemas ke dalam 12 truk tentara. Karena arsip presiden diperlakukan sebagai milik pribadi Presiden saat itu, Truman tidak segera memberikan arsipnya kepada perpustakaan tetapi menyatakan keinginannya untuk membangun Perpustakaan Truman. Atas permintaan Truman, pemerintah menugaskan beberapa arsiparis mengerjakan arsipnya. Pada tahun 1957, Truman secara resmi menyumbangkan arsipnya ke Arsip Nasional untuk disimpan di Perpustakaan Truman yang baru.

Pemindahan arsip dan artefak Presiden Dwight D. Eisenhower terjadi dalam beberapa tahap. Semua arsip presiden dibawa meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari 1961. Arsip tersebut kemudian dikirim ke perpustakaan di Abilene dengan

menggunakan truk pada tahun 1965 menjadi milik Arsip Nasional.

Pemindahan arsip presiden yang paling tidak terduga terjadi saat kejadian pembunuhan Presiden John F. Kennedy, semua arsip pemerintahan Kennedy dipindahkan ke Gedung Arsip Nasional di pusat kota Washington, sebelumnya akhirnya dipindahkan ke Boston. Jaksa Agung Robert Francis “Bobby” Kennedy, salah satu dari adik laki-laki John F. Kennedy, secara *de facto* menjabat sebagai direktur perpustakaan.

Pemindahan Arsip Presiden Lyndon B. Johnson dilakukan beberapa bulan sebelum ia meninggalkan kantornya, dan sebagian besar arsipnya dipindahkan pada bulan Januari 1969 sampai dengan hari pelantikan presiden yang baru. Berbeda dengan pemindahan arsip presiden-presiden sebelumnya, pemindahan ini telah direncanakan sejak Johnson mengumumkan pada tahun 1965 bahwa perpustakaanannya akan terletak di Universitas of Texas.

Sebuah pemindahan arsip yang sangat tidak biasa terjadi ketika Presiden Richard Nixon mengundurkan diri pada bulan Agustus 1974. Pada saat ia mengundurkan diri, arsip presiden diperkirakan sekitar 42 juta halaman. Tidak lama setelah pengunduran diri, Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Rekaman Presiden dan Preservasi Bahan-bahan untuk merebut arsip presiden, khususnya kasus Watergate, dan menempatkannya di Arsip Nasional. Nixon menggugat pemerintah dengan mengklaim bahwa arsip itu adalah properti pribadinya, seperti yang terjadi pada setiap Presiden sebelumnya sejak George Washington. Litigasi terhadap kepemilikan dan kontrol arsip Nixon akhirnya diselesaikan oleh

No.	Nama Perpustakaan Presiden	Masa Hidup	Lokasi Perpustakaan
1	Herbert Hoover Presidential Library and Museum (Presiden ke-31, masa jabatan ke-36)	1874-1964	210 Parkside Drive, West Branch, IA 52358
2	Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum (Presiden ke-32, masa jabatan ke-37, 38, 39, 40)	1882-1945	4079 Albany Post Road, Hyde Park, NY 12538
3	Harry S. Truman Presidential Museum and Library (Presiden ke-33, masa jabatan ke-41)	1884-1972	500 W. 13 Hwy, 24 Independence MO 64290
4	Dwight D. Eisenhower Presidential Library (Presiden ke-34 dan 43)	1890-1969	200 Southeast Fourth Street, P.O. Box 339, Abilene, KS 67410
5	John F. Kennedy Presidential Library and Museum (Presiden ke-35, masa jabatan ke-44)	1917-1963	Columbia Point, Boston MA 02125
6	Lyndon B. Johnson Library and Museum (Presiden ke-36, masa jabatan ke-45)	1908-1973	2313 Red River St. Austin, TX 78705
7	Richard Nixon Presidential Library and Museum (Presiden ke-37, masa jabatan ke-48)	1913-1994	18001 Yorba Linda Blvd., Yorba Linda, CA, 9601 Adelphi Rd., College Park, MD
8	Gerald R. Ford Museum and Gerald R. Ford Presidential Library (Presiden ke-38, masa jabatan ke-47)	1913-2000	100 Boat Avenue Ann Arbor, MI 48109
9	Jimmy Carter Library and Museum (Presiden ke-39, masa jabatan ke-48)	lahir, 1924	441 Freedom Parkway Atlanta, Georgia 30307-1496
10	Ronald Reagan Presidential Library (Presiden ke-40, masa jabatan ke-49 dan 50)	1911-2004	40 Presidential Drive Simi Valley, California 92685
11	George H.W. Bush Presidential Library and Museum (Presiden ke-41, masa jabatan ke-51)	lahir, 1924	1000 George Bush Drive West, College Station, Texas 77845
12	William J. Clinton Presidential Centre and Park (Presiden ke-42, masa jabatan ke-52 dan 53)	lahir, 1946	1200 President Clinton Ave Little Rock, AR 72201
13	George W. Bush Presidential Center (Presiden ke-43, masa jabatan ke-54 dan 55)	lahir, 1946	2943 SMU Boulevard, Dallas, TX 75205

13 perpustakaan Presiden yang merupakan bagian dari Arsip Nasional dan dikelola oleh Kantor Perpustakaan Presiden milik NARA.

Mahkamah Agung pada tahun 1977 yang mendukung pemerintah.

Perencanaan untuk memindahkan arsip Presiden Gerald R. Ford bahkan belum dimulai sampai tanggal 14 Desember 1976, ketika Presiden Ford menandatangani warisan hadiah arsipnya dan mengumumkan niatnya untuk membangun perpustakaan. Hanya dalam minggu pertama pada bulan Januari, staf Arsip Nasional dapat bekerja di kompleks Gedung Putih dengan staf Central File Gedung Putih untuk melakukan survei terhadap volume arsip, membangun

kawasan pentahapan, memulai koleksi, mengumpulkan dalam palet, dan memindahkan arsip.

Kisah pemindahan arsip yang sulit lainnya terjadi pada tahun 1980, ketika Presiden Jimmy Carter dikalahkan setelah satu periode. Arsip Nasional tidak tahu dimanakah perpustakaan presiden akan dibangun dan kapan mulai memindahkan arsipnya. Karena Arsip Nasional masih memiliki sekitar 77 hari untuk menyelesaikan pemindahan arsip yang keluar dari Gedung Putih sebelum kepala eksekutif yang baru masuk. Akhirnya, pada pertengahan Desember 1980, Arsip Nasional mendapat persetujuan untuk memindahkan dan mempelajari perpustakaan presiden yang akan dibangun di Atlanta. Ini merupakan transisi presiden terakhir yang dipindahkan sepenuhnya dengan truk.

Transisi Presiden Ronald Reagan pada tahun 1989 adalah implementasi pertama Undang-Undang Arsip Presiden Tahun 1978. Pemeliharaan yang sah terhadap arsip presiden otomatis diserahkan ke NARA. Pemerintahan Reagan yang pertama menggunakan *e-mail*, yang sebagian besar sangat rahasia diciptakan pada sistem Dewan Keamanan Nasional.

Pemindahan arsip George H.W. Bush, seperti juga Ford dan Carter, dilakukan dalam jangka waktu yang sangat padat, NARA menggunakan tentara dari Fort Hood, Texas, untuk menyimpan arsip ke dalam fasilitas sementara, mengonversi gelanggang *bowling* sekitar tiga kilometer dari lokasi permanen di kampus Texas A&M University. Pengiriman pertama (dua pesawat cargo C-5 untuk arsip dan artefak) tiba di Perpustakaan Bush pada tanggal 15 Januari 1993.

Pemindahan arsip Presiden William J. Clinton adalah yang terbesar yang

MANCA NEGARA

pernah dilakukan, yang melibatkan sekitar 75 juta halaman, sekitar 75.000 artefak, dan jutaan arsip audiovisual. Transisi ini juga melibatkan sejumlah besar sistem arsip elektronik, serta sebagai hasilnya, staf teknologi informasi NARA kian menjadi bagian penting dari pemindahan arsip presiden. Untuk pertama kalinya, NARA mempekerjakan staf di perpustakaan Clinton sebelum masa transisi, dimulai pada bulan November 1997. Hal ini untuk menjamin kesiapan staf pada saat arsip dipindahkan ke NARA.

Pada saat itu berakhir, staf NARA, bekerja sama dengan Pentagon, memindahkan sekitar 67.000 kaki bahan-bahan (total sekitar 836 ton) ke fasilitas sementara *Little Rock*. Upaya ini mensyaratkan delapan penerbangan dari pesawat C-5 dan waktu pengumpulan ke dalam palet, pemuatan, pembongkaran, dan penyusunan boks ke dalam rak yang tidak terhitung oleh staf NARA dan DoD (Departemen Pertahanan) di kompleks Gedung Putih, Gedung Arsip Nasional, *Andrews Air Force base*, *Little Rock Air Force Base*, dan fasilitas Perpustakaan Clinton.

Sekali lagi, dalam pemindahan arsip Presiden George W. Bush (Jr.) yang memerintah dalam dua periode, staf NARA, dengan asistensi Departemen Pertahanan (DoD), bekerja memindahkan arsip presiden. Ketika George W. Bush meninggalkan Kepresidenan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009, saat Presiden Barack Obama dilantik dan diambil sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44, arsip resmi dan hadiah yang diterima Bush atas nama Pemerintah Amerika Serikat menjadi milik NARA. Koleksi ini dipindahkan ke fasilitas Perpustakaan sementara di Lewisville Texas, sekitar 20 kilometer dari lokasi perpustakaan permanen di



Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies

Kampus Southern Methodist University di Dallas.

Pada bulan-bulan berikutnya, spesialis Teknik Informatika NARA mulai memroses pemuatan sekitar 77 terabytes data ke dalam sistem *Electronic Records Administration* (ERA) dan menyiapkannya untuk akses. Volume arsip elektronik yang diterima dari pemerintahan Bush yang berjumlah 77 terabytes kira-kira tiga puluh lima kali jumlah data yang diterima dari pemerintahan Clinton, yang jumlah itu sendiri beberapa kali dari masa pemerintahan George H.W. Bush sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kebebasan Informasi dan Undang-Undang Arsip Presiden (44 USC 2001), arsip Presiden Bush dapat diakses oleh publik setelah berakhir lima tahun masa pemerintahannya.

Hal yang menjadi catatan adalah terkait dengan pemindahan arsip dan artefak presiden adalah bahwa transisi Presiden yang menjabat selama dua periode memberikan lebih banyak waktu kepada NARA untuk merencanakan serta menjamin kontrol

arsip lebih baik daripada pemindahan sebelumnya. Arsip Nasional ini juga memprakarsai penggunaan sistem komputer yang melacak pemindahan arsip dan artefak. Sistem ini mampu mengontrol setiap boks selama pemindahan dan menetapkan sebelumnya setiap boks ke lokasi rak di tempat tujuan di lokasi penyimpanan sementara di California.

Semoga penyerahan arsip di Indonesia seperti yang sudah dipelopori oleh Presiden SBY akan menjadi tradisi yang terpelihara dan berkelanjutan.

Merupakan harapan kita bahwa arsip yang diserahkan dalam kondisi baik, lengkap dan utuh agar berbagai peristiwa dan kegiatan yang terekam di dalamnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan perencanaan strategis melalui kajian komprehensif dalam upaya menyelamatkan mozaik penting di antara khazanah lainnya yang dimiliki bangsa ini. (bn)



ARSIP MASUK SEKOLAH : TEROBOSAN KARSIPDA KOTA BEKASI

Mungkin kita pernah mendengar adanya ijazah palsu bahkan nilai palsu. Terlebih saat pilkada dan tes masuk pegawai. Hal inilah yang disadari oleh Kantor Arsip Daerah (Karsipda) Kota Bekasi akan arti pentingnya arsip sebagai bukti pertanggungjawaban publik sekaligus sebagai bukti hukum di pengadilan. Karena palsu tidaknya ijazah tersebut dapat dibuktikan pengadilan, terutama dari arsip data kelulusan. Selama ini mungkin belum banyak, lembaga kearsipan daerah yang memperhatikan arti pentingnya arsip sekolah. Namun Karsipda Kota Bekasi sudah memulainya sejak tahun 2012.

SEKILAS KARSIPDA KOTA BEKASI

Karsipda Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 3 SeriE).

Kantor Arsip Daerah Pemerintah Kota Bekasi tersebut merupakan unsur lembaga teknis daerah yang dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Karsipda Kota Bekasi yaitu, pertama, membantu Walikota dalam koordinasi kewenangan Kantor Arsip Daerah di bidang penyusunan, pengelolaan, pemberian informasi, dan layanan kearsipan. Kedua, membantu Walikota dalam mengamankan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban berjalannya pemerintahan.

Ketiga, berupaya menertibkan penyelenggaraan dan pengelolaan arsip. Keempat, melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan dan penggunaan arsip statis. Kelima, membantu Walikota dalam melakukan pengendalian kearsipan serta memberikan pelayanan informasi kearsipan bagi yang memerlukannya.

Dengan kekuatan 4 orang arsiparis dan 17 staf, Karsipda Kota Bekasi mempunyai visi "Terpercaya dalam Pengelolaan Informasi Kearsipan". Sedangkan misinya adalah "Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi, membangun sarana Depo Arsip yang representatif, meningkatkan SDM kearsipan yang profesional, dan meningkatkan pelayanan kearsipan dengan mudah, cepat dan akurat".

Sejak 1 September 2013, Karsipda yang sebelumnya terletak di lingkungan perkantoran Pemda Kota Bekasi Jl Ahmad Yani secara resmi pindah ke Jl Raya Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Gedung yang terdiri dari tiga lantai tersebut selain digunakan ruang kantor struktural dan staf Karsipda juga sekaligus depo arsip.

ARSIP MASUK SEKOLAH

Selama Karsipda berdiri, banyak hal yang telah dilakukan dalam bidang



Kepala Karsipda Kota Bekasi Dra. Ani Tariny M.Si (kiri) saat diwawancarai oleh tim Majalah ARSIP

kearsipan, antara lain: pengumpulan dan pengklasifikasian arsip, pemilahan dan penataan arsip SKPD, pembinaan dan penataan kearsipan, monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan akuisisi arsip inaktif dan statis SKPD, pemeliharaan arsip inaktif dan statis SKPD, penataan gedung kantor arsip daerah pengadaan sarana dan prasarana kearsipan manajemen kearsipan berbasis teknologi informasi pemeliharaan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (Simkar), pengadaan Simkar, peningkatan kompetensi kearsipan, dan penyelenggaraan bimtek kearsipan sosialisasi kearsipan. Pada tahun 2008, Karsipda juga pernah mengadakan Lomba Kearsipan yang dihadiri oleh Kasubdit Kearsipan Daerah IANRIsaat itu Bapak Supriyadi (alm).

Menurut Kepala Karsipda Kota Bekasi Dra. Ani Tariny M.Si., saat ini eksistensi Karsipda Kota Bekasi juga sudah mulai diperhitungkan. Hal ini

terlihat dari adanya permintaan tenaga kearsipan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan permintaan pembenahan arsip dari RSUD Bekasi. Bahkan pada tahun 2015 nanti status Kantor akan ditingkatkan menjadi Badan bergabung dengan Perpustakaan menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda).

Pada tahun 2012, Karsipda mulai melakukan terobosan, yaitu mulai melirik ke arsip sekolah, melalui program Arsip Masuk Sekolah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyelamatkan keberadaan arsip di sekolah-sekolah. Karena selama ini kearsipan di sekolah belum tersentuh oleh pembinaan langsung dari pemda. Padahal sekolah merupakan pencipta arsip, khususnya arsip vital yang bersifat permanen dan harus disimpan selamanya. Program ini juga didukung oleh banyaknya permintaan dari sekolah, baik SMPN maupun SMKN/SMAN, untuk dilakukannya kegiatan pemilahan dan penataan arsip.

Sejak program tersebut dilaksanakan pada bulan November 2012 hingga saat ini, jumlah sekolah yang telah dibina kearsipannya, yaitu mencapai 25 SMPN, 17 SMAN, dan 11 SMKN (total 53 sekolah). Implementasi program Arsip Masuk Sekolah yang dibiayai APBD Kota Bekasi, yaitu pembinaan dan penataan arsip sekolah dan bimbingan teknis kearsipan dengan menghadirkan tenaga kearsipan dengan narasumber dari ANRI, Inspektorat, dan Karsipda, agar sekolah menerima langsung wawasan/pengetahuan dari yang berkompeten dan juga dapat praktek langsung dan melihat suasana Depo Arsip. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi Program Arsip Masuk Sekolah, yaitu agar semua penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi dapat memahami dan melaksanakan tertib administrasi terutama dari arsip-arsip sebagai bukti rekaman kegiatan dan bahan pertanggungjawaban dapat tercapai secara maksimal.

Namun, program Arsip Masuk Sekolah tersebut bukannya tanpa kendala. Menurut Kasie Pengelolaan Arsip Dra. Eli Sulaeliah, beberapa hambatan yang sering ditemui, antara lain belum tersedia ruangan khusus untuk *record centre* di sekolah, pengelola khusus kearsipan yang belum ada, dan kurangnya dukungan dana dari sekolah.

Semoga ke depannya program Arsip Masuk Sekolah akan tetap berjalan serta lebih luas jangkauannya, sehingga tidak menutup kemungkinan program tersebut dapat dicontoh oleh lembaga kearsipan daerah lainnya di Indonesia. (agg/ida)



Achmad Dedi Faozi :

BAPAKKU, PAHLAWANKU...

Minggu pagi, di Stasiun Kereta Api *Commuter Line* Jakarta. Di ujung kanan peron, tampak calon penumpang menunggu kereta KRL Jabodetabek ke arah Bogor. Di tengah keramaian hilir mudik aktivitas manusia, aku melihat seorang bapak dengan perawakan kurus, kulitnya berwarna cokelat karena terlalu kerap disapa sengatan matahari. Ia mengenakan kaos lusuh dengan warna yang telah memudar. Wajahnya tampak linglung sedang matanya berkaca-kaca. Ia menggendong anak bungsunya yang berumur tiga tahun dengan sarung lusuh miliknya yang telah lama dimakan masa. Anak laki-laki sulungnya yang berusia enam tahun terlihat letih, digenggam tangan kirinya erat oleh sang bapak. Anak bungsu yang digendongnya terlihat lelap tidur di dekapan bapaknya, akan tetapi janggal, kaki anak yang

digendongnya terlihat tak bergerak sedikit pun, tak ada senggalan napas yang berembus dari balik gendongan.

Ketika KRL Jabotabek jurusan Bogor datang, bapak dan anak bersiap memasuki kereta. Tiba-tiba seorang pedagang teh botol menghentikan langkah sang bapak.

“Pak, anaknya sudah meninggal, ya?” lelaki paruh baya yang akrab dengan debu jalanan itu dengan polosnya membenarkan bahwa anak yang digendongnya sudah menghadap sang Khalik. Tak kuat dia menahan isak tangis sambil terus menceritakan keinginannya untuk membawa anaknya ke Bogor agar dimakamkan di sana. Spontan seluruh calon penumpang KRL dan orang-orang di sekitar stasiun yang mendengar penjelasannya langsung berkerumun. Tidak lama, seorang di

antara pengerumun menyarankan agar lelaki dengan kedua anaknya itu dibawa ke kantor Polisi Tebet. Seluruh khalayak di stasiun membenarkan saran itu.

“Apa yang kamu lakukan atas anakmu itu?” salah seorang polisi dengan sangar bertanya, sedangkan seorang polisi lainnya mengetik Berita Acara Pemeriksaan. Rupanya polisi yang menginterogasi itu curiga si anak adalah korban kejahatan orang tuanya. Terpaksa lelaki lusuh itu meladeni pertanyaan-pertanyaan aneh yang dilayangkan polisi. Ia terisak berkali-kali mengatakan bahwa si anak tewas karena penyakit Muntaber. Ia pun menceritakan secara lengkap kenapa ia menggendong mayat anak bungsu kesayangannya.

Minggu pagi memang bukan hari yang indah bagi sang Bapak,

pria berusia 38 tahun seorang duda dengan dua anak yang berprofesi sebagai pemulung. Lelaki malang itu ditinggalkan istrinya karena tidak tahan hidup sebagai pemulung, entah dimana sekarang ibu dari dua anak itu berada. Sejak berpisah dengan istrinya, bapak dua anak itu hidup menggelandang bersama kedua buah hatinya menyusuri jalanan Ibukota.

Gerobak yang biasa digunakannya untuk bekerja, dibuat tertutup di bagian tengahnya untuk tempat tidur dan berlindung dua anaknya. Di bagian depan gerobak dibuat kotak yang digunakan untuk menyimpan baju dan keperluan anaknya. Gerobak modifikasi ala kadarnya itu selalu mangkal di halte bus kota. Jika sedang hujan, gerobaknya dibawa ke halte, agar anak-anaknya tidak kehujanan.

Setelah lelah mencari sampah seharian di bawah kolong rel kereta api, ia tertidur lelap. Sesaat, sang bapak terbangun. Ada yang berbeda pada pagi itu, anak bungsunya terlihat nyaman dan tenang tidur di dalam gerobaknya. Namun, wajahnya yang tampak pucat pasi membuat ia curiga. Ia pun berusaha membangunkan anak bungsunya itu.

Melihat anaknya terbujur kaku, pikirannya melayang pada beberapa waktu lalu saat ia tak jadi membawa anak bungsunya ke rumah sakit karena penyakit muntaber yang dideritanya. Miris, uang yang tersisa di kantong hanya lima ribu rupiah. Hanya doa yang bisa dipanjatkannya agar si bungsu segera sembuh dengan sendirinya.

“Saya cuma sekali bawa anak saya ke puskesmas, Saya tak punya uang untuk berobat lagi. Saya memulung kardus, gelas dan botol plastik. Penghasilan saya hanya sepuluh ribu rupiah sehari. Saat itu uang saya tinggal lima ribu rupiah. Jika saya berobat, anak saya satu lagi mungkin tidak akan makan,” ungkap sang bapak kepada polisi, tak kuasa ia membendung air matanya.

Belum selesai menjelaskan, pikiran sang bapak kembali melayang, tangisnya pun kembali pecah seketika.

“Saya hanya punya uang enam ribu rupiah sekarang. Tidaklah mungkin untuk membeli kain kafan, menyewa ambulans dan biaya pemakaman.” paparnya kembali.

Sementara itu, anak bungsunya yang tak lagi bernyawa, masih terbaring di gerobak. Sang bapak tak mau lagi mengecewakan anak gadisnya itu.

“Bapak akan buat pemakaman seperti orang lainnya buatmu, Nak,” ucap sang bapak bertekad dalam hati. Ia pun langsung mengajak anak sulungnya berjalan membawa gerobak berisi jenazah adiknya ke Stasiun KRL. Naik kereta api, ia berniat menguburkan anak bungsunya di kampung pemulung di Bogor. Ia berharap di sana mendapatkan bantuan dari sesama pemulung, dengan bermodalkan sarung lusuh dan kotor, iamembungkus jenazah anak bungsunya dengan kaus warna putih lusuh yang biasa ia pakai.

Mendengar penjelasan lelaki paruh baya yang dilanda kemalangan itu, polisi belum langsung percaya dan memaksa membawa jenazah itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisipun menyuruh sang bapak agar membawa anaknya ke rumah sakit dengan menumpang mobil ambulans hitam. Ia tidak mengerti, kenapa polisi tidak ada yang bertanya apa yang dapat mereka bantu kepadanya. Seandainya mereka semua itu bisa membantu. Bukannya mengirimkannya ia dan anaknya ke rumah sakit.

Di rumah sakit, cerita sang bapak dan mayat anaknya terus berlanjut. Dengan alasan autopsi, pihak rumah sakit bermaksud menahan mayat anaknya yang sudah terbujur kaku. Mendengar hal itu, ia pun geram, ia tidak mau anaknya dibelah-belah hanya untuk kepentingan medis. Masalahnya, ia tidak punya uang untuk biaya otopsi itu, selain itu sang bapak kasihan melihat mayat putrinya yang sudah tenang dibedah. Ia pun ngotot membawa anak kesayangannya keluar. Ayah anak malang itu tetap ngotot meminta agar mayat si bungsu bisa segera dimakamkan tapi apa daya kemampuan bicara dan keadaannya tidak bisa mendukung alibinya, ia pun menerima dengan pasrah dan

terpaksa menyetujui usul sang polisi.

Di rumah sakit, sang bapak hanya bisa bersandar di tembok ketika menantikan surat izin pulang dari rumah sakit sambil memandangi mayat anaknya yang terbujur kaku dipangkuannya. Hingga saat itu sang kakak yang belum mengerti kalau adiknya telah meninggal masih terus bermain sesekali memegang tubuh adiknya yang terbujur kaku. Waktu berselang, mayat anak bungsu kesayangannya itu akhirnya diperbolehkan dibawa keluar rumah sakit dengan cara digendong.

“Ke mana sang anak harus dikuburkan?” pertanyaan itu menghujani pikiran sang bapak. Dalam keadaan bingung, ia membopong mayat anaknya ke jalanan tanpa arah, tanpa tujuan. Sejumlah sopir ambulans sempat menawarkan jasa untuk mengangkut mayat itu. Jasa? Ya, jasa di Jakarta berarti uang. Sopir ambulans mengurungkan jasa itu begitu mendengar sang bapak tidak punya uang untuk membayar.

Orang kecil seperti ditakdirkan berteman dengan orang kecil. Para pedagang sekitar rumah sakit serta beberapa orang lagi yang kebetulan ada di trotoar, mulai urunan ikut menyumbang dengan memberi uang sekedarnya untuk kemalangan yang dialami sang bapak dan keluarganya. Merasa cukup punya uang dari sedekah, ia memanggil bajaj. Ia tiba-tiba teringat seorang teman lama, ibu pemilik rumah petak yang pernah disewanya beberapa tahun lalu. Bajaj pun meluncur ke rumah petak di wilayah selatan Jakarta. Sesampai di rumah Ibu pemilik rumah petak tersebut, sang bapak dengan hati sedih menceritakan bahwa ia mengendong mayat anak bungsunya dan tidak tahu mau kemana lagi ia harus membawa mayat anaknya untuk dimakamkan. Mendengar cerita itu ibu pemilik rumah petak itu menetasakan air mata. Perempuan mana yang tidak menangis mendengar kisah sedih di hari Minggu itu?

Tubuh mungil dalam balutan kain sarung warna merah kekuningan yang sudah lusuh itu lantas direngkuh

dari dekapan ayahnya. Mayat itu lalu dibaringkan di atas kasur tipis yang berada di ruang tamu rumahnya. Wanita berusia 40 tahun itu lalu meminta bantuan tetangganya. Warga setempat akhirnya dengan tulus membantu mengurus jenazah, ada yang membeli kain kafan, ada yang memasang bendera kuning di sudut-sudut gang, ada yang berdoa dan memandikan. Keesokan harinya, putri bungsu sang bapak dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU), anak bungsu kesayangannya itu pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, diantar orang-orang miskin yang kaya amal. Bertuliskan nama Cemara, yang biasa dipanggil Ara oleh ayah dan kakaknya.

Ya, Ara, itulah namaku dari bapakku yang berprofesi sebagai seorang pemulung yang berusaha memakamkan aku ditempat yang layak. Bapak adalah sosok orang yang kaya bagiku bukan kaya materi, tapi kaya akan hati. Beliau adalah pahlawan bagiku meskipun tubuhku sudah terbujur kaku dipelukannya. Ia tetap berusaha mencarikanku tempat

yang layak walaupun disangsikan oleh orang-orang lainnya. Nasib, iya nasib keluargaku sebagai pemulung yang tidak berkecukupan. Akan tetapi, aku, bapakku, dan kakakku adalah orang yang bersemangat, bersemangat dengan pantang menyerah menjalani hidup. Hingga pada akhirnya Tuhan rupanya turun tangan menyelamatkan aku untuk dipanggil dan menghadap ke haribaan-Nya.

Esoknya kisah tentangku dan bapakku yang seorang pemulung, bak cerita dari negeri dongeng, menyentak banyak orang di seluruh Indonesia. Berbagai media cetak dan televisi mengangkat beritaku menjadi *headline* berita mereka. Berbagai kalangan menyatakan berniat menyumbang, dari sekedar memberi dana, memberi pekerjaan pada bapakku, sampai membiayai sekolah kakakku. Pendek kata, cerita piluku itu mengusik naluri masyarakat yang kini semakin materialistis menjadi bersimpati atas nasib malang yang menimpa keluargaku yang seorang pemulung. Seandainya tidak ada

hari Minggu, mungkin ceritaku dan bapak tidak pernah menjadi *headline* sebuah koran Ibukota. Seandainya, biaya rumah sakit bisa gratis seperti yang dikatakan janji para calon legislatif pada saat kampanye pemilihan umum, ceritaku ini tidak akan pernah terjadi. Ah, seandainya biaya pemakaman dan harga kain kafan, semurah kita membeli kerupuk, tidak akan ada kisah sedihku disini. Seandainya, dan seandainya aku tahu ini hanyalah mimpi tidur semalam, bapak pasti masih bisa mengajak aku dan kakak jalan-jalan ke sebuah taman dengan gerobak rumahku sambil bercengkrama menikmati dunia yang indah ini. Seandainya.

*(Cerpen ini diinspirasi oleh kisah nyata seorang pemulung)

ANRI TUJUAN STUDI BANDING PUSJARAH TNI



Tim Pusat Sejarah TNI saat berkunjung ke bagian restorasi arsip

Jakarta, ARSIP - 2 Juli 2014, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan didampingi oleh Direktur Preservasi, Imam Gunarto menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Brigjen Zaedun terkait dengan peningkatan kemampuan dan wawasan tentang kearsipan. Dalam sambutannya, Mustari menyatakan fungsi ANRI ada dua yaitu penyimpanan dan pembinaan. Fungsi penyimpanan mulai dari akuisisi, pengelolaan, preservasi sampai pada penyajian arsip. Sedangkan fungsi



pembinaan dilakukan kepada instansi pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), serta perguruan tinggi negeri agar pengelolaan arsip berlangsung dengan baik.

Kapusjarah TNI beserta staf didampingi Kepala ANRI meninjau langsung ke Bagian yang menjadi core business ANRI antara lain ke Bagian Restorasi Arsip, Bagian Penyimpanan Arsip, dan Bagian Alih Media Baru Arsip. Tak luput dari kunjungan Kapusjarah TNI dan rombongan pun menyambangi Ruang Baca Arsip dan Diorama Sejarah Perjuangan Bangsa. (Rick)

ANRI RAIH PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jakarta, ARSIP - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan piagam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7). Piagam diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Djoko Suyanto didampingi Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. Keberhasilan ini diraih setelah Ombudsman melakukan survei kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan ANRI beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya mengatakan bahwa, acara ini adalah momentum pencanangan untuk memperkuat komitmen negara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Sejak tahun 2013, pihaknya telah melakukan observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil yang didapat adalah tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik masih rendah," jelas Danang.

Lebih lanjut Danang mengungkapkan bahwa untuk tingkat kementerian kepatuhan hanya 22,2 persen. Selanjutnya untuk tingkat lembaga negara kepatuhannya hanya 27 persen. Sedangkan tingkat



Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Djoko Suyanto menyerahkan piagam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7)

pemerintahan daerah, kepatuhan 10,5 persen. "Dengan keadaan seperti ini secara langsung mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktik-praktik pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai daerah," tambah Danang.

Pada tahun 2014, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan dan pengarahan khusus sejumlah Unit Pelayanan Publik baik di tingkat kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat pemerintah daerah. Hasilnya, 452 unit pelayanan publik pada 78 instansi negara masuk kategori patuh terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Rinciannya terdiri atas 25 Kementerian, 12 Lembaga, 178 SKPD Provinsi dan 237 SKPD Kota.

Sementara Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam sambutannya sebagai *keynote speaker* mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan baik di pusat dan di daerah, namun bukan hanya itu, karena sesungguhnya *public service* merupakan wajah negara dalam setiap kali berinteraksi dengan pemberi mandatnya, yaitu rakyat. "Pelayanan publik adalah alasan mengapa pemerintahan dan negara itu ada," jelas Djoko. (Rick)

BANGUN SINERGITAS, UI DAN ANRI TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA



Nota Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met dan Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA di Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok, Selasa 22 Juli 2014.

Depok, ARSIP - Guna membangun sinergitas di bidang kearsipan, Universitas Indonesia (UI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Kearsipan di Lingkungan Universitas Indonesia. Nota Kesepakatan Bersama ditandatangani Rektor UI Muhammad Anis dan Kepala ANRI Mustari Irawan, di Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok (22/7).

Dalam Sambutannya Mustari mengungkapkan bahwa pentingnya

membangun sinergitas di antara kedua lembaga antara UI dengan ANRI sehingga akan memperoleh manfaat di masa mendatang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Mustari menambahkan pentingnya membangun arsip perguruan tinggi (*university archives*). “Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pada pasal 27 dikatakan bahwa setiap perguruan tinggi negeri diwajibkan membangun arsip perguruan tinggi, kalau di dalam konsep kearsipan ini yang disebut dengan *university archives*,” ungkapnya. Kepala ANRI juga mendukung dengan berdirinya

arsip perguruan tinggi di Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Anis mengutarakan harapannya terhadap kerja sama tersebut. “Mudah-mudahan melalui kerja sama ini, UI bisa membangun dengan apa yang disampaikan (Kepala ANRI) dan UI harus menjadi trend setter untuk lebih cepat lagi prosesnya dalam mewujudkan pusat arsip UI untuk menjadi suatu *prototype* yang bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya,” jelasnya. (sa)

ARSIP KRIS BIANTORO, KINI TERSIMPAN DI ANRI



Penyerahan arsip Kris Biantoro oleh pihak keluarga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili Direktur Akuisisi Kandar. (16/8)

Jakarta, Arsip - Bertempat di kediaman Kris Biantoro, Cibubur Jakarta Timur dilaksanakan penyerahan arsip Kris Biantoro. Arsip tersebut diserahkan pihak keluarga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Kandar selaku Direktur Akuisisi Arsip. Acara penyerahan arsip dilaksanakan di sela-sela acara mengenang setahun berpulanginya Kris Biantoro (16/8). Arsip yang diserahkan antara lain arsip foto, video, dan tekstual mengenai penghargaan-penghargaan yang telah diterima Kris Biantoro, aktivitas Kris Biantoro, dan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kris Biantoro.

Setelah acara penyerahan arsip, ANRI atas nama negara memberikan piagam penghargaan kepada pihak



Suasana acara penyerahan arsip Kris Biantoro

keluarga besar Kris Biantoro dalam rangka Pelestarian dan Penyelamatan Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Penyerahan

penghargaan diberikan Kandar kepada pihak keluarga Kris Biantoro.

Christopher Soebiantoro atau lebih dikenal di masyarakat Kris Biantoro adalah seniman multi talenta yang pernah menggeluti dunia pembawa acara, pemain film, pencipta lagu dan penyanyi. Kecintaan

Kris di dunia seni juga dibarengi dengan kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Kris pernah menjadi relawan dalam pembebasan Irian Barat atau Operasi Trikora. Pelantun lagu "Mungkinkah" ini menghembuskan nafas terakhir pada 13 Agustus 2013. (sa)

KEPALA ANRI BERI ANUGERAH DELAPAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014

Jakarta, Arsip - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, telah menganugerahkan arsiparis teladan tingkat nasional (17/8) kepada delapan terbaik peserta pemilihan arsiparis teladan tahun 2014 di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2 ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini ada empat terbaik arsiparis tingkat ahli dan empat arsiparis tingkat terampil yang dianugerahkan sebagai arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014. Sebelumnya, sebanyak 46 peserta yang terdiri dari 19 orang arsiparis tingkat ahli dan 27 orang arsiparis tingkat terampil telah mengikuti berbagai tahapan tes yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara dan presentasi kinerja. Para peserta berasal dari perwakilan provinsi dan instansi pusat.

Berikut adalah para pemenang arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014:

Arsiparis tingkat ahli:

Juara I : Dodi Setiawan (Kementerian Luar Negeri)

Juara II : Lastur Wahyudi (Pemerintah Prov. Jawa Tengah)

Juara III : Kris Hapsari (ANRI)

Harapan : Emi Ruliani (BPPT)

Arsiparis Tingkat Terampil:

Juara I : Fistria Agustina (Kementerian pendidikan dan Kebudayaan)

Juara II : Rita Umami (Pemerintah Prov. Jawa Tengah)

Juara III : Nurul Muhammad (Kementerian ESDM)

Harapan : Edar Santoso (Pemerintah DIY)



Foto bersama para peserta pemilihan arsiparis Teladan tahun 2014 dengan pimpinan ANRI (17/8)

Dalam sambutannya usai memberikan penganugerahan kepada para pemenang, Mustari menyampaikan bahwa arsiparis memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dan eksistensinya pun secara resmi diakui dan diatur dalam undang-undang. "Misalnya arsiparis yang bertugas di Kementerian Luar Negeri, memiliki salah tugas dalam mengelola arsip perjanjian internasional. Keautentikan arsip tersebut pun harus terjaga dan di sini arsiparis mengambil peranan. Selain itu bagi arsiparis di tingkat daerah juga memiliki peranan dalam menyelamatkan memori kolektif daerah," jelas Mustari. Menutup sambutannya, Mustari pun berharap bahwa para arsiparis teladan ini dapat dijadikan contoh baik dari sisi etika, sikap maupun perilaku bagi para profesional di komunitas kearsipan.

Kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014 ini merupakan salah satu wujud peran serta ANRI dalam memberikan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan yang diharapkan dapat terus

meningkatkan kualitas SDM kearsipan khususnya arsiparis yang kompeten, handal, berdedikasi dan berkinerja baik. Selain itu, kegiatan pemilihan arsiparis teladan pun menjadi salah satu ajang untuk memberikan apresiasi kepada arsiparis atas pengabdian dan jasanya terhadap bidang profesi kearsipan. Dengan demikian para arsiparis teladan ini dapat dijadikan contoh keteladanannya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Selama mengikuti rangkaian kegiatan acara yang berlangsung mulai 16 s.d 18 Agustus 2014, keseluruhan peserta turut didampingi para pejabat pembina kearsipan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam pembinaan serta pengadaan bahan dan barang untuk menunjang kegiatan kearsipan.

Rangkaian kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014 diakhiri dengan diikutinya acara silaturahmi para teladan nasional dengan Presiden Republik Indonesia di J.I. Expo kemayoran pada 18 Agustus 2014. (TK)

KETUA AAI LANTIK DAN KUKUHKAN PENGURUS IAA 2014-2017



Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), DR. Andi Kasman saat melantik Pengurus Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) periode 2014-2017 di RSB Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, ANRI (18/8)

Jakarta, Arsip - Senin (18/8), Pengurus Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) periode 2014-2017 secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Andi Kasman di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Acara ini dilaksanakan bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 AAI Tahun 2014 yang diikuti oleh kalangan komunitas kearsipan Indonesia dari pihak pemerintah, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, dan swasta.

Acara juga dihadiri para peserta kegiatan Arsiparis Teladan 2014 yang diselenggarakan ANRI. Pelantikan dan pengukuhan ini secara resmi memantapkan kedudukan pengurus IAA yang telah dipilih melalui proses

pemilihan Ketua IAA pada Maret 2014. Sebagai organisasi profesi kearsipan di level instansi, IAA diharapkan mampu menunjukan eksistensi melalui program-program yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi arsiparis dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun susunan Pengurus IAA Periode 2014-2017 antara lain:

Ketua : Bambang P. Widodo

Wakil Ketua : Dharwis W.U. Yacob

Sekretaris : Aria Maulana

Sekretaris I : Widhi Setyo Putro

Sekretaris II : Sri Wahyuni

Bendahara Umum : Wiwi Diana Sari

Wakil Bendahara : Okta Handi S.

Bidang Edukasi & Pengembangan Profesi

1. Krihanta
2. Rudi Andri Syahputra

Bidang Penelitian & Publikasi Profesi

3. Nadia Fauziah Dwiandari
4. Adhie Gesit Pambudi

Bidang Kerjasama & Pengembangan Usaha

1. Nurarta Situmorang
2. Satimin

Bidang Advokasi & Penegakkan Kode Etik

1. Sutarwinarmo
2. Tuti Sriwidayanti

(AGP).

HADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, ANRI SIAPKAN ARSIPARIS PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. Andi Kasman M, S.E., M.M. memberikan sambutan pada acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014. (20-21/8)

Jakarta, Arsip - Guna menghadapi *Asean Economic Community* (AEC) tahun 2015, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempersiapkan arsiparis profesional dan berintegritas tinggi. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman pada acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014.

“Sudah sepatutnya ANRI ikut mempersiapkan diri pada acara internasional tersebut, salah satunya mempersiapkan arsiparis profesional dan berintegritas tinggi, sehingga tahun 2014 ditargetkan akan mensertifikasi arsiparis sebanyak 450 orang baik arsiparis tingkat terampil maupun tingkat ahli” ujarnya. Lebih lanjut Andi menambahkan bahwa



Peserta acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014.

sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan formal kepada sumber daya manusia kearsipan oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan.

Ujian Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis

dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2014 di Kantor ANRI Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Peserta ujian sertifikasi diikuti arsiparis tingkat terampil pada kementerian/lembaga pemerintah pusat berjumlah kurang lebih 75 orang arsiparis yang berasal dari 19 instansi.

Penyelenggaraan sertifikasi arsiparis merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012, ayat (1) bahwa ANRI menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) Sertifikasi Arsiparis dilaksanakan terhadap arsiparis yang mengikuti uji kompetensi berdasarkan peraturan pemerintah. (sa)

PRAMONO ANUNG BUKA PAMERAN ARSIP BOEDI OETOMO

Jakarta, ARSIP - Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Pramono Anung Wibowo membuka secara resmi Pameran Arsip Boedi Oetomo yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat (21/8). Pameran yang diselenggarakan atas kerja sama ANRI, *National Archives of the Netherlands* (NAN), Erasmus Huis dan majalah *Historia* ini dilaksanakan mulai 21 s.d 30 Agustus 2014. Dalam kesempatan ini turut hadir pula Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Wouter Plomp, Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA., Director of NAN Prof. Dr. K.J.P.F.M. Charles Juergens dan Pemimpin Redaksi Majalah *Historia* Bonnie Triyana.

Dalam sambutan pembukaannya Pramono menyampaikan bahwa melalui pameran arsip tentang Boedi Oetomo kita dapat banyak belajar, Boedi Oetomo telah menginspirasi pergerakan dan perjuangan bangsa kita dan tentunya *the founding fathers*. "Melalui pameran ini semoga kita diingatkan kembali dengan kiprah Boedi Oetomo sehingga mampu membangkitkan rasa percaya diri bangsa kita, mampu mempertahankan nasionalisme dan siap menghadapi globalisasi," jelas Pramono.

Selain itu, Mustari pun mengungkapkan bahwa melalui pameran arsip ini kita dapat melihat dan mengingat kembali keberadaan Boedi Oetomo yang sangat penting bagi Indonesia yang memberikan pengaruh kepada para pemuda yang menghendaki perubahan fundamental agar tidak bergantung kepada orang lain. Peran dan kiprahnya mampu memupuk rasa nasionalisme. "Ada



Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. Pramono Anung Wibowo pada 21 Agustus 2014 membuka secara resmi Pameran Arsip Boedi Oetomo yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat



Pramono Anung saat meninjau Pameran Arsip Boedi Oetomo

beberapa arsip di antaranya tentang Boedi Oetomo, tokoh-tokoh pendiri dan tempat kongres yang dipamerkan di sini," jelas Mustari.

Dalam kesempatan ini, Juergens menyampaikan bahwa pameran arsip Boedi Oetomo tidaklah disiapkan dalam waktu yang singkat. Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kegiatan

penelusuran arsip baik di Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan Boedi Oetomo. "Di sini pun melibatkan arsiparis asal Indonesia yang mencari arsip terkait di Belanda," tambah Juergens. Juergens pun berharap bahwa ke depannya kerja sama yang dilakukan ini tidak hanya sebatas pameran tetapi juga berkaitan dengan penelitian, preservasi, digitalisasi dan akses arsipnya. Senada halnya dengan yang disampaikan Juergens, Wouter Plomp pun menyampaikan bahwa kerja sama yang telah terjalin ini dapat diteruskan tidak hanya sebatas pada pameran. "Apalagi Belanda dan Indonesia memiliki keterkaitan dengan masa lalu," tambah Plomp. (TK)

ANRI LAPORKAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN TA 2013 KE KOMISI II DPR RI



Rapat Dengar Pendapat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan komisi II DPR RI

Jakarta, ARSIP - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan tanggapan yang positif terkait dengan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 keempat mitra kerjanya di pemerintahan yaitu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama keempat kementerian dan lembaga Negara tersebut di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8) malam.

“Walaupun hingga Agustus 2014 penyerapannya baru mencapai 70 persen yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Masih ada waktu bagi keempat mitra kerja untuk menyerap anggaran hingga seratus persen. Hal tersebut semata agar program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai harapan,”sebut Achmad Muqowam, anggota Komisi II DPR RI.

Sementara itu untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 sesuai dengan nota keuangan yang dianggarkan oleh mitra kerjanya, di mana hampir semua melakukan peningkatan anggaran yang cukup signifikan.

ANRI mengalami kenaikan sebesar 55 Miliar atau sekitar 47 persen dari pagu kementerian/Lembaga tahun 2014 yang telah direvisi. Untuk hal tersebut politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai hal tersebut sangatlah wajar. Mengingat mitra kerja komisi II tersebut dapat dikatakan ruh atau jiwa dari pemerintah secara keseluruhan. “Kenaikan atau peningkatan anggaran yang diminta itu tidak seberapa atau masih tergolong hal yang wajar,” ungkapnya.

Muqowam juga mengingatkan agar ANRI memberikan manfaat kepada lini pemerintahan, jangan hanya menjadi tempat penyimpanan arsip atau pusat sejarah. (Rick)

ANRI RAIH PREDIKAT B AKIP 2014, MOTOR PENGGERAK PEMBANGUNAN DI SEKTOR PUBLIK



Penyerahan Penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat (AKIP) oleh Wakil Presiden Boediono kepada Kepala ANRI Mustari Irawan. Pada tahun 2014 ANRI peroleh Prediket B

Jakarta, ARSIP - Para Pimpinan Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah menghadiri penyerahan Penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat (AKIP) oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta (24/9). Predikat B diperoleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Dalam sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/lembaga selama 2014 naik 1,04 dibanding tahun

sebelumnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi selama 2014 mencapai 59,04 meningkat dari tahun 2013 yang hanya mencapai 56,92.

"Ini berarti instansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan," ujarnya

Wakil Presiden RI, Boediono dalam sambutannya mengatakan sektor publik dapat menjadi motor penggerak, serta fasilitator pembangunan. Namun sektor publik dapat pula menjadi penghambat, unsur yang menggerogoti pembangunan.

"Ini yang perlu kita sadari. Kunci sekali peran dari sektor publik ini.

Dan hak tersebut akhirnya kembali ke reformasi masing-masing," ujar Boediono.

Selain penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah antara lain berdasarkan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan serta survei mengenai pelayanan instansi pemerintah terhadap berbagai lapisan masyarakat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, Boediono menyebut upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja instansi pemerintah terus dilakukan namun, Wapres mengakui banyak PR yang belum terselesaikan. (Fir)

PERERAT SIMPUL JARINGAN KEARSIPAN NASIONAL, ANRI BERIKAN PENGHARGAAN



Kepala ANRI saat memberikan sambutan pada acara Rakornas SIKN-JIKN (24/9)

Jakarta, ARSIP - Batavia Ballroom, Hotel de Rivier menjadi saksi bagi dua belas simpul jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang memperoleh penghargaan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan pada (24/9). Dalam kesempatan ini turut mendampingi Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Dini Saraswati serta Deputy Divisi *Business Service* PT. Telkom. Tbk, Yoyok Setyono.

Kedua belas simpul jaringan yang memperoleh penghargaan ini antara lain ANRI, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Unit Kearsipan Institut Pertanian Bogor, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Banten,

BAPD Aceh, BPAD Kota Denpasar, BPAD KAB. Lamongan, BPAD Kab. Banyuasin, Kantor Arsip Kab. Bantul, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, KPPDE Pemerintah Kota Cimahi dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor.

Dalam sambutannya Mustari mengharapkan semua instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Negeri dapat mempublikasikan kinerja yang dapat dilihat oleh masyarakat baik arsip statis maupun arsip dinamis melalui SIKN dan JIKN. Hal ini menjadi salah satu wujud transparansi kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

yang juga merupakan bagian dari konsep reformasi birokrasi dan inti terwujudnya *good governance*.

Pada kesempatan yang sama, Mustari pun mengharapkan program kearsipan melalui SIKN dan JIKN ini menjadi salah satu jawaban terhadap harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kinerja Kementerian Kabinet Indonesia Jilid I dan jilid II yang terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses masyarakat sebagai pertanggungjawaban nasional. Dengan demikian masyarakat dari berbagai pelosok tanah air dapat dengan mudah mengakses informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di setiap instansi tanpa membutuhkan waktu yang lama. (fir)

SERTIFIKAT UNESCO TARI SAMAN DAN NOKEN, DISERAHKAN KE ARSIP NASIONAL RI

Jakarta, ARSIP - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyerahkan sertifikat pengakuan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO) untuk Tari Saman sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan. Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah (25/9). Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis dengan estafet dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya diserahkan ke ANRI. Wiendu juga menyerahkan duplikasi sertifikat Tari Saman kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi oleh Kepala Daerah Gayo lues.

Wiendu mengutarakan makna penting acara penyerahan sertifikat. "Penyerahan tersebut (sertifikat) memiliki makna dan arti yang sangat dalam, paling tidak di tiga hal penting yaitu bahwa kita semua khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah istimewa Nangroe Aceh Darussalam yang paling dekat mempunyai hubungan lahir dan batin dengan Tari Saman tersebut mempunyai tanggung jawab, pertama adalah untuk perlindungan, yang kedua adalah untuk pengembangannya serta untuk pemanfaatannya" ujarnya.

Lebih lanjut Wiendu mengimbau kepada pemerintah provinsi Aceh untuk mensosialisasikan sertifikat pengakuan dunia terhadap Tari Saman



Wamendikbud bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyerahkan sertifikat pengakuan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO) untuk Tari Saman sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Kepala ANRI Mustari Irawan. (25/9)

ke kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa untuk dapat mendekatkan rasa kepemilikan masyarakat Aceh terhadap Tari Saman.

Tari Saman merupakan warisan budaya masyarakat Gayo yang dapat dilacak sampai abad ke-13 yang kemudian dikembangkan Syekh Saman, dan berisi tentang pesan-pesan moral. Tari Saman dilakukan oleh anak laki-laki dan orang-orang muda, selalu dilakukan dengan jumlah ganjil, duduk di atas tumit atau berlutut pada suatu baris yang rapat. Para pemain memakai kostum border hitam dengan motif gayo beraneka warna, yang melambangkan alam dan nilai-nilai luhur.

Selain penyerahan sertifikat pengakuan UNESCO terhadap Tari Saman, diserahkan pula Sertifikat pengakuan UNESCO terhadap Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda

Indonesia. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Turut hadir pada acara penyerahan sertifikat, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arief Rachman, Perwakilan UNESCO, dan komunitas masyarakat Aceh. Selain acara penyerahan sertifikat, di lokasi yang sama diselenggarakan Pameran Perjalanan Warisan Budaya Dunia Indonesia. (sa)

ARSIP HILANG, ASET MELAYANG!



Konferensi Pers Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kupang, 7 – 8 Oktober 2014

Kupang, Arsip - “Pengelolaan arsip yang baik, akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan menyelamatkan aset daerah, dengan demikian tidak ada lagi aset pemerintah di daerah yang hilang karena tidak dapat memberikan cukup bukti berupa arsip yang dimilikinya, kalau arsip hilang, maka aset kita bisa ikut hilang,” ujar Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kupang, 7 – 8 Oktober 2014.

“Bagi suatu daerah, aset memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan tentu saja harus didukung dengan tersedianya arsip aset. Oleh karena itu keberadaan arsip aset selain memiliki kekuatan hukum, ia juga memiliki nilai guna kepastian bagi kekayaan daerah, maka keberadaan arsip aset

harus dikelola secara baik dan benar,” lanjutnya.

Acara yang diprakarsai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bermaksud memberikan pemahaman akan arti pentingnya arsip aset dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dengan pemahaman tersebut akan mengantarkan pada kesadaran untuk mengelola arsip aset tersebut dengan baik.

Selain diikuti Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi/Kabupaten/ Kota di wilayah Timur yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi NTT, diwakili oleh Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Andreas Jehalu tersebut dihadiri

pula oleh perwakilan dari dinas yang membidangi pengelolaan kekayaan dan aset daerah di wilayah Timur serta beberapa LKD wilayah barat dan tengah sebagai peninjau, dengan jumlah 150 peserta. Dalam Sambutannya, Andreas menyambut baik kegiatan Bimtek tersebut dan mengharapkan kegiatan Bimtek pengelolaan arsip aset dapat membawa manfaat yakni meningkatkan kemampuan dan keterampilan arsiparis di daerah dalam mengelola arsip aset.

Hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Umum Badan Pertanahan Nasional, H.M. Najib Taufieq, Kepala Biro Aset Daerah Provinsi NTT, Obaldus Toda, Direktur Kearsipan Daerah, Widarno, Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah I, M. Abdul Haris serta arsiparis ANRI. Acara ditutup secara resmi oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni. (lie)

GALANG MASUKAN, ANRI GELAR EKSPOS DRAFT NSPK PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESRA



Kepala ANRI saat membuka acara Ekspose Draft NSPK Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra

Jakarta, ARSIP - Guna memperoleh masukan dari terkait dalam penyusunan Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibang Siskar) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Ekspose Draft Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra. Acara diselenggarakan (9/10) di Ruang Noerhadi ANRI Ampera Raya Jakarta. Acara diikuti perwakilan enam urusan lembaga teknis terkait yakni urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, agama, kependudukan dan keluarga berencana, kearsipan, masalah sosial dan masalah kesehatan.

Dalam laporan Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis Rini Agustiani menyampaikan tujuan diselenggarakannya acara



Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Rudi Anton saat memberikan pemaparan mengenai pedoman retensi arsip

ekspos. “Tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman dan kesadaran pencipta arsip dalam pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, melalui penyusunan dan penetapan kebijakan penetapan jadwal retensi arsip”, ujarnya. Lebih lanjut Rini menambahkan bahwa

menentukan jadwal retensi arsip ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip yang disusun oleh kepala ANRI yang disusun oleh lembaga teknis terkait sebagaimana diamanatkan pasal 40 ayat 4 dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Acara ekspose dibuka langsung Kepala ANRI Mustari Irawan. Saat menyampaikan arahan, Mustari Irawan menyampaikan pentingnya pedoman retensi arsip. “Pedoman retensi arsip ini sangat penting sekali bagi kementerian/lembaga, karena menjadi dasar penyusunan jadwal retensi arsip” ungkapnya. Mustari mengutarakan harapannya atas diselenggarakannya acara ekspos. “Kami berharap dari tujuan ekspos draft NSPK Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra ini yang pertama adalah berusaha memperoleh masukan yang dapat dijadikan dasar dan juga merumuskan kesamaan konsepsi tentang retensi arsip”, imbuhnya.

Selain sektor Kes-ra, Pusjibang Siskar juga telah menyelenggarakan ekspose pem-bahasan draft Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Tahap III (7/10) dan Ekspose Pembahasan Draft Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tahap II (8/10). (sa)

GUBERNUR SUMUT: PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PERLU DITUNJANG PEMAHAMAN KOMPREHENSIF

Medan, Arsip - Aurora Ballroom, Hotel Grand Antares jalan Sisingamaraja nomor 328 menjadi saksi bisu dihelatnya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Provinsi Sumatera Utara (9/10). Sosialisasi yang dihadiri lebih dari 130 orang peserta ini terdiri dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah, Universitas dan Arsiparis di lingkungan provinsi Sumatera Utara.

"Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip merupakan pekerjaan yang perlu ditunjang dengan pemahaman yang komprehensif, tenaga yang profesional dan membutuhkan dukungan teknologi serta anggaran," ujar Gubernur Sumatera Utara yang sambutannya disampaikan Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi Sumatera Utara, H. Zulkarnain.

"Arsip tak bisa lagi dianggap sepele, apa yang kita kerjakan, bagaimana *performance* dan akuntabilitas akan dinilai dan ini harus dimulai serta dijalankan dari SKPD kita masing-masing untuk menjalankan kewajiban perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Provinsi Sumatera Utara (9/10)

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap publik," jelas Sekretaris Utama ANRI Gina Masudah Husni dalam sambutannya.

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI Zita Asih dalam paparannya menyatakan bahwa pembinaan kearsipan jangan hanya diartikan hanya dari pusat, lembaga kearsipan daerah dalam hal ini BPAD Sumatera Utara melakukan juga pembinaan terhadap SKPD dan kantor arsip kabupaten/kota, sinergi inilah yang diinginkan.

Sedangkan Direktur Kearsipan Daerah ANRI Widarno dalam materinya pada sesi kedua mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati rangking kedua terbawah dalam hal provinsi yang belum memiliki kantor kearsipan daerah kabupaten/kota. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, baru 11 kabupaten/kota yang memiliki kantor. Makna lembaga kearsipan adalah sebagai motor pemerintah daerah untuk menertibkan arsip sebagai pendorong transparansi dan menyokong akuntabilitas. (Rick)

SBY SERAHKAN DOKUMEN NEGARA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KE ANRI

Bogor, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan secara simbolis menerima arsip 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi (17/10) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan, Bogor. Pada kesempatan ini dilaksanakan pula penandatanganan berita acara serah terima arsip statis oleh Mustari Irawan dan Sudi Silalahi yang turut disaksikan Presiden SBY, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah serta para undangan. Arsip yang diserahkan berjumlah 500 bundel.

Usai pelaksanaan serah terima arsip, SBY meninjau display arsip yang telah diserahkan. Dalam kesempatan ini SBY mengajak Kepala ANRI beserta jajarannya untuk bersama-sama meninjau sambil memberikan beberapa wejangan yang amat penting. "Memimpin selama dua periode harus dipertanggungjawabkan kepada negara, hakikatnya kepada rakyat sehingga suatu saat jika akan melakukan penuluruhan sejarah, pembuatan buku-buku, riset, disertasi, tesis atau yang lainnya dokumen yang dibutuhkan itu ada di negara, dalam hal sesuai dengan Undang-Undang ANRI adalah lembaga resmi yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengelola, menyimpan dan mendayagunakan arsip ini," jelas SBY.

SBY juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada lagi polemik atau diskursus di kalangan masyarakat luas bahwa ada dokumen negara yang tidak jelas keberadaannya, tidak boleh terjadi lagi. Mengakhiri wejangannya, SBY berharap kepada ANRI agar dapat menggunakan arsip sebaik-baiknya.

Selain itu SBY pun menyampaikan pesan yang tidak kalah pentingnya



SBY saat menjelaskan arsip yang akan diserahkan ke ANRI kepada Kepala ANRI beserta jajarannya di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (17/10)



Penandatanganan berita acara serah terima arsip 10 Tahun Pemerintahan SBY oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi

bahwa dalam mengawali suksesi peralihan kepemimpinan, beliau mengawali dengan tradisi yang baik dengan menyerahkan dokumen negara kepada ANRI. "Dan ini dapat dikuiti bukan hanya tingkat Presiden tetapi juga tingkat lembaga negara, lembaga pemerintahan, kementerian, bahkan gubernur/kepala daerah suatu saat dapat menyerahkan arsip penting yang memiliki nilai sejarah yang

tinggi diserahkan kepada ANRI/ lembaga kearsipan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang," tambahnya.

Arsip 10 tahun pemerintahan Presiden SBY yang diserahkan di antaranya melingkupi regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, ratifikasi, perangkat hukum dan perjanjian internasional, dokumen kepresidenan seperti surat resmi dari dan kepada presiden, nota kesepahaman, himpunan naskah pidato, kumpulan artikel dan buku karya presiden, foto dan video.

Dalam usaha pengumpulan arsip tersebut yang dilaksanakan selama empat bulan dibentuk sebuah tim berdasarkan Keputusan Mensesneg Nomor 95 Tahun 2014 tanggal 30 Juli 2014. Tim diketuai oleh Sekretaris Militer Presiden.(TK)

TINGKATKAN DAYA SAING, BP BATAM JALIN KERJA SAMA DENGAN ANRI



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tandatangani Kesepakatan Bersama di Bidang Kearsipan. Acara penandatanganan dilaksanakan oleh Mustari Irawan selaku Kepala ANRI dan Mustofa Widjaja selaku Kepala BP Batam di Ruang Soemartini ANRI, Cilandak, Jakarta Selatan

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tandatangani Kesepakatan Bersama di Bidang Kearsipan (21/10). Acara penandatanganan dilaksanakan Kepala ANRI Mustari Irawan dan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja di Ruang Soemartini ANRI, Cilandak, Jakarta Selatan. Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut merupakan perpanjangan Kesepakatan Bersama ANRI dengan BP Batam Nomor: HK.02/20/2010 dan Nomor 17/PERJ-KABP/1020 tentang Pembinaan Bidang Kearsipan di Lingkungan BP Batam tanggal 1 November 2010.

Dalam sambutannya Mus-

tofa mengutarakan hal yang melandasi pelaksanaan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama. "Arsip merupakan salah satu sumber informasi terekam yang sangat penting dalam menunjang proses kegiatan administrasi, memudahkan pencarian data apabila diperlukan dalam waktu yang singkat, tepat, dan akurat", ungkapnya.

Mustari juga menyambut positif acara penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut. "Hal ini merupakan langkah positif pentingnya arsip dalam penyelenggaraan negara menuju *good governance* dan *clean government*" Ujarnya. Mustari juga mengapresiasi BP Batam atas perhatian dan komitmennya dalam penyelenggaraan

kearsipan dalam rangka meningkatkan daya saing bagi BP Batam.

Adapun program-program kerja sama yang akan dilakukan di antaranya, pertama pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis di BP Batam sesuai standar kearsipan. Kedua, penyelamatan dan pelestarian arsip statis BP Batam. Ketiga, pengembangan unit kearsipan. Keempat, pengembangan sarana dan prasarana kearsipan (pusat arsip). Kelima, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan di lingkungan BP Batam serta kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan. (sa)

LANTIK ESELON I, KEPALA ANRI: HARUS KREATIF, INOVATIF DAN KAYA IDE



Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Deputy Bidang Konservasi (Dekon) Arsip, M. Taufik (22/10) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan melantik Deputy Bidang Konservasi (Dekon) Arsip, M. Taufik (22/10) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari. Dekon terpilih merupakan buah dari serangkaian proses *open bidding* sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan beberapa pesan khusus di antaranya Dekon yang telah dilantik harus kreatif, inovatif, kaya ide/

gagasan, dan membuat program dan kegiatan nyata yang berguna atau langsung dirasakan manfaatnya oleh publik.

“Adapula beberapa tugas yang harus segera dilaksanakan, di antaranya akuisi arsip kepresidenan yang belum lama diserahkan presiden SBY, pembangunan arsip kepresidenan (*Presidential Archive*) di Gedung Arsip Gajah Mada, pengajuan arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok untuk mendapatkan pengakuan sebagai *Memory of the*

World, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah *International Council of Archive* dan serangkaian kegiatan lainnya,” jelas Mustari.

Acara pelantikan ini dihadiri pula oleh Komisioner Komite Aparatur Sipil Negara, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), beberapa pejabat eselon I yang tergabung dalam paguyuban Kementerian PAN dan RB serta pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan ANRI. (TK)

MARI BERJUANG BERSAMA JADIKAN ARSIP KAA SEBAGAI WARISAN DUNIA!

Jakarta, ARSIP - Sebagai salah satu upaya menyebarluaskan nilai-nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi warisan dunia atau *Memory of The World* (MoW), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, ANRI (27/10).

Acara FGD yang dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan menghadirkan *keynote speech* Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Prof. Arief Rachman. Dalam paparannya, Arief menyampaikan bahwa keuntungan mendapatkan MoW bukanlah sesuatu hal yang bersifat material. Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang dikendalikan pola pikir untung keuangan.

“Pengajuan arsip KAA sebagai MoW karena kita ingin memiliki norma, kehidupan yang bermartabat dan nilai lebih sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Penominasian arsip KAA sebagai MoW banyak yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kita harus berjuang bersama-sama dengan tekun untuk menjadikan arsip KAA sebagai MoW,” papar Arief.

Pernyataan Prof. Arief tersebut senada halnya dengan pernyataan Kepala ANRI Mustari Irawan saat membuka acara. Mustari menyampaikan bahwa para penggagas penominasian arsip KAA sebagai MoW berupaya dengan keras untuk selalu menyediakan berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan KAA baik naskah, foto, dan film. “Marilah kita secara bersama-sama mewujudkan impian agar seluruh dokumentasi KAA yang ada dapat segera diimplementasikan ke forum internasional dan menempati posisi yang baik serta terhormat dalam MoW,” jelas Mustari.



Pemutaran arsip film Konferensi Asia Afrika di sela-sela acara FGD Mengembangkan Nilai-Nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi warisan dunia atau *Memory of The World* (MoW) (27/10)

Tak lama berselang setelahnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993 s.d 1998, Prof. Wardiman Djojonegoro menyampaikan paparan singkat tentang proses pengajuan dan perkembangan penominasian arsip KAA sebagai MoW. Wardiman juga menyampaikan beberapa usulan tentang program percepatan penominasian arsip KAA sebagai MoW.

Berbagai masukan dan saran dijamin dalam dua sesi diskusi FGD ini. Sesi pertama diskusi mengupas tema Nilai-Nilai KAA. Pada kesempatan ini hadir tiga orang pemateri yaitu Jackson Leung, saksi sejarah pelaksanaan KAA, sejarawan Mukhlis PaEni dan Ketua MoW Indonesia Prof. Bambang Subiyanto.

Sesi kedua membahas tema Progres Pengajuan Arsip KAA sebagai MoW dengan pembicara Deputy Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional Welmin Sunyi Ariningsih, Kepala Subdirektorat Sosial Budaya OINB Kementerian Luar Negeri,

Gulvan Alvero dan Kepala Operasional PT Jakarta Prima Digital Lavesh M. Santani.

Selain itu, seperti yang disampaikan Prof. Arief dan Mustari bahwa kita harus berjuang bersama menjadikan arsip KAA sebagai MoW, masyarakat umum pun dapat terlibat aktif. Mereka secara serempak dapat memberikan dukungannya dalam proses penominasian arsip KAA sebagai MoW dengan cara memberikan “like” pada film dokumenter KAA melalui [link http://youtube.be/-3dG7wB9Wcm](http://youtube.be/-3dG7wB9Wcm).

FGD yang bertajuk mengembangkan nilai-nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip KAA menjadi MoW dihadiri peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari KNIU, Komite MoW Indonesia, arsiparis, guru, dosen, komunitas sejarah, lembaga kearsipan daerah, Perguruan Tinggi, peneliti dan jurnalis. (TK)

ANRI TERIMA ARSIP BERNILAI GUNA SEJARAH DARI 13 PENCIPTA ARSIP

Jakarta, ARSIP - Bertepatan dengan peringatan ke-86 Hari Sumpah Pemuda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menerima arsip bernilai guna sejarah (statis) pada 28 Oktober 2014 yang berasal dari 13 pencipta arsip.

Acara penyerahan arsip dilaksanakan di Hotel Amaroosa, jalan Pangeran Antasari nomor 9A-B, Jakarta Selatan pukul 08.30. Arsip yang diserahkan akan diterima oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan bahwa arsip adalah aset yang paling berharga, merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.

“Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyerahkan arsip 10 tahun masa pemerintahannya di Istana Bogor (17/10). Beliau amat paham amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa semua lembaga negara, BUMN, Partai Politik,

dan Organisasi Kemasyarakatan, dan tokoh nasional berkewajiban untuk menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI,” jelas Mustari.

Adapun ketiga belas pencipta arsip yang menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Pencipta Arsip	Jenis Arsip yang Diserahkan di antaranya	Jumlah
1	Kementerian Luar Negeri	Penetapan batas zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga	10 boks
2	Kementerian Kesehatan	Berkas mengenai pengunduran diri Dr. Endang Rahayu, berkas mengenai kasus susu formula	1 boks
3	Sekretariat Kabinet	Surat Keputusan Presiden, Instruksi Presiden Tahun 2003-2007, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Gol IV c ke atas dan lain-lain	437 boks
4	ANRI	Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan, pelurusan Supersemar dalam rangka 36 tahun supersemar, penggunaan logo ANRI, wawancara sejarah lisan kembalinya GAM ke pangkuan ibu pertiwi dan lain-lain	15 boks
5	Lembaga Sandi Negara	Berkas personil mantan kepala lembaga sandi negara, berkas mengenai susunan organisasi jawatan sandi. dll	4 boks
6	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Arsip Foto mengenai semburan lumpur dari eksplorasi Banjar Panji 1, Lapindo Brantas inc, Kabupaten Sidoarjo, Arsip Peta mengenai wilayah kerja penanganan dan penanggulangan lumpur Lapindo, Arsip Video mengenai kunjungan kerja Presiden, Wapres, Menteri PU ke lumpur Sidoarjo	3 boks
7	PT. Taspen	Berkas pembentukan dan perubahan organisasi, anggaran perusahaan, hak kepesertaan, laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi. dll	14 boks
8	PT. Balai Pustaka	Berkas perjanjian kerja sama antara penerbit dengan penulis antara lain penulis AT. Mahmud	1 boks
9	Palang Merah Indonesia	Berkas Restoring Family Links (pencarian orang hilang dimasa peperangan)	23 boks
10	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Berkas hasil muktamar NU ke 28, hasil pleno PBNU Tahun 1994-1999, dll	15 boks
11	PP Muhammadiyah	Berkas pelimpahan wewenang penyelenggaraan SMU Muhammadiyah 1 ke Dikdasmen Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Pusat, saran masukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional kepada Muhammadiyah dalam Era Reformasi Damai dan Sukses Global di segala bidang, dll	11 boks
12	Tokoh Seni Pewayangan, Pangdam Guntur	Kongres Pedalangan Nasional, Kongres Nasional Pewayangan Indonesia, Kidung Pamuji yang dipersembahkan dalam rangka Kongres Bahasa Jawa, dll.	10 boks
13	Gubernur kedua DKI Jakarta, Henk Ngantung	Surat penghargaan dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atas jasa-jasa dalam pemikiran, perumusan, penciptaan Pataka Korra I	2 boks

Tabel mengenai tiga belas pencipta arsip yang menyerahkan arsip statisnya ke ANRI



Kepala ANRI saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Negara dalam Mendukung Pembangunan Bangsa dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan (28/10)

Serah terima arsip sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 53 dan Pasal 77. Selain itu, kegiatan tersebut pun senada dengan pesan SBY di Istana Bogor silam bahwa dalam mengawali suksesi kepemimpinan, diawali dengan tradisi yang baik dengan menyerahkan dokumen negara/ arsip kepada ANRI dan hal ini dapat dikuiti bukan hanya tingkat Presiden tetapi juga tingkat lembaga negara, lembaga pemerintahan, kementerian, bahkan gubernur/kepala daerah suatu saat dapat menyerahkan arsip penting yang memiliki nilai sejarah yang tinggi

diserahkan kepada ANRI/lembaga kearsipan.

Sebelum pelaksanaan serah terima arsip, tim akuisisi ANRI terlebih dahulu melaksanakan prosedur akuisisi arsip sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.

Dalam kesempatan yang sama digelar Rapat Koordinasi (rakor) Penyelamatan Arsip Negara dalam Mendukung Pembangunan Bangsa dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan. Dalam rakor dilaksanakan dua diskusi panel. Pembicara yang hadir di

antaranya Mohammad Iskandar, Puji Hastuti dan Prof. Dr. Emil Salim

Kegiatan rakor dihadiri 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan. Rakor berakhir pada pukul 16.00 WIB dan ditutup Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, M. Taufik. (TK)

YUDDY CHRISNANDI: PENYERAHAN ARSIP BUKAN HIMBAUAN TAPI PERINTAH



Kunjungan Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di lingkungan ANRI (29/10)

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan beserta jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI menerima kunjungan kerja (kunker) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Yuddy Chrisnandi (29/10) yang didampingi Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

Kegiatan kunker diawali dengan pemaparan tugas pokok dan fungsi ANRI oleh Mustari. Selanjutnya, menteri kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 ini menyampaikan beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas kinerja ANRI, khususnya dalam hal penyerahan arsip statis dari kementerian/instansi pemerintah tingkat pusat kepada ANRI.

Yuddy menyampaikan bahwa arsip nasional harus memiliki semua kategori yang termasuk arsip statis. Kita juga bisa menarik arsip kategori statis dari semua kementerian,



Yuddy Chrisnandi meninjau Ruang Baca sebagai tempat Layanan Arsip Statis

sehingga semuanya ada di sini."Mulai penataan di tingkat pusat dulu. Ini dapat dibuat target pada 34 departemen, lalu Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Penyerahan arsip bukan lagi himbauan tetapi ini sebuah perintah. Menpan hanya sebagai fungsi koordinasi, tetapi ANRI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, nanti dapat dibuatkan konsep surat dan aspek legal lainnya

yang dapat dikuatkan oleh Presiden tentang penyerahan arsip tersebut. Menpan bantu secara kelembagaan," tegas Yuddy.

Dalam kunjungannya, menteri yang akrab disapa Kang Yuddy ini juga memberikan apresiasi atas pelayanan publik yang telah dilakukan ANRI. "Saran saya, tingkatkan pelayanan yang sudah ada, agar lebih baik lagi," ujar Yuddy. Tak lupa, di tengah majunya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi Kang Yuddy juga berpesan agar laman kelembagaan milik ANRI informasinya harus selalu terbaru dan mudah diakses.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Yuddy menyempatkan melaksanakan peninjauan lapangan ke Ruang Baca sebagai tempat layanan arsip statis dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (TK)

IAA DAN HUMAS ANRI GELAR WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL POPULER DAN MENGENAL LEBIH DEKAT MAJALAH ARSIP

Jakarta, ARSIP - Selasa (4/11), Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) bekerja sama dengan Biro Perencanaan ANRI menyelenggarakan Workshop Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa dan Mengenal Lebih Dekat Majalah ARSIP sebagai Media Kearsipan Nasional. Acara yang dilangsungkan di Gedung C ANRI, Jakarta ini dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Pembukaan acara ini dihadiri oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni DAB jajaran Pejabat Eselon II ANRI, Pengurus IAA, narasumber dan para peserta. Workshop ini diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari arsiparis anggota IAA dan arsiparis non-anggota dari berbagai lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kantor Arsip dan Perpustakaan Prov. Bangka Belitung, Universitas Airlangga, dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan tentang pentingnya kemampuan arsiparis dalam menulis dengan mengkaitkan bidang kearsipan dengan isu-isu aktual yang terjadi di



Redaktur Majalah SWA, Teguh Poeradisatra saat memberikan pemaparan materi Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa

masyarakat. Arsiparis yang merupakan pakar di bidang kearsipan diharapkan tulisannya dapat dimuat di media massa nasional seperti harian Kompas khususnya untuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kearsipan.

Acara diawali dengan mengajak peserta workshop untuk mengenal lebih dekat peran dan fungsi Majalah ARSIP sebagai Media Kearsipan Nasional dengan pemaparan dari Azmi Ketua Dewan Redaksi Majalah ARSIP terbitan HUMAS ANRI. Acara dilanjutkan dengan kegiatan utama yaitu workshop yang dipandu oleh Teguh Poeradisatra dari

majalah SWA sekaligus Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Dalam pemaparan materi, Teguh Poeradisatra memberikan tips dan triknya dalam penulisan artikel populer bidang kearsipan di media massa.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi dengan penuhnya ruangan workshop dari awal hingga akhir acara. Para peserta merasakan dampak yang besar dalam peningkatan pengetahuan mereka dalam penulisan artikel populer di bidang kearsipan. (AGP).

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kearsipan Nasional bersumber dari Hasil Riset dan Kajian yang Ilmiah, Unggul dan Profesional yang dilakukan oleh Arsiparis dan Peneliti



Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI melalui **Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan** secara rutin melakukan penelitian dan pengembangan sistem kearsipan dalam bentuk riset/ kajian dan penyusunan NSPK di bidang sistem kearsipan dinamis dan sistem kearsipan statis, serta menerbitkan **Jurnal Kearsipan**



NSPK Kearsipan Nasional diharapkan dapat membantu:

- **Pencipta arsip** (Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Ormas/ Orpol, BUMN/ BUMD, dan PTN) dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis guna menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah
- **Lembaga Kearsipan** dalam melakukan pengelolaan arsip statis guna menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan
-

Informasi lebih lanjut :

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan (12560)

Telp. (021) 7805851 Psw. 722 Fax. (021) 7810282 E-Mail: pusjibangsiskar@yahoo.co.id



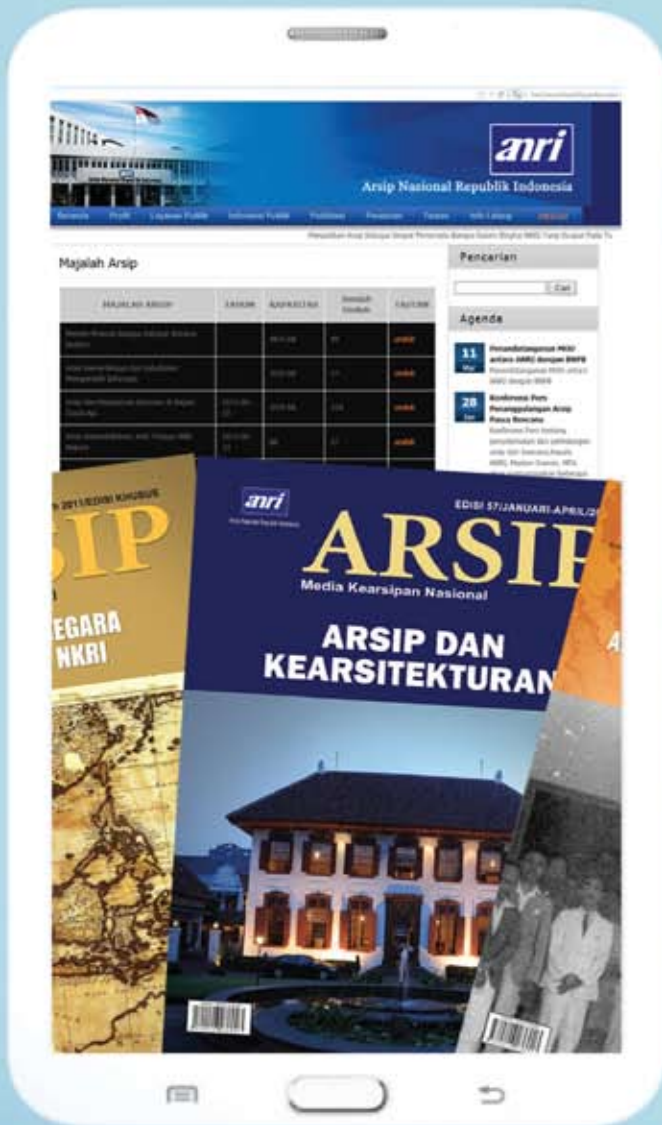
KUNJUNGI...
GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat